

p-ISSN 2089-0338
e-ISSN 2502-7921

Vol. 14 No. 01 (2024)

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial



Nomor : 200/M/KPT/2020



Diterbitkan oleh :
Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
Kementerian Sosial RI

Vol 14, No. 01 (2024)

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Sebuah Jurnal yang menyajikan Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk hasil penelitian bidang kesejahteraan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember. SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari "Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial" yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei-Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 menggunakan Open Journal System (OJS). Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di jurnal ini harus melakukan pengiriman naskah melalui Open Journal System (OJS). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 21/E/KPT/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I tahun 2018 ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah **Terakreditasi Peringkat 2** (Volume 6 Nomor 1 tahun 2016 sampai Volume 10 Nomor 1 tahun 2020). Pada Tahun 2020 kembali mengajukan akreditasi dan berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia No. 200/M/KPT/2020 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III tahun 2020 ditetapkan kembali sebagai sebagai Jurnal Ilmiah **Terakreditasi Peringkat 2**. Pada tahun 2022 dilakukan pengalihan pengolahan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial ke Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada tahun 2023 dilakukan perubahan website dari <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia> ke <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk>

Alamat :

Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI
Radio Dalam, 11, Jl. Margaguna Raya No.1, RT.11/RW.1, Gandaria Sel., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12420

e-mail : sosiokonsepsia@gmail.com

e-journal: <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk>

Editorial Team

Penanggungjawab

Dr. Hasim, M.Si, Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Manajer Jurnal

Evy Flamboyan Minanda, S.H, M.H Dr, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Pimpinan Editor

Dr. Toton Witono, M.A Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta

Editor Bagian

Dr. Sri Tjahjo Rini, M.Si. Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Dr. Nismah Qonitah, S.Pd.I, M.A. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin, Kementerian Sosial RI, Indonesia

Ika Agus Setyarukmi, S.IP, MA. Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Jazak Akbar Hidayat, S.H, MA., Ph.D Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin, Indonesia

Drs. Indro Widi Handoko, M.Si. Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Lasarus Jehamat, S.Sos, MA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Sri Widayanti, S.PdI, MA. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Chusnul Chatimah Asmad, S.I.P, M.I.P. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Jayapura, Kementerian Sosial RI, Indonesia

Syamsuddin, Ph.D. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Proofreader & Layout Editor

Anisa Retno Febriyanti, S.Sos, M.S.M. Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Sekretariat

Baiq Endang Dwi Handayani M.Si. Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Yuliana, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Mitra Bebestari

Prof. Adi Fahrudin, Ph.D, Scopus ID: [35261484600](#), Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Raya, Jakarta, Indonesia.

Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D, Scopus ID: [57210976685](#), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, Scopus ID: [25823852000](#), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

Agus Fanar Syukri, Ph.D, Scopus ID: [56516912500](#), Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Binahayati Rusyidi, Ph.D, Scopus ID: [55778489900](#), Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia.

Dr. Bambang Rudito, Scopus ID: [36632972600](#), Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung, Indonesia.

Nurhadi, S.Sos. M.Si. Ph.D, Scopus ID: [57209449684](#), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Dr. Santoso Tri Raharjo, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

Dede Rahmat Hidayat, M.Psi, Ph.D, Scopus ID: [57210163446](#), Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Tauhid Komara Yudha, S.Sos. M.PD, Scopus ID: [57201631933](#), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Mu'man Nuryana, M.Sc., Ph.D. Scopus ID: [57223229321](#), Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Dr. Hari Harjanto Setiawan, M.Si Scopus ID: [57225011816](#) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Badrun Susantyo, Ph.D. Scopus ID: [57223215291](#) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Yanuar Farida Wismayanti, SST., MA., Ph.D. Scopus ID: [57202466692](#) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Habibullah, S.Sos., M.Kesos. Scopus ID: [57732733900](#) Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Nyi R. Irmayani, SH., M.Si. Scopus ID [57956596800](#) Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Daftar isi

Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Kemitraan Konservasi Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember <i>Zulfidda Lillah Zulfidda, Djuara P Lubis , Dwi Sadono</i>	1 - 12
Konversi Bentuk Kapital Untuk Pengentasan Kemiskinan Multidimensional Pada Penerima Bantuan Sosial Kewirausahaan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor <i>Astriyana Telaumbanua, Robert M.Z Latwang</i>	13 - 32
Praktik Anti-Opresi pada Lembaga Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas <i>Nurliana Cipta, Hadiyanto Rachim</i>	33 - 47
Sistem Peringatan Dini berbasis Masyarakat di Daerah Rawan Bencana: Studi di Tiga Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia <i>Alfian Helmi, Nur Hannah Muthohharoh</i>	48 -64
Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto <i>Muslim Sabarisman, Johan Arifin, Muhammad Belanawane Sulubere</i>	65- 80
Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo <i>Istiana Hermawati, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Muhammad, Saryana Saryana</i>	81 - 99
Pengasuhan Alternatif dalam Masyarakat Tradisional: Studi Kesejahteraan Anak di Dusun Gunung Loncek, Kalimantan Barat <i>Indah Listyaningrum</i>	100 - 109

Pengantar Redaksi

Jurnal Sosio Konsepsia adalah forum untuk publikasi, desiminasi dan perdebatan ide-ide dari hasil penelitian kesejahteraan sosial. Jurnal ini bertujuan untuk memajukan pemahaman teori, membentuk kebijakan, dan menginformasikan praktik penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Sosio Konsepsia diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tiga kali dalam setahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal Sosio Konsepsia terakreditasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek / BRIN) Peringkat 2 sesuai SK No.200 / M / KPT / 2020 Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020. Pada Volume 14, No. 01, 2024 menyoroti tentang isu kemitraan konservasi, konversi kapital, sistem peringatan dini berbasis masyarakat, kewirausahaan sosial, pemanfaatan bantuan sosial, dan pengasuhan anak.

Zulfidda Lillah Zulfidda, Djuara P Lubis , Dwi Sadono. Efektivitas program kemitraan konservasi merupakan ukuran tingkat keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan petani pada program kemitraan konservasi dan mengetahui dampak pemberdayaan masyarakat secara ekonomi dan sosial pada program kemitraan konservasi. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 60 responden di 4 blok manajemen pada bulan April-Mei 2023. Pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive sampling. Data dianalisis menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan petani pada program kemitraan konservasi cukup efektif. Hal ini dapat diketahui dari peningkatan pendapatan petani, peningkatan ekonomi (sebelum dan sesudah mengikuti program), peningkatan jumlah tanaman pokok dan jumlah bibit yang ditanam dan yang memiliki korelasi signifikan pada kesejahteraan petani. Fakta dilapang ditemukan masih terdapat blok pengelolaan masih 40% dari kewajiban menanam tanaman pokok. Dampak ekonomi yang didapatkan oleh petani setelah mengikuti program kemitraan konservasi memberikan peningkatan pendapatan yang dapat digunakan kebutuhan sehari-hari dan peningkatan pendapatan 4- 30 juta rupiah/tahun. Dampak secara sosial kini antar petani yang mengelola kawasan konservasi menjadi lebih kompak menjaga kawasan serta pertemuan rutin yang dilakukan sangat membantu keluhan petani saat menghadapi kendala dilahan

Astriyana Telaumbanua, Robert M.Z Lawang. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kapital (ekonomi, sosial, embodied dan digital) yang dimiliki oleh penerima bantuan sosial kewirausahaan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor melalui konversi untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan multidimensional. Dengan menggunakan metode fenomenologis, kami mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi dari tujuh penerima bantuan sosial kewirausahaan dari Kementerian Sosial RI, yang masih menjalankan usahanya dengan menggunakan teknik purposive sampling dari empat desa di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk-bentuk kapital dimanfaatkan oleh penerima bantuan untuk menjalankan dan mempertahankan kegiatan usaha melalui proses konversi dengan menggunakan kerangka teori praktik dari Pierre Bourdieu. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kapital ekonomi, sosial, digital dan embodied saling berinteraksi mendukung keberlanjutan usaha rumah tangga miskin. Kapital sosial memainkan peran penting dalam proses konversi kapital. Jaringan sosial dan kepercayaan membantu rumah tangga miskin mendapatkan sumber daya tambahan.

Keterampilan embodied yang sudah dimiliki penerima bantuan mengotimalkan bantuan sosial kewirausahaan yang mereka terima. Sementara kapital digital masih terbatas pemanfaatannya namun memperkuat kapital sosial yang sebelumnya telah terbangun. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam melaksanakan program bantuan sosial yang lebih terintegrasi agar lebih tepat guna mengentaskan kemiskinan multidimensional.

Nurliana Cipta, Hadiyanto Rachim. Ketidakadilan sosial yang dialami populasi disabilitas di berbagai rentang umur diperparah dengan kurangnya pelayanan lintas umur dan lintas jenis disabilitas yang disediakan baik itu oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Lembaga penyedia layanan bagi populasi disabilitas mayoritas masih bersifat karitas dan masih belum berubah dari model tradisional ke model sosial. Model sosial memandang fenomena disabilitas sebagai suatu kondisi yang dipengaruhi oleh struktur fisik lingkungan, perilaku sosial serta nilai budaya yang berkembang mengenai populasi disabilitas. Tujuan penulisan adalah untuk menggambarkan pelayanan yang ada bagi penyandang disabilitas kemudian dianalisa dari sudut pandang praktik anti-oppressive. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, dengan pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur, diperoleh 9 lembaga penyedia layanan bagi populasi disabilitas dan semua memberikan pelayanan yang bersifat rehabilitative. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan sudut pandang teori anti-oppressive. Hasil penelitian menemukan layanan bagi populasi disabilitas masih menggunakan pendekatan model medis dan orang disabilitas menjadi obyek dari layanan. Layanan yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap populasi disabilitas, perlu terus digalakkan sehingga tidak ada lagi cara pandang diskriminatif dan perlakuan oppressive yang diberikan kepada populasi disabilitas.

Alfian Helmi, Nur Hannah Muthohharoh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peringatan dini (SPD) berbasis masyarakat yang dikembangkan di daerah rawan bencana. Secara spesifik, tulisan ini menggambarkan profil bencana di lokasi studi; menganalisis bagaimana setiap komponen SPD yang dikembangkan berjalan; serta pada bagian akhir tulisan ini mengulas aspek tata kelola, komitmen pemerintah, dan perspektif inklusi dalam implementasi SPD berbasis masyarakat. Topik ini penting untuk diangkat karena pembahasan mengenai SPD berbasis masyarakat di Indonesia masih minim. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan partisipatif dengan mewawancarai sebanyak 20 informan kunci dan 6 kali focus group discussion (FGD) di ketiga desa di NTT, yakni Desa Bena (Kabupaten Timor Tengah Selatan), Desa Meusin (Kabupaten Timor Tengah Selatan) dan Desa Motaulun (Kabupaten Malaka). Meskipun dihadapkan pada keterbatasan akses informasi dan pemahaman teknis SPD, hasil studi menunjukkan bahwa sistem peringatan dini berbasis masyarakat yang dikembangkan di ketiga desa dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan, tentang peringatan dini dan tindakan respons yang tepat. Sayangnya, kebutuhan disabilitas, anak-anak, dan lansia belum menjadi fokus perhatian. Keberlanjutan dan pengembangan sistem ini kedepan sangat tergantung pada dukungan dari pemerintah dan kolaborasi lintas sektor di ketiga desa.

Muslim Sabarisman, Johan Arifin, Muhammad Belanawane Sulubere. Artikel ini mengkaji kontribusi intervensi berbasis kewirausahaan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan jaringan sosial bagi penerima program bantuan sosial transfer bersyarat Indonesia, Program Keluarga Harapan. Melalui studi kasus pada Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di Kabupaten Mojokerto, digunakan metode kualitatif dengan data yang dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan tinjauan dokumentasi dari penerima manfaat, pendamping sosial, dan dinas pemerintah daerah. Temuan menunjukkan bahwa ProKUS berhasil mendorong peningkatan relatif pendapatan keluarga melalui berbagai kegiatan usaha mikro seperti produksi sepatu dan penjualan makanan keliling. Selain itu, interaksi dalam komunitas kewirausahaan ini memperkuat jaringan sosial di kalangan penerima manfaat, menciptakan solidaritas dan saling dukung yang merupakan faktor penting bagi keberhasilan usaha. Akan tetapi terdapat beberapa tantangan dalam implementasi ProKUS, di antaranya keterbatasan modal, kurangnya keterampilan kewirausahaan, dan kendala akses teknologi. Studi ini merekomendasikan peningkatan akselerasi model peningkatan pendapatan KPM PKH melalui model

kewirausahaan dengan pelatihan usaha yang lebih relevan, akses modal yang berkelanjutan, dan kemudahan izin administrasi usaha. Dengan mengatasi tantangan ini dan memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas usaha lokal, ProKUS berpotensi menciptakan keluaran ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat PKH menuju keamanan finansial yang merupakan prasyarat vital bagi upward mobility.

Istiana Hermawati, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Muhammad, Saryana Saryana. Bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang rentan secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan bantuan sosial oleh keluarga penerima manfaat di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Menggunakan metode mixed methods dengan Kalurahanin concurrent embedded, penelitian melibatkan 40 responden dan 10 informan. Mayoritas responden berusia produktif, berstatus menikah, bekerja sebagai ibu rumah tangga, berpendidikan SMA, menanggung 4 jiwa dan berpenghasilan rendah. Hasil menunjukkan, bahwa sebagian besar responden memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pendidikan dan pangan, dan untuk menangani masalah finansial seperti hutang dan kebutuhan lainnya. Kontribusi bantuan sosial terhadap pendapatan keluarga berkisar antara 4%-58,9% dan terhadap pengeluaran 4,89%-47,18%. Bantuan sosial memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, 85% responden masih berada di bawah garis kemiskinan nasional. Meski membantu meringankan beban ekonomi, diperlukan peningkatan efektivitas program bantuan sosial melalui penargetan yang lebih tepat dan pemberdayaan ekonomi. Rekomendasi yang diajukan mencakup integrasi program bantuan sosial dengan literasi keuangan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat.

Indah Listyaningrum. Pengasuhan anak merupakan faktor penting untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak. Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan, pemahaman mengenai sistem pengasuhan anak di masyarakat adat, terutama yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, masih sangat kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sistem pengasuhan alternatif pada masyarakat Dayak Kanayatn di Dusun Gunung Loncek dan mengidentifikasi faktor protektif dan risiko yang ada. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan dua bentuk utama pengasuhan alternatif, yaitu pengasuhan oleh kerabat berdasarkan hubungan darah (pengasuhan kekerabatan) dan melalui prosesi adat pangarusant (pengasuhan angkat anak). Kedua bentuk pengasuhan ini memiliki akar budaya yang kuat dan dirancang untuk memastikan kesejahteraan anak secara holistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengasuhan alternatif di masyarakat Dayak Kanayatn memiliki faktor perlindungan yang mendukung perkembangan anak sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Temuan ini memiliki implikasi bagi pengembangan Pekerjaan Sosial Berbasis Budaya, yang menunjukkan bahwa integrasi praktik pengasuhan anak secara tradisional dapat memperkaya strategi pekerjaan sosial yang lebih peka terhadap budaya. Penelitian ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengasuhan anak di masyarakat adat.

Dewan redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan pikiran dalam penerbitan jurnal ini. Kami menyadari bahwa edisi kali ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan jurnal ini di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2024
Redaksi

Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Kemitraan Konservasi Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember

Zulfidda Lillah^{1*}  Djuara P Lubis¹  Dwi Sadono¹ 

¹ Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University, Bogor, 16680, Indonesia

* Korespondensi: zulfidda2808@gmail.com ; Tel: +62-856-9519-5982

Diterima: 25 Maret 2024 ; Disetujui: 30 Oktober 2024; Diterbitkan: 31 Desember November 2024

Abstrak: Efektivitas program kemitraan konservasi merupakan ukuran tingkat keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan petani pada program kemitraan konservasi dan mengetahui dampak pemberdayaan masyarakat secara ekonomi dan sosial pada program kemitraan konservasi. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 60 responden di 4 blok manajemen pada bulan April-Mei 2023. Pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive sampling. Data dianalisis menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan petani pada program kemitraan konservasi cukup efektif. Hal ini dapat diketahui dari peningkatan pendapatan petani, peningkatan ekonomi (sebelum dan sesudah mengikuti program), peningkatan jumlah tanaman pokok dan jumlah bibit yang ditanam dan yang memiliki korelasi signifikan pada kesejahteraan petani. Fakta dilapang ditemukan masih terdapat blok pengelolaan masih 40% dari kewajiban menanam tanaman pokok. Dampak ekonomi yang didapatkan oleh petani setelah mengikuti program kemitraan konservasi memberikan peningkatan pendapatan yang dapat digunakan kebutuhan sehari-hari dan peningkatan pendapatan 4- 30 juta rupiah/tahun. Dampak secara sosial kini antar petani yang mengelola kawasan konservasi menjadi lebih kompak menjaga kawasan serta pertemuan rutin yang dilakukan sangat membantu keluhan petani saat menghadapi kendala dilahan.

Kata kunci: efektivitas, pemberdayaan masyarakat, kemitraan konservasi

Abstract: The effectiveness of a conservation partnership program is a measure of the level of success in achieving predetermined goals. This research aims to analyze the effectiveness of community empowerment in improving farmer welfare in conservation partnership programs and determine the economic and social impact of community empowerment in conservation partnership programs. This research was conducted by interviewing 60 respondents in 4 management blocks in April-May 2023. Data collection was carried out using the purposive sampling method. Data were analyzed using SPSS 23. The research results showed that the effectiveness of community empowerment in improving farmer welfare in the conservation partnership program was quite effective. This can be seen from the increase in farmer income, economic improvement (before and after participating in the program), increase in the number of staple crops and number of seeds planted and which has a significant correlation with farmer welfare. In fact, in the field it was found that there were still management blocks that still accounted for 40% of the obligation to plant staple crops. The economic impact obtained by farmers after participating in the conservation partnership program provides an increase in income that can be used for daily needs and an increase in income of 4-30 million rupiah/year. The social impact is now that farmers who manage conservation areas are becoming more united in protecting the area and the regular meetings that are held really help with farmers' complaints when they face problems on the land.

Keywords: effectiveness, community empowerment, conservation partnership

1. Pendahuluan

Pembangunan Pembangunan pada era saat ini tidak lagi berpusat pada pemerintah namun juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri (Yogia dan Suri, 2020). Pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah sering kali terhambat oleh karena pemerintah kurang matang dalam perencanaan

<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk/article/view/3328>

DOI : [10.33007/ska.v14i1.3328](https://doi.org/10.33007/ska.v14i1.3328)

kepada siapa, apa program yang dibutuhkan dan cara yang efektif untuk dapat menyampaikan program pembangunan nasional. Program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta dapat memberdayakan masyarakat pada taraf ekonomi lemah. Program pembangunan salah satunya terdapat pada kawasan konservasi yang memiliki ciri khas yang tidak dimiliki di kawasan lain. Program yang berada pada kawasan hutan konservasi memiliki berbagai aturan ketat untuk dapat mengelolaa berdasarkan aturan yang telah disepakai bersama UPT taman nasional dengan pihak mitra. Pembangunan pada bidang kehutanan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dan komitmen untuk pengembangan masyarakat sekitar kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan konservasi secara tidak bijaksana menimbulkan kerusakan lingkungan serta potensi konflik yang terjadi dimasyarakat.

Kawasan hutan memiliki berbagai macam potensi dari sumber daya alam hingga sumberdaya mineral yang terkandung di dalamnya. Potensi pada kawasan hutan tidak hanya berupa pemanfaatan kayu namun juga potensi tanaman non kayu yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Pengelolaan kawasan hutan tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan tanpa mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi dan budaya serta mengedepankan kaidah konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi harus dapat dirasakan oleh masyarakat. Hubungan timbal balik masyarakat dengan kawasan konservasi haruslah disepakati bersama melalui prinsip yang setara. Tujuan pengelolaan kawasan konservasi diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan jangka pendek hingga jangka panjang sekaligus memegang teguh nilai-nilai kemanfaatan lintas generasi (Wiratno, 2018). Pemanfaatan kawasan hutan tentu saja harus sesuai dengan kesemimbangan lingkungan yang tidak hanya berorientasi ekonomi namun juga berwawasan lingkungan yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, menghentikan penurunan fungsi lahan dan mengurangi

Kawasan kemitraan konservasi merupakan bentuk kerjasama antar stakeholder yang menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama melalui konsep saling percaya, saling menguntungkan dan gotong royong. Kawasan konservasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No P.6/KSDAE/Kum.1/6/2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi mengatur dua lingkup dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem. Skema ini menjamin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang diperoleh dari kawasan konservasi (Prayitno, 2020). Kemitraan konservasi sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat melalui pemanfaatan kawasan konservasi melalui penetapan zonasi. Penetapan zonasi dilakukan supaya masyarakat mengerti bahwa kawasan konservasi juga memiliki keterbatasan akses untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penataan kawasan konservasi ke dalam zona/blok merupakan upaya membagi/menata ruang dalam kawasan konservasi guna mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem di setiap kawasan konservasi (KLHK, 2023). Zona yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan berada di zona rehabilitasi taman nasional atau blok rehabilitasi suaka marga satwa, taman hutan raya atau taman wista alam atau areal yang telah mengalami kerusakan dan bukan pada areal jelajah satwa dilindungi atau habitat dilindungi.

Permasalahan yang terjadi pada Taman Nasional Meru Betiri dilatarbelakangi oleh kerusakan kawasan hutan konservasi akibat pembalakan liar pada tahun 1998. Masyarakat yang berada disekitar kawasan konservasi sebagian besar hanya bekerja serabutan sebagai buruh tani, buruh bangunan hingga bekerja keluar negeri tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memiliki lahan pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari hari. Kerusakan hutan yang terjadi menggerakkan masyarakat sekitar kawasan taman nasional untuk merehabilitasi kawasan hutan dengan memberdayakan masyarakat turut serta dalam pengembalian kawasan hutan. Program rehabilitasi lahan dilakukan pada periode tahun 1998-2022 bertujuan mengembalikan fungsi hutan TNMB dan dilanjutkan melalui program pemulihan ekosistem. Kesadaran masyarakat sekitar dalam

menjaga kelestarian lingkungan khususnya pada pemulihan kawasan hutan yang telah rusak masih cukup rendah. Hal ini didukung oleh penelitian (Mariyani dan Suciati, 2021) menemukan bahwa kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan TNMB dihadapkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara tanaman pokok dan kewajiban penanaman tanaman pokok atau tutupan yang belum terpenuhi. Program yang telah berlangsung hampir dua dekade ini masih belum menunjukkan hasil yang signifikan dari segi ekologi (tutupan kawasan), segi ekonomi dan sosial.

Masyarakat yang hidup disekitar kawasan taman nasional tidak memperoleh ijin untuk memanfaatkan sumberdaya hutan menyebabkan masyarakat memilih untuk melakukan tindakan illegal untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah melalui UPT taman nasional memberikan ijin pengelolaan kepada masyarakat melalui program kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi ini merupakan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan untuk mengkonservasi kawasan hutan yang telah rusak dan masyarakat diberikan kesempatan untuk mengolah kawasan tradisional yang ada di Kawasan Pelestarian Alam yang berada di zona tradisional. Program kemitraan konservasi memiliki prinsip untuk saling menguntungkan, saling menghargai, dan saling percaya (KLHK 2018). Kemitraan konservasi di kawasan TNMB ini melalui skema pemberdayaan masyarakat yang mana memiliki tujuan pengembalian kawasan yang rusak serta memposisikan masyarakat/kelompok sebagai mitra yang setara. Kemitraan konservasi sebagai salah alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan pemanfaatan kawasan konservasi antara pihak taman nasional dengan masyarakat melalui pengelolaan bersifat kolaboratif. Kemitraan konservasi melalui skema pemulihan ekosistem ini turut serta untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk dapat mengelola kawasan serta mendapatkan manfaat dari hasil hutan bukan kayu dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kemitraan konservasi melalui skema pemberdayaan masyarakat merupakan program pemberdayaan yang mengutamakan prinsip kesetaraan, lokal spesifik, kesepakatan transparansi dan partisipasi (Situmorang et al. 2022).

Pemberdayaan masyarakat secara umum ditujukan kepada kelompok masyarakat yang lemah sehingga setelah diberdayakan mereka dapat memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Suharto (2017) Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2017) Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginan. Termasuk aksesibilitas terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosial. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Pemberdayaan masyarakat yang berada pada kawasan hutan konservasi menjadi tantangan untuk dapat menjaga keseimbangan lingkungan serta kebermanfaatan bagi masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan tentu saja memiliki perbedaan dengan program pemberdayaan lainnya. Program pemberdayaan di sekitar kawasan hutan tidak hanya mengutamakan adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk berdaya namun juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan bertujuan untuk memberikan hak kepada masyarakat lokal, menyediakan mata pencaharian dan kaodah konservasi (Fisher et al., 2018). Program pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi (LMDHK) Wonomulyo berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan penanaman tanaman pokok serta pemanfaatan sumberdaya hasil hutan non kayu (nangka, durian, mengkudu dan alpukat).

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan pendampingan terkait kelestarian lingkungan kawasan, pemanfaatan tanaman non kayu pada lahan tradisional serta, penanaman tanaman pokok (pakem, djuwet, kepuh dan sonokeling) dikawasan hutan yang telah rusak. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan dan turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan (Yumantoko, 2022).

Kegiatan kemitraan konservasi tidak dapat terlepas dari fasilitator/penyuluh yang memiliki peran untuk membantu kelompok tani mengelola lahan. Hasil penelitian (Okthalamo et al. 2022) bahwa Kemitraan konservasi pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TBBBS) memberikan kesempatan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaantaman nasional dengan memanfaatkan hasil hutan tanpa merusak ekosistem Kegiatan penyuluhan diharapkan memiliki pembinaan yang berkelanjutan bagi para petani serta mampu meningkatkan peran aktif dan memberikan dorongan untuk dapat lebih baik salah satunya pada bidang kehutanan. Penyuluh pada bidang kehutanan khususnya pada kawasan konservasi memberikan pembinaan mengenai kegiatan budidaya tanaman hutan serta memberikan pendampingan kepada petani mengenai potensi ekonomi dan pemanfaatan jasa ekosistem kawasan hutan Elena et al. (2021). Penyuluh sebagai perwakilan dari UPT Taman nasional yang interaksi secara langsung dengan petani. Memiliki tugas untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran menjaga lingkungan dan kesejahteraan anggota kelompok. Penyuluh kehutanan pada program kemitraan konservasi sebagai fasilitator yang memiliki fungsi mendampingi terkait pembentuk kelompok, penyusunan rencana kerja, proposal dan pendampingan pemberdayaan dilapangan (Putri et al. 2022).

Program yang berjalan tentu tidak dapat terlepas dari partisipatif aktif dari anggota kelompok untuk melaksanakan program pemberdayaan tersebut. Program pemulihan ekosistem yang dilaksanakan dari tahun 2016-2019 melalui pendekatan persuasif dengan melibatkan anggota kelompok namun belum efektif pada penerapan tutupan tanaman pokok. Indikator efektivitas program kemitraan konservasi diukur melalui tiga kelompok penilaian yakni: 1) Indikator lingkungan, tata kelola kawasan, 2) Indikator ekonomi, tata kelola ekonomi dan kesejahteraan, 3) Indikator sosial dan budaya penguatan kelembagaan dan modal sosial (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Partisipasi petani menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan pemulihan ekosistem dengan pola partisipasi dengan petani mitra (Guntoro 2018). Partisipasi anggota kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi (LMDHK) dalam program kemitraan konservasi dengan skema pemberdayaan masyarakat tidak berjalan secara optimal atau dapat dikatakan tujuan dari LMDHK belum tercapai (Charistandi dan Widjayanthi 2021). Efektivitas program kemitraan konservasi yang masih belum mencapai efektif dari peningkatan ekonomi yang diperoleh oleh petani, secara ekologi terkait peningkatan tutupan tanaman pokok yang telah disepakati bersama dan secara sosial kemudahan petani untuk berinteraksi dengan penyuluh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap program kemitraan konservasi. Menganalisis dampak pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial dan ekologi pada program kemitraan konservasi.

Penelitian terdahulu yang mengangkat terkait topik efektivitas pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi. Pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan konservasi tidak hanya melindungi kawasan hutan namun juga dapat memberikan ruang partisipasi untuk masyarakat di sekitrar kawasan konservasi. Sitaresmi et al., 2023 menjelaskan dalam penelitiannya bahwa upaya konservasi juga harus memperhatikan prinsip pemanfaatan untuk lebih mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat di kawasan Hutan Sesaot dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman fasilitator terkait tujuan program pemberdayaan dalam menyampaikan kepada petani (Yumantoko, 2022). Terdapat kajian terkait pemberdayaan melalui pola kehutanan efektif memberikan keuntungan dari segi sosial dan ekonomi (Jazadi et al., 2023). Efektifitas pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Antajaya Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh kolaborasi pemerintah desa dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam

mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan secara tepat sasaran (Mauludi et al., 2023). Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan konservasi memiliki manfaat secara ekonomi, ekologi dan sosial. Hal ini didukung oleh (Saragi, 2023) menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat di Taman Hutan Raya selain memiliki manfaat meningkatkan pendapatan dan kepedulian terhadap lingkungan. Ketergantungan masyarakat Desa Gapit dan Boal karena menganggap bahwa hutan satu satunya sumber pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sumber peningkatan kesejahteraan (Jazadi et al., 2023).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif korelasional dengan menggunakan responden sebagai sumber informasi untuk memperoleh data. Teknik yang digunakan dalam memperoleh sample responden menggunakan purposive sampling (secara sengaja). Penentuan responden didasarkan karena anggota LMDHK Wonomulyo adalah salah satu kelompok binaan TNMB yang diberikan ijin pengelolaan kawasan hutan sejak tahun 1998 yang belum memahami manfaat adanya program kemitraan konservasi. Kegiatan pemulihan ekosistem yang dilakukan pemberdayaan namun hanya sebatas penanaman tanaman hutan tanpa dilakukan monitoring dan pendampingan yang intensif. Kegiatan pemulihan ekosistem tidak hanya mengembalikan kawasan hutan tetapi turut serta melibatkan anggota kelompok turut pemberdayaan. Pesan komunikasi yang diberikan kepada sasaran tidak hanya menyangkut pada pemanfaatan kawasan hutan namun mengutamakan kaidah konservasi. Hal ini didukung hasil penelitian Lillah (2020) yang menemukan bahwa pemanfaatan kawasan kemitraan konservasi masih memiliki perbedaan makna antara anggota LMDHK dengan taman nasional dalam tujuan tutupan tanaman pokok.

Menurut Sugiyono, (2016) menyatakan bahwa purposive sampling yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menetapkan sample penelitian dengan cara memilih lokasi sesuai dengan tujuan dan masalah dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan april 2023 hingga Agustus 2023. Lokasi penelitian di Resort Wonoasri, Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember. Sample penelitian dilakukan kepada anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi (LMDHK Wonomulyo) yang meliputi empat blok pengelolaan kawasan kemitraan konservasi (blok Pletes, Bonangan, Donglo dan Curah Malang). Responden pada penelitian ini adalah dua orang dari masing-masing pengurus inti anggota kelompok tani dan 52 orang anggota yang dipilih secara acak dan proporsional pada tiap blok sehingga total berjumlah 60 petani. Pengambilan data kepada informan dengan menggunakan kuesioner dan didukung data sekunder melalui literatur review (jurnal dan buku). Analisis data dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 23 untuk mengukur korelasi dan signifikansi data.

3. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas dipahami sebagai suatu ukuran atau tingkat ketercapaian suatu program. Efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan (Gunantoro, 2017). Efektivitas dapat dilihat dari kemampuan dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan. Pencapaian tujuan bersama dapat dilihat secara nyata. Efektivitas suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan organisasi atau pemerintahan, maka perlu adanya indikator atau pengukuran terhadap efektivitas tersebut (Idris et al. 2023). Indikator yang dimaksud dapat digunakan sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan suatu program/kebijakan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sasaran. Menurut (KLHK, 2018) setidaknya terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas program kemitraan konservasi dapat direalisasikan, yaitu; Indikator efektivitas keberhasilan diukur melalui tiga kelompok penilaian yakni: 1) Indikator lingkungan, tata kelola kawasan, 2) Indikator ekonomi, tata kelola ekonomi dan kesejahteraan, 3) Indikator sosial dan budaya penguatan kelembagaan dan modal sosial (KLHK, 2018).

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan adalah keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan (Damanik dan Purba, 2022). Keberlanjutan fungsi sosial dan fungsi ekonomi dari hutan sendiri sebagai daya dukung lingkungan selaras dengan kehidupan masyarakat melalui program kemitraan konservasi. Dampak yang dirasakan secara ekonomi turut membantu peningkatan pendapatan petani LMDHK Wonomulyo dengan menjual hasil hutan non kayu. Data dampak secara ekonomi dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Dampak ekonomi pemberdayaan kelompok LMDHK pada program kemitraan konservasi

No	Peningkatan pendapatan (Juta/tahun)	Jumlah (individu)	Persentase (%)
1	1-4 (juta/tahun)	5	8,33
2	5-9 (juta/tahun)	35	58,34
3	10-14 (juta/tahun)	14	23,33
4	15-30 (juta/tahun)	6	10,00
Total		60	100

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil tabel 3.1 menjelaskan bahwa pemberdayaan bagi petani yang tergabung LMDHK Wonomulyo memiliki manfaat penambahan pendapatan dari hasil penjualan hasil hutan non kayu (HHBK) melalui program kemitraan konservasi. Menurut Guntoro *et al.* (2018) menemukan bahwa pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) mencapai 90% dari total nilai ekonomi dari ekosistem hutan. Manfaat secara ekonomi yang diberikan dari hasil hutan non kayu memberikan kesejahteraan bagi petani yang mengelola kawasan kemitraan konservasi. Peningkatan pendapat petani yang diberi ijin pengelolaan kawasan konservasi memiliki dampak yang berkelanjutan. Petani LMDHK Wonomulyo merasakan manfaat secara ekonomi dengan mengelola lahan yang diberikan dengan menanam tanaman non kayu. Peningkatan pendapatan dari hasil hutan non kayu yang di manfaatkan buahnya memiliki nilai jual ekonomis. Pendapatan petani dari yang terkecil sekitar Rp 4 Juta/tahun hingga Rp 30 juta/tahun. Peningkatan ini adalah hasil yang baik bagi petani mengingat turut membantu kebutuhan ekonomi petani dari kegiatan kemitraan konservasi terdapat petani yang bisa membeli kendaraan bermotor(sepeda dan mobil).

3.1 Dampak pemberdayaan secara sosial pada program kemitraan konservasi

Kebermanfaatan suatu program tidak secara langsung dirasakan oleh penerimanya. Pertemuan antar petani dengan difasilitasi oleh penyuluh/kepala resort untuk menampung aspirasi maupun sebagai sarana berdiskusi terkait pelaksanaan program kemitraan konservasi melalui pertemuan rutin. Pertemuan rutin yang telah disusun secara terjadwal memudahkan petani untuk saling sharing pengalaman terkait kendala pengelolaan lahan. Program kemitraan konservasi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya sosial bagi petani penerima ijin pengelolaan.

Tabel 3.2 Dampak sosial pemberdayaan kelompok LMDHK pada program kemitraan konservasi

No	Peningkatan pertemuan	Kegunaan	Individu (jumlah)	Persentase (%)
1	Pertemuan antar petani dilahan	Sangat merasakan	49	81,66
		Merasakan	11	18,34

			Kurang merasakan	0	0
			Tidak merasakan	0	0
	Total			60	100
2	Pertemuan antar petani di luar lahan		Sangat mudah	46	76,66
			Mudah	14	23,34
			Sulit	0	0
			Sangat sulit	0	0
	Total			60	100

Sumber: Data diolah (2023)

Manfaat secara sosial dengan adanya program kemitraan konservasi petani menjadi lebih “guyub”/rukun serta sadar akan pentingnya menjaga hutan secara berkelompok dan saling menjaga. Menurut Gaol *et al.* (2022) menemukan bahwa keberlanjutan program kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan *Cycloop* masih rendah karena aturan kelompok yang belum dipahami dan ditaati serta belum adanya sanksi tegas. Aturan yang belum dipahami dengan baik bisa menjadi tantangan kelompok yang harus mengerti dan memahami aturan yang telah disepakati. Interaksi antar anggota kelompok menjadi modal utama untuk memudahkan pertukaran informasi. Kehadiran peran serta Taman Nasional Meru Betiri untuk mengakomodasi petani dan bermitra memberikan manfaat penggerak secara sosial saling bekerjasama mencapai tujuan program. Kemitraan konservasi menjadikan petani lebih mudah berinteraksi satu dengan lainnya melalui pertemuan rutin, kegiatan keagamaan serta kegiatan sosial memiliki satu identitas “petani lahan rehab”. Kepedulian petani akan menjaga kawasan menjadi lebih kompak mengingat pengelolaan kawasan merupakan tanggung jawab bersama supaya aman dari gangguan yang tidak diinginkan.

3.2 Dampak pemberdayaan secara ekologi pada program kemitraan konservasi

Keberadaan hutan memberikan manfaat nyata kepada manusia baik manfaat yang diberikan secara ekologi, sosial budaya maupun secara ekonomi. Hutan yang telah tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik supaya kelak bermanfaat bagi generasi penerus. Keberlanjutan fungsi hutan tentu saja membutuhkan partisipasi masyarakat tidak hanya sadar namun juga perilaku untuk menjaga kelestarian muncul. Perilaku peduli lingkungan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan melalui pesan yang disampaikan bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk mau dan mampu menjaga kelestarian kawasan konservasi.

Tabel 3.3 Dampak ekologi pemberdayaan kelompok LMDHK pada program kemitraan konservasi

No	Peningkatan Lingkungan	Kegunaan	Individu (jumlah)	Persentase (%)
1	Berkurangnya erosi dan banjir	Sangat merasakan	45	75,00
		Merasakan	15	25,00
		Kurang merasakan	0	0
		Tidak merasakan	0	00
	Total		60	100

2	Ketersediaan air saat Kemarau	Sangat mudah	37	61,66
		Mudah	23	38,34
		Sulit	0	0
		Sangat sulit	0	0
	Total		60	100
3	Kemunculan satwa liar	Selalu melihat	40	66,66
		Sering melihat	14	23,34
		Jarang melihat	6	0
		Tidak melihat	0	0
	Total		60	100
4	Penurunan suhu disekitar kawasan	Sangat merasakan	23	28,34
		Merasakan	24	40,00
		Kurang merasakan	13	21,66
		Tidak merasakan	0	0
	Total		60	100

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 3.3 menjelaskan bahwa dampak ekologi pada aspek peningkatan kondisi lingkungan meliputi berkurangnya erosi dan banjir, ketersediaan air saat kemarau, kemunculan satwa liar dan penurunan suhu disekitar kawasan kemitraan konservasi. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan konservasi di Resort Wonoasri dengan adanya program pemulihan ekosistem banjir tahunan secara berangsur banjir. Bencana banjir setiap tahun semakin parah puncaknya pada tahun 2018 yang membawa serasah ranting tanaman dan tanah erosi dengan jumlah cukup besar. Banjir pada tahun 2018 menjadi banjir terparah dengan lama genangan banjir di Resort Wonoasri selama satu minggu. Saluran sungai baru (sudetan) untuk menanggulangi aliran banjir sedalam empat meter dengan panjang sekitar satu kilo meter penuh dengan ranting dan hasil erosi hulu di kawasan Resort Wonoasri. Banjir yang selama ini menjadi rutinitas tahunan perlahan mulai berkurang waktu genangan air juga berkurang menjadi satu hari. Kawasan kemitraan konservasi saat ini mulai menunjukkan hasilnya dengan semakin rapatnya tanaman pokok. Hal ini memberikan dampak positif laju air di hulu dapat diserap dengan baik oleh tanaman.

Ketersediaan air menjadi kendala yang berulang kali terjadi ketika memasuki musim kemarau. Ketersediaan air ini menjadi penting sebagai sumber kehidupan untuk menyiram tanaman yang berada di kawasan kemitraan konservasi. Kawasan konservasi yang telah tertutup dengan tanaman pokok mulai merasakan hasilnya yaitu dengan munculnya sumber mata air yang berada di bawah pohon kepuh tepatnya berada Blok Pletes. Hal ini juga didukung oleh Peran *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa tindakan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Puhu dan Tapobali dengan menanam dan merawat pohon di hutan yang memiliki dampak positif bagi konservasi hutan dan sebagai upaya menjaga sumber mata Air Lawe supaya tetap tidak kering dikala musim kemarau.

Keberadaan hutan sebagai taman nasional menjadi sangat penting. Hutan sebagai paru- paru dunia juga menyimpan plasma nutfah yang cukup beragam sebagai tempat bagi tumbuhan dan hewan untuk dapat berkembang biak maka dibentuklah taman nasional sebagai upaya pelestarian. Kawasan Taman Nasional Meru Betiri menjadi salah satu yang menerapkan kemitraan konservasi sebagai upaya untuk mengembalikan ekosistem yang telah rusak menjadi lebih baik. Salah satu keberhasilan program

kemitraan konsevasi adalah munculnya satwa ke karea zona tradisional. (KLHK, 2018). Kemunculan satwa liar teramati oleh petani pada blok pengelolaan Pletes. Kemunculan satwa ini menjadi indikator alami bahwa ekosistem hutan mulai membaik. Fakta dilapang bahwa kemunculan satwa yang terlihat pada kawasan kemitraan konservasi seperti kijang, babi hutan, trenggiling, burung serta monyet ekor pendek yang sedang memakan tanaman non kayu petani seperti kacang panjang, durian dan mengkudu.

Peningkatan suhu bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia yang tidak memperhatikan dampak lingkungan salah satunya adalah deforestasi hutan (Wahyuni dan Suranto, 2021). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat mengembalikan kawasan hutan yang mengalami perubahan salah satunya dengan pemulihan ekosistem melalui skema kemitraan konservasi. Pemulihan kawasan hutan memiliki manfaat untuk menurunkan suhu udara. Fakta di lapangan menunjukkan petani merasa suhu yang berada di kawasan yang telah tertutup kembali ekosistemnya menjadi lebih sejuk dan asri. Kawasan konservasi yang dahulu gersang dan rawan longsor berkat partisipasi petani aktif kini menjadi lebih hijau dan teduh.

3.3 Hubungan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dengan Program Kemitraan Konservasi.

Efektivitas dapat dimaknai sebagai ukuran tingkat keberhasilan suatu program. Kontribusi yang dihasilkan pada pencapaian tujuan maupun sasaran yang ditentukan dikatakan tepat sasaran apabila mencapai tujuan dari berjalannya program Idris *et al.* (2023).

Tabel 3.4 Efektivitas program kemitraan konservasi terhadap peningkatan kesejahteraan petani

No	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Program Kemitraan Konservasi	Nilai Koefisien
1	Jumlah bibit yang ditanam	0,000
2	Hasil tanaman non kayu meningkatkan pendapatan petani	0,000*
3	Peningkatan perekonomian petani sebelum dan sesudah mengikuti kemitraan konservasi	0,000*
4	Peningkatan jumlah tanaman pokok meningkatkan pendapatan	0,000*
5	Peningkatan pertemuan antar petani dilahan	0,000*

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan analisis tabel 3.4 menyatakan bahwa variabel yang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini bermakna memiliki hubungan secara signifikan dan berkorelasi kuat dengan efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap program kemitraan konservasi. Efektivitas sebagai proses yang sedang dan telah terlaksana untuk memberikan rekomendasi maupun masukan untuk berjalannya program yang lebih baik dan tepat sasaran bagi masyarakat disekitar kawasan konservasi. Berdasarkan tabel 3.4 menjelaskan bahwa jumlah bibit yang ditanam memiliki hubungan signifikan dan memiliki korelasi kuat dalam efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan petani pada program kemitraan konservasi karena jenis bibit yang ditanam memiliki nilai ekonomis. Jenis bibit yang ditanam meliputi tanaman non kayu seperti nangka, pete, mengkudu, mangga, durian, jambu mente, jambu mente dan cabe jawa. Keanekaragaman jenis bibit yang ditanam oleh petani telah mendapatkan ijin dan diketahui oleh pihak resort. Hal ini didukung penelitian Mariyani dan Suciati, (2021) bahwa kepatuhan petani LMDHK Wonomulyo dalam pemulihan ekosistem menjadi semakin baik dan tingkat kesejahteraan meningkat mengingat petani memanfaatkan keanekaragaman tanaman *Multi Purpose Trees Species* (MPTS) yang memiliki nilai ekonomi. Penanaman berbagai jenis bibit dilakukan guna kawasan kemitraan hanya tidak hanya

memiliki jenis tanaman pokok namun juga terdapat tanaman yang dapat dimanfaatkan hasilnya untuk dijual hasil buahnya.

Variabel peningkatan pendapatan memiliki hubungan secara signifikan dan memiliki korelasi kuat dalam efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan petani pada program kemitraan konservasi. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada petani mengenai cara penanaman tanaman pokok dan pemanfaatan tanaman non kayu yang mulai membuahkan hasil dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini didukung oleh penelitian Prasetia *et al.* (2023) bahwa dampak yang dirasakan secara ekonomi dari penerapan kemitraan konservasi digunakan untuk membangun tempat tinggal hingga membeli kendaraan bermotor. Petani LMDHK Wonomulyo saat ini mulai merasakan hasil tanaman non kayu yang mereka tanam. Tanaman non kayu seperti durian, pete, mengkudu, nangka dan mangga sudah menghasilkan buah dan dapat dijual. Fakta dilapang petani sangat merasa senang dan terbantu dengan adanya ijin pengelolaan kawasan konservasi (kemitraan konservasi) dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga membeli kendaraan bermotor. Salah satu hasil penjualan tertinggi pada tanaman *Pueraria Javanica* (Pj) dengan harga Rp 120.000/Kg dan mengkudu yang dapat dipanen sepanjang musim kemarau. Peningkatan ekonomi petani (sebelum dan sesudah mengikuti kemitraan konservasi) memiliki hubungan secara signifikan dan memiliki korelasi kuat dalam keberlanjutan program kemitraan konservasi. Peningkatan ekonomi diperoleh dari penjualan tanaman non kayu yang ditanam sejak tahun 2015 mulai menghasilkan buah dan bernilai ekonomis.

Variabel peningkatan ekonomi petani (sebelum dan sesudah mengikuti kemitraan konservasi) memiliki arti hubungan secara signifikan dan memiliki korelasi kuat dalam efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan petani pada program kemitraan konservasi. Peningkatan ekonomi yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima oleh petani dari hasil tanaman non kayu. Petani yang dahulu bekerja sebagai buruh tani, pedagang kecil hingga bekerja sebagai TKI dengan pendapatan dibawah Rp 1 juta/bulan. Program pemulihan ekosistem menjadi alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembukaan awal program kemitraan konservasi melalui skema pemberdayaan masih kurang menarik minat masyarakat periode waktu tahun 2000 awal namun setelah berjalannya program yang hampir 27 tahun terjadi peningkatan kesejahteraan petani. Program pemulihan ekosistem yang dimulai sejak tahun 1998 perlahan mulai terlihat manfaatnya, tanaman non kayu yang ditanam mulai menghasilkan buah dan bernilai ekonomis.

Variabel peningkatan jumlah tanaman pokok memiliki hubungan signifikan dan memiliki korelasi kuat dalam efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan petani pada program kemitraan konservasi. Jumlah tanaman pokok yang telah tertanam pada lahan pengelolaan milik petani masih belum sesuai dengan peraturan yang disepakati. Fakta dilapang ditemukan bahwa petani memiliki alasan bahwa tanaman pokok tidak menguntungkan. Hal ini dapat diketahui dari setiap pertemuan rutin guna dilakukan pengecekan terhadap tanaman pokok yang cukup banyak yang belum tertanam oleh petani. Namun hal ini didukung oleh data terbaru pada tahun 2022 sebanyak 15% dan pada tahun 2023 saat ini sudah mulai terjadi peningkatan tanaman tutupan sebesar 35%. Keterlibatan anggota petani LMDHK saat ini belum sepenuhnya sadar akan pentingnya penanaman guna menghijaukan kawasan konservasi.

4. Kesimpulan

Program kemitraan konservasi yang berjalan memiliki kebermanfaatan bagi kelompok masyarakat desa hutan konservasi untuk dapat melestarikan, menjaga serta mengelola kawasan dengan bertanggung jawab. Kemitraan konservasi cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan peningkatan pendapatan petani sebesar 4-30 Juta rupiah/tahun hingga dapat membeli kendaraan bermotor, efektif dalam meningkatkan tutupan tanaman pokok sebesar 35% dan efektif meningkatkan kesadaran petani untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi. Hubungan antara

efektivitas program pemberdayaan masyarakat dengan program kemitraan konservasi memiliki hubungan yang cukup signifikan dan berkorelasi kuat serta kemudahan interaksi dengan penyuluh. Kebermanfaatan yang timbul dengan adanya program kemitraan konservasi turut memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Dampak yang ditimbulkan secara ekologi dapat menjaga ketersediaan air saat kemarau, berkurangnya banjir dan kemunculan satwa liar namun dari partisipasi petani dalam penanaman tanaman pokok masih cukup rendah. Dampak secara sosial anggota kelompok terjadi kemudahan interaksi pertemuan lebih antar petani dan penyuluh. Hal ini karena adanya pertemuan rutin yang difasilitasi oleh pihak Resort Wonoasri.

5. Saran

Saran kepada pihak Taman Nasional Meru Betiri dapat lebih memonitoring tutupan tanaman pokok dengan melibatkan partisipasi aktif ketua kelompok maupun ketua LMDHK Wonomulyo. Ketua kelompok dapat menjadi sahabat taman nasional dalam memantau tutupan tanaman pokok. Sehingga fasilitator/penyuluh cukup terbantu dalam monitoring dan evaluasi terkait tutupan tanaman pokok. Pendataan terkait pendapatan yang diperoleh petani melalui kolaborasi riset dengan akademisi sehingga mendapatkan jawaban yang transparan dan terbuka oleh petani dapat menjadi masukan terkait pengembangan kebijakan kemitraan konservasi kedepannya. Peneliti mengharapkan pemangku kebijakan untuk dapat melakukan riset akademik terkait motivasi petani disekitar kawasan hutan terhadap keberlanjutan program kemitraan konservasi.

Ucapan terima kasih, Sebagai wujud penghargaan terhadap bapak dosen pembimbing saya yang terlibat dalam penyusunan naskah atau dalam penelitian dan/atau pengembangan riset terkait efektivitas program kemitraan konservasi. Pihak dari Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember untuk bantuan serta kesediaan sebagai tempat riset sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Charistandi, F., Widjayanthi, L. 2021. Partisipasi Petani Terhadap Program Rehabilitasi Lahan Rehab Kawasan Meru Betiri Di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Jurnal Kirana*. 1(2):1-15.
- Damanik, S.E., Purba, T. 2022. Peran Penyuluh Kehutanan Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Kehutanan (Studi Kasus Desa Pondok Bulu Kabupaten Simalungun). *Jurnal Akar*. 2(1):1-14. 10.36985/jar.v9i1.188
- Elena, Y., Aviati, Y., Nikmatullah D. 2021. Hubungan antara pelaksanaan program hutankemasyarakatan dengan kinerja penyuluh kehutanan di Provinsi Lampung. *Jurnal Kirana*. 2(2):1-8. Doi: <https://doi.org/10.19184/jkrm.v2i2.25776>
- Fisher, M.R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E.L., Adriadi, A., Kamaluddin, Judda, J., Sahide M.A.K. 2018. Assereng The New Social Forestry Projrct In Indonesia: Recognition, Livelihood And Conservation. *International Forestry Review*. 20(3), 346-361. Doi: <https://doi.org/10.1505/146554818824063014>
- Gaol, C.I.L., Manalu, J., Rumahorbo, B.T. 2022. Strategi Pengembangan Program Konservasi berbasis pemberdayaan masyarkaak dengan model desa binaan dankemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop. *Jurnal Kehutanan Papua*. 8(2):1-17. Doi: <https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol8.Iss2.369>
- Guntoro, D.A., Purwantono., Kholiq, N., Ananda, A.A. 2018. Strategi Pengambangan Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu (HHBK) Durian di Zona Tradisional Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Banyuwangi. *JSEP*. 11(1):1-6. Doi: <https://doi.org/10.19184/jsep.v11i1.5679>
- Gunantoro E.S. 2017. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen dan Desa Karangudi di Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen). *Jurnal Litbang Sukowati*. 1(1):1-18. Doi: <https://doi.org/10.32630/sukowati.v1i1.6>
- Idris, F., Mukhrijal, Rasanjani, S. 2023. Efektivitas Program Rumah Layak Huni Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Sosio Konsepsia*. 12(2):1-14. Doi: <https://doi.org/10.33007/ska.v12i2>

Zulfidda Lillah, Djuara P Lubis, Dwi Sadono

Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Kemitraan Konservasi Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember

- Jazadi, I., Irham, M., Widari, I.G.A., Suparman., Adelismula, R.J. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pola Agroforestry. *Jurnal Pengabdian Makarya*. 2(1), 1-6. Doi: <https://doi.org/10.29303/jpm.v2i1>
- [KLHK]. 2018. *Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam*: Jakarta: Direktorat Jenderal Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
- [KLHK]. 2023. *Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi)*: Jakarta: Direktorat Jenderal Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
- Mariyani, I., Suciati, L.P. 2021. Modal Sosial Petani Rehabilitasi Dalam Pemulihan Ekosistem Taman Nasional Meru Betiri. *Agriekonomika*. 10(1).1-8. Doi: <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v10i1.9890>
- Mardikanto, T., Poerwoko, S. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mauludi, R.N.I.H., Aryani, L., Priyanti E. 2023. Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ddesa Melalui Bumdes (Studi di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor). *Journal Of Social Science Research (INNOVATIVE)*. 3(4). 1-10. Doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3660>
- Okthalamo, V., Iskandar, D.A., Masturiatna, A. 2022. Implementasi Progam Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*. 8(2):1-14 Doi: <https://doi.org/10.20886/jped.2022.8.2.111-124>
- Peran AP, Kaho LMR, Pramatana F, Mau AE. 2023. Community Behavior In Environmental Preservation Efforts (Case Study Of The Wail Awe Spring In The Kumah Protected Forest, East Adonara District, East Flores Regency). *Media Konservasi*. 28(2):1-7.
- Putri, V.A., Tresiana, N., Apandi. 2022. Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Perlindungan Satwa Di Taman Nasional Way Kambas. *Administrativa* .4(2):1- 16. Doi: <https://doi.org/10.23960/administrativa.v4i2.177>
- Prasetya, H.W, Sadono D, Hapsari D.R. 2023. Dinamika Kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi Taman Nasional Meru Betiri. *Jurnal Penyuluhan*. 19(02):1-16. Doi: <https://doi.org/10.25015/19202345323>
- Prayitno, D.E. 2020. Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 6(2):1-26. Doi: <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.175>
- Saragi H. 2023. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekowista di Taman Hutan Raya. *Jurnal Sosial dan Sains*. 3(1):1-6. Doi: <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i1.664>
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. PT. Alfabeta
- Suharto E. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Situmorang AO, Roslinda E, Hardiansyah G. 2022. Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Rantau Malam. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*. 1(1):1-14.
- Sitaesmi, D. T., R. A. Nugroho, D. L. Putri. 2023. Environmental damage and land use changes: forest protection strategy. The 4th International Conference on Agriculture and Bio-industry (ICAGRI-2022). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1183 (2023) 012074. Doi: 10.1088/1755-1315/1183/1/012074
- Yumantoko. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: Proses Penguatan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Sesaot, NTB. *Sosio Konsepcia*. 11(02)364–378. Doi: <https://doi.org/10.33007/ska.v11i2.3076>
- Yogia MA, Suri DM. 2020. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepcia*. 9(03):1-10. Doi: <https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.1874>
- Wiratno. 2018. Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia: Membangun “Organisasi Pembelajar”. Jakarta. Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Wahyuni H, Suranto. 2021. Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 6(1):1-15. Doi: <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.100>



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Konversi Bentuk Kapital untuk Pengentasan Kemiskinan Multidimensional pada Penerima Bantuan Sosial Kewirausahaan

Astriyana Telaumbanua¹  Robert M.Z.Lawang² 

¹ Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jawa Barat, Indonesia

² Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jawa Barat, Indonesia.

* Korespondensi: astridtel@gmail.com ; Tel: (+62) 81263233726

Diterima: 22 November 2024; Disetujui: 11 Desember 2024; Diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstrak: Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kapital (ekonomi, sosial, *embodied* dan digital) yang dimiliki oleh penerima bantuan sosial kewirausahaan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor melalui konversi untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan multidimensional. Dengan menggunakan metode fenomenologis, kami mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi dari tujuh penerima bantuan sosial kewirausahaan dari Kementerian Sosial RI, yang masih menjalankan usahanya dengan menggunakan *teknik purposive sampling* dari empat desa di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk-bentuk kapital dimanfaatkan oleh penerima bantuan untuk menjalankan dan mempertahankan kegiatan usaha melalui proses konversi dengan menggunakan kerangka teori praktik dari Pierre Bourdieu. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kapital ekonomi, sosial, digital dan *embodied* saling berinteraksi mendukung keberlanjutan usaha rumah tangga miskin. Kapital sosial memainkan peran penting dalam proses konversi kapital. Jaringan sosial dan kepercayaan membantu rumah tangga miskin mendapatkan sumber daya tambahan. Keterampilan *embodied* yang sudah dimiliki penerima bantuan mengoptimalkan bantuan sosial kewirausahaan yang mereka terima. Sementara kapital digital masih terbatas pemanfaatannya namun memperkuat kapital sosial yang sebelumnya telah terbangun. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam melaksanakan program bantuan sosial yang lebih terintegrasi agar lebih tepat guna mengentaskan kemiskinan multidimensional.

Kata kunci: konversi kapital, kewirausahaan, rumah tangga miskin, kemiskinan multidimensional, Kabupaten Bogor

Abstract: This research focuses on identifying the forms of capital (economic, social, embodied, and digital) owned by entrepreneurial social assistance recipients in Bojonggede, Bogor Regency, through conversion to accelerate the process of multidimensional poverty alleviation. We used the phenomenological method to get information from seven people who got business-related social assistance from the Ministry of Social Affairs and are still running their businesses. We purposefully selected these individuals from four villages in Bojonggede Sub-district, Bogor Regency. Using Pierre Bourdieu theoretical framework of practice, this research focuses on how beneficiaries use forms of capital to run and sustain business activities through the conversion process. The research findings reveal that economic, social, digital, and embodied capital interact to support the sustainability of poor household businesses. Social capital plays an essential important role in the capital conversion process. Social networks and trust help poor households obtain additional resources. The embodied skills already possessed by beneficiaries maximize the entrepreneurial social assistance they receive. Meanwhile, digital capital is limited in utilization, although it established social capital. We expect this research to contribute to implementing a more integrated social assistance program better suited to alleviating multidimensional poverty.

Keywords: capital conversion, entrepreneurship, poor household, multidimensional poverty, Bogor Regency

1. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi tantangan di Indonesia, sebagaimana hal tersebut juga terjadi bahkan di sebagian besar negara maju (OECD, 2015). Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Dalam konsep kemiskinan multidimensi, kemiskinan tidak hanya dilihat dari terbatasnya pendapatan (uang), tetapi berupaya memahami berbagai aspek lain yang mempengaruhi kualitas hidup. Kemiskinan multidimensional memiliki tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Alkire & Santos, 2014). Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menyebutkan Indonesia memiliki penduduk miskin sebanyak 25,22 juta jiwa pada Maret 2024, dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,03% pada tahun 2024 dari jumlah populasi penduduk 281.6 juta jiwa. Sementara penduduk Indonesia yang miskin secara multidimensi hampir 39 juta individu dalam rumah tangga atau 14,34% dari total populasi di tahun 2021 (Perkumpulan Prakarsa, 2023).

Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai program bantuan sosial yang menasar kelompok rentan, miskin dan terpinggirkan untuk mengatasi kemiskinan. Namun, bantuan sosial yang diterima oleh penerima manfaat sering kali dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Ailiyah et al., 2023). Menurut Tantriana & Rakhmawan (2024), program bantuan sosial dapat berdampak positif pada pengentasan kemiskinan namun juga memiliki dampak negatif karena dapat menimbulkan ketergantungan selama menjadi penerima bantuan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ketergantungan, Kementerian Sosial RI memberikan dukungan bantuan sosial berbasis kewirausahaan agar mereka dapat hidup mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sentra Galih Pakuan di Bogor merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Sosial RI, telah memberikan dukungan bantuan sosial kewirausahaan kepada 202 rumah tangga miskin di Jawa Barat, Banten dan sebagian Sumatera Selatan, dari tahun 2021 hingga 2024 melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). 84 dari 202 penerima bantuan berasal dari Kabupaten Bogor Jawa Barat. Dukungan bantuan sosial kewirausahaan oleh Sentra Galih Pakuan di Bogor lebih banyak dilakukan di Kabupaten Bogor karena Kabupaten Bogor masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Kabupaten Bogor termasuk kabupaten yang memiliki populasi penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 456,67 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin 7.69 % dan penduduk miskin ekstrem sebanyak 1,17 %. Perkumpulan Prakarsa menyebutkan bahwa prosentase angka kemiskinan multidimensional di Provinsi Jawa Barat lebih tinggi sebesar 9.44% dibandingkan dengan angka kemiskinan moneter sebesar 8,19% pada tahun 2021 (Perkumpulan Prakarsa, 2023).

Hasil monitoring terhadap penerima bantuan sosial kewirausahaan di Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Sentra Galih Pakuan di Bogor menunjukkan bahwa masih sedikit penerima bantuan yang mampu mempertahankan keberlanjutan usahanya. Dari 84 penerima bantuan sosial kewirausahaan di Kabupaten Bogor, terdapat 11 penerima bantuan sosial yang masih menjalankan dan mempertahankan usahanya. Menurut salah satu staff di Sentra Galih Pakuan Bogor, salah satu hambatan yang ditemukan adalah bahwa tidak semua penerima bantuan wirausaha memiliki kemampuan dan minat wirausaha yang mumpuni. *"Tidak semua PM yg diberi bantuan wirausaha memiliki kemampuan wirausaha yg mumpuni...barang wirausaha dipakai untuk konsumsi pribadi sehingga modal tidak berputar"* (YL, 2 September 2024). Penerima bantuan juga seringkali dihadapkan pada masalah kesehatan, keterbatasan pendidikan, kondisi kedisabilitas, kebutuhan dasar yang tidak cukup terpenuhi, yang menunjukkan kompleksitas masalah yang dihadapi bersifat multidimensi. Disisi lain, bidang usaha yang dilakukan oleh penerima bantuan, umumnya berhadapan dengan bidang usaha yang sudah banyak dilakukan sehingga harus bersaing dengan mereka yang memiliki kapital ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan kewirausahaan dalam bentuk asset produktif (kapital ekonomi) yang diterima oleh rumah tangga miskin masih menjadi tantangan dalam pengelolaannya. Meskipun kapital ekonomi dapat langsung dikonversi menjadi uang, namun kewirausahaan tidak dapat bertahan jika tidak memiliki interaksi dengan kapital lainnya. Bourdieu

(1986) menyebutkan bahwa mengandalkan satu-satunya kapital ekonomi sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan jauh dari tujuan. Kapital ekonomi hanya akan dapat berhasil jika mereka dapat memanfaatkan bentuk kapital lainnya yang mereka miliki untuk mendukung usaha. Rumah tangga miskin perlu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal yang dimiliki agar dapat berhasil dalam kegiatan usaha (Morris & Tucker, 2021). Contohnya memiliki hubungan yang kuat dengan individu, kelompok atau organisasi untuk mendapatkan sumber daya dalam meningkatkan kinerja usaha (Bhagavatula et al., 2010). Dalam hal ini, konsep konversi kapital dari kerangka teori Bourdieu (1986) menjadi relevan dalam menyelidiki bagaimana konversi kapital dapat dimanfaatkan dalam mendukung kewirausahaan yang dilakukan oleh rumah tangga miskin.

Dalam konsep teori praktik Pierre Bourdieu, konsep kapital, habitus dan arena merupakan pilar utama untuk memahami bagaimana struktur sosial dan individu saling mempengaruhi. Teori praktik Bourdieu berkaitan erat dengan pemahaman bahwa tindakan individu merupakan hasil interaksi dari habitus, kapital ditambah dengan arena yang secara sederhana digambarkan dalam bentuk $\{(Habitus) (Capital)\} + Field = Practice$ (Asimaki & Koustourakis, 2014). Kapital merupakan sumber daya yang dapat memberikan keuntungan dalam ruang sosial. Habitus mengacu pada kebiasaan, perilaku yang tertanam kuat dan keterampilan yang diperoleh individu berdasarkan hasil pengalamannya dalam konteks sosial. Sementara *Field* merupakan arena atau bidang dimana individu-individu yang terlibat akan berusaha untuk mendominasi dan memanfaatkan kapital yang dimiliki.

Menurut Bourdieu (1986) kapital memiliki bentuk dasar yaitu kapital ekonomi, kapital sosial, kapital budaya dan simbolik. Kapital ekonomi secara sederhana diartikan sebagai sumber daya berupa uang atau asset berharga. Kapital ekonomi dalam konteks kewirausahaan berperan penting sebagai dasar dalam membiayai segala kegiatan usaha, memproduksi, atau pun mengembangkan usaha. Kekurangan kapital ekonomi dapat menghambat laju perkembangan suatu program (Adi, 2024). Kapital sosial adalah akumulasi sumber daya yang terdapat dalam kepemilikan jaringan yang tahan lama, yang saling mengenal dan diakui (Bourdieu, 1986). Kapital sosial yang tinggi dapat mendorong keberhasilan kewirausahaan (Nieto & González-Álvarez, 2016; Payne & Hayes, 2021). Menurut Payne & Hayes (2021) kapital sosial dapat menyediakan informasi, pengetahuan, modal keuangan dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan kewirausahaan. Jaringan yang luas dapat membantu wirausaha untuk memperoleh pendanaan, informasi dan peluang pasar (Omrane, 2014), meningkatkan kepercayaan diri dan pengambilan resiko yang berpengaruh positif terhadap perilaku kewirausahaan (Liang et al., 2024). Kapital sosial seperti kepercayaan berdampak positif ketika berinteraksi dengan kapital lainnya seperti kapital budaya (Zelekha & Dana, 2019), meningkatkan kolaborasi antar wirausaha untuk berbagi sumber daya dan informasi, yang berpeluang membuka kerjasama dan meningkatkan pendapatan dan jumlah produksi (Öztopcu, 2023). Kapital sosial membantu orang untuk mendapatkan pengetahuan termasuk literasi keuangan yang bermanfaat bagi wirausahawan di pedesaan (J. Zhao & Li, 2021). Bentuk kapital sosial dapat bertransformasi ke bentuk nilai yang lebih besar melalui dukungan mobilisasi sumber daya dan kebijakan (Lawang, 2019).

Kapital budaya dalam pandangan Bourdieu merujuk pada pengetahuan, pendidikan, keterampilan dan budaya lainnya yang dimiliki dan terinternalisasi dalam diri individu (Bourdieu, 1986). Kapital budaya dapat terjadi dalam bentuk diobjektivikasi (*embodied state*), diwujudkan (*objectified state*) atau tertanam dan dilembagakan (*institutionalized state*). Meskipun kapital digital tidak ada dalam konsep teori Bourdieu, namun peran teknologi digital dalam kewirausahaan tidak dapat dielakkan di tengah kemajuan teknologi. Sama seperti jenis kapital lainnya, kapital digital adalah salah satu jenis kapital yang juga dapat diakumulasi dan dikonversi menjadi kapital lainnya (Ragnedda, 2018; Ragnedda et al., 2020). Seseorang yang memiliki kapital digital yang tinggi akan lebih efektif dalam memanfaatkan jenis kapital lainnya, hal ini dikarenakan kapital digital dapat menjadi jembatan (*linking*) antara aktivitas *offline* dan *online* (Ragnedda & Rui, 2020). Kapital digital terdiri atas dua komponen utama, pertama adalah akses digital yang terdiri dari akses pada peralatan digital, konektivitas, waktu yang dihabiskan untuk online dan dukungan atau pelatihan, dan kedua adalah kompetensi digital yang terdiri dari informasi dan literasi, komunikasi dan kolaborasi, kreasi konten

Astriyana Telaumbanua & Robert M.Z. Lawang

Konversi Bentuk Kapital Untuk Pengentasan Kemiskinan Multidimensional Pada Penerima Bantuan Sosial Kewirausahaan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

digital, keamanan dan pemecahan masalah (Ragnedda, 2018). Namun, untuk membangun kapital digital, pengalaman digital dan latar belakang sosial individu saling mempengaruhi (Ragnedda et al., 2022), termasuk habitus keluarga dalam membangun kapital digital (Keen & France, 2022), serta faktor sosial dan ekonomi untuk mengakses dan menggunakan teknologi digital (Park et al., 2024).

Penelitian terdahulu telah mengeksplorasi bagaimana konversi kapital (sosial, ekonomi dan budaya) dalam konteks kewirausahaan (I. Hill, 2018; I. R. Hill, 2021; Junaidi, 2022; Pret et al., 2015; Wong & McGovern, 2022), namun masih jarang ditemukan pada konteks penerima bantuan dari rumah tangga miskin. Umumnya, kapital ekonomi menjadi faktor penting dalam tahap awal memulai kewirausahaan karena modal keuangan dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan bentuk kapital lainnya (Šmaguc & Vuković, 2023). Bukti empiris menunjukkan bahwa individu atau kelompok yang memiliki kapital ekonomi yang tinggi cenderung lebih baik dalam melakukan konversi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Xie & Xie, 2021). Tidak jarang wirausaha sering kali harus berani mengorbankan asset penting yang mereka miliki seperti pendapatan, tabungan atau laba untuk memulai dan mengembangkan suatu usaha (Madsen et al., 2008; Šmaguc & Vuković, 2023). Namun, Karatas-Ozkan et al., (2023) menyebutkan bahwa kapital ekonomi tidak selalu menjadi fokus utama tetapi dapat dipertimbangkan bersama dengan bentuk kapital lainnya dalam penelitian kewirausahaan.

Beberapa penelitian lain menyebutkan bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha agar dapat berhasil, mereka tidak mengandalkan satu-satunya jenis kapital namun melakukan konversi kapital menjadi bentuk kapital lainnya (Pret et al., 2015; Šmaguc & Vuković, 2023). Konversi kapital dalam konteks kewirausahaan merupakan hal yang sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan (Jonsson & Lindbergh, 2013). Hasil penelitian pada pengusaha kerajinan menunjukkan bahwa kapital ekonomi tidak menjadi faktor utama dalam menjalankan usaha (Pret et al., 2015). Disisi lain, adopsi teknologi merupakan hal yang sangat penting dalam proses konversi. Kapital digital memungkinkan seseorang untuk membangun kapital sosial melalui jaringan yang lebih luas melalui pemanfaatan platform digital termasuk dalam hal ini terhubung dengan konsumen (Silva et al., 2020; Smith et al., 2017; F. Zhao et al., 2022). Meskipun pemanfaatan kapital sosial secara daring dan luring ditemukan berbeda (F. Zhao et al., 2022), namun memiliki gabungan keduanya memungkinkan mendapatkan sumber daya lain melalui ranah daring dan luring (Silva et al., 2020). Disisi lain, keterbatasan kapital digital dapat menyebabkan ketidaksetaraan yang mempengaruhi kemampuan untuk mengakses lebih banyak peluang dan sumber daya dalam ekonomi digital (Addeo et al., 2023).

Konversi kapital dapat dipahami sebagai upaya untuk melakukan perubahan berbagai bentuk kapital yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Kapital dapat dikonversi dalam berbagai bentuk untuk mendapatkan keuntungan (Bourdieu, 1986). Menurut Bourdieu (1986) kapital ekonomi seperti uang atau aset produktif, kapital sosial seperti jaringan sosial relasi atau koneksi, kapital budaya seperti pengetahuan dan keterampilan, dapat mempercepat proses pengentasan kemiskinan melalui konversi. Terlebih jika hal tersebut ditambah dengan memanfaatkan kapital digital (akses teknologi dan keterampilan digital) yang dapat dikonversi ke bentuk kapital lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Namun, penelitian yang membahas bagaimana bentuk kapital tersebut saling berinteraksi dalam konteks pengentasan kemiskinan multidimensional pada rumah tangga miskin melalui kewirausahaan sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kapital yang sudah dimiliki oleh rumah tangga miskin melalui konversi untuk mengentaskan kemiskinan multidimensional melalui kewirausahaan di Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana kapital ekonomi tidak hanya berfungsi untuk mendapatkan uang atau asset, tetapi bagaimana bentuk kapital lainnya dapat saling berinteraksi membantu penerima bantuan sosial kewirausahaan yang tinggal di wilayah pedesaan. Penelitian ini menawarkan wawasan baru dalam program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat lebih tepat guna dalam membuat desain intervensi untuk membantu

rumah tangga miskin melalui kewirausahaan di wilayah pedesaan dalam mengentaskan kemiskinan multidimensional. Penelitian ini berupaya mengatasi kesenjangan penelitian dengan menyelidiki bagaimana penerima bantuan sosial kewirausahaan di pedesaan memanfaatkan bentuk kapital yang mereka miliki melalui konversi untuk mendukung kewirausahaan dalam mengentaskan kemiskinan multidimensional.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam berdasarkan pengalaman penerima bantuan sosial kewirausahaan dalam memanfaatkan kapital yang mereka miliki untuk mengatasi kemiskinan multidimensional melalui kewirausahaan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari informan dan perilaku yang diamati (Taylor et al., 2016). Metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologis untuk mendapatkan pemahaman mendalam berdasarkan pengalaman subjektif informan dari kerangka acuan mereka sendiri berdasarkan realitas pengalaman yang mereka alami (Taylor et al., 2016). Penelitian ini mempertimbangkan konteks sosial di pedesaan dimana melalui wawancara dan observasi memberikan pemahaman bagaimana pengalaman setiap rumah tangga miskin dalam menjalankan usaha dengan kapital yang ada melalui konversi untuk mengentaskan kemiskinan multidimensional.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor yang dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat namun memiliki ketimpangan yang cukup besar. Selain itu, konversi kapital pada penerima bantuan sosial kewirausahaan belum banyak dibahas terutama pada konteks lokal. Untuk menentukan informan, terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data penerima bantuan sosial kewirausahaan dari Sentra Galih Pakuan di Bogor, Kementerian Sosial. Selanjutnya peneliti memeriksa data penerima bantuan yang masih menjalankan kegiatan usaha untuk menentukan informan penelitian. Data hasil monitoring kegiatan usaha digunakan untuk membantu mengidentifikasi rumah tangga miskin yang masih menjalankan kegiatan usaha. Penelitian ini mengumpulkan data dari tujuh penerima bantuan sosial kewirausahaan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria masih menjalankan usahanya dalam satu tahun terakhir. Penelitian ini juga memeriksa pemanfaatan teknologi digital untuk menyelidiki kemungkinan konversi kapital digital dalam kewirausahaan pada rumah tangga miskin, terutama dalam hal penggunaan HP (*handphone*) sebagai perangkat utama untuk mengakses internet. Pengumpulan data dilakukan dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2024.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggali informasi dari peserta dengan cara menceritakan pengalaman mereka untuk mendapatkan bantuan, memilih jenis usaha, memanfaatkan dan melakukan konversi kapital dalam mendukung kegiatan usaha, dan faktor pendukung dan penghambat konversi kapital. Hasil wawancara direkam dan di transkrip menjadi data mentah dan selanjutnya memeriksa kata-kata dan kalimat dengan melakukan koding hingga analisis data. Analisis data dimulai dengan menerapkan konsep konversi kapital dari kerangka teori praktik Bourdieu kemudian melakukan pengkodean ulang berdasarkan data lapangan dan dilanjutkan dengan memeriksa keterkaitan untuk menemukan tema hasil temuan.

3. Hasil

Bagian ini menjawab tujuan penelitian terkait bagaimana penerima bantuan sosial kewirausahaan memanfaatkan bentuk kapital yang mereka miliki melalui konversi untuk mendukung kewirausahaan dalam mengentaskan kemiskinan multidimensional, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses konversi.

3.1 Gambaran Jenis Usaha Rumah Tangga Miskin

Pemilihan jenis usaha oleh penerima bantuan sosial kewirausahaan ditemukan berdasarkan pada pertimbangan praktis dan keterampilan yang dimiliki (*embodied*). Jenis usaha yang dilakukan diantaranya usaha menjahit (konveksi), tukang pijat, perbengkelan, usaha dagang eceran keliling, warung kelontong serta warung minuman atau snack. Sebagian penerima bantuan memilih jenis usaha yang relevan dengan keterampilan yang sudah dimiliki, pertimbangan kemudahan dan mobilitas, lokasi dan lingkungan sosial serta pertimbangan faktor kedisabilitas yang dimiliki atau terdapat anggota rumah tangga yang memiliki kedisabilitas. Berikut adalah jenis usaha rumah tangga miskin, penerima bantuan sosial kewirausahaan di Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Tabel 1 Jenis usaha rumah tangga miskin di pedesaan

Jenis usaha	Jumlah penerima bantuan	Tahun Bantuan	Jenis jasa/produk yang dijual	Latar belakang pemilihan jenis usaha
Konveksi (Menjahit)	1	2022	Permak baju	Memiliki pengalaman menjahit
Tukang pijat dan jamu	1	2023	Jasa pijat dan jual jamu	Pernah belajar pijat dari jaringan pribadi (keluarga)
Tukang pijat dan jual kerupuk	1	2022	Jasa pijat dan jual kerupuk	Pernah belajar pijat dari jaringan komunitas
Perbengkelan	1	2022	Jasa perbaikan motor	Memiliki pengalaman perbengkelan
Warung Campuran (kelontong)	1	2023	Sembako	Kemudahan mobilitas
Warung minuman dan snack (kuliner)	1	2023	Minuman dan snack (stick pisang)	Memiliki pengalaman memasak
Usaha dagang eceran keliling (campuran)	1	2022	Kebutuhan sandang (sprei, baju, sepatu, dll)	Kemudahan mobilitas

Sumber: Olahan data penelitian, 2024.

Tabel diatas menunjukkan jenis usaha yang dilakukan beragam dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sesuai dengan kondisi penerima bantuan. Misalnya memilih jenis usaha yang memiliki fleksibilitas waktu karena harus mengurus rumah tangga sebagaimana dikemukakan oleh informan NL “karena bisa sambil mengurus anak. Anak saya kan disabilitas (*cerebral palsy*), dan waktunya lebih fleksibel (NL, 15 Agustus 2024). Demikian pula informan AH “karena saya memiliki kedisabilitas fisik, dan keterampilan mesin jahit lebih mudah untuk dilakukan dari pada jenis pekerjaan lain” (AH, 22 Agustus 2024). Hal ini menunjukkan bahwa faktor kedisabilitas dapat mempengaruhi pemilihan jenis usaha pada penerima bantuan sosial kewirausahaan di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ada juga yang memilih jenis usaha yang tidak menimbulkan konflik dengan orang lain terutama saudara. “Kalau saya dagang sembako, saudara suami kan dagang sembako. Kan gak enak kalau kita jual sembako. Jadi saya milih yang sosis bakar ini sampai sekarang tuh. Saya lihat disini kan anak-anaknya rame, jadi milih usaha untuk jajan anak-anak” (SM, 15 Agustus 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pemilihan jenis usaha mempertimbangkan hubungan sosial yang mencerminkan norma dan nilai-nilai ikatan sosial yang sudah terbangun. Hanya sedikit penerima bantuan yang memilih jenis usaha berdasarkan

pengalaman dalam bidang usaha yang dipilih seperti usaha perbengkelan dan warung kelontong. “Karena awalnya main motor. Motivasinya karena memang minatnya disitu.” (AL, 27 September 2024). Pertimbangan lain adalah faktor kemudahan dalam menjalankan usaha yang tidak menimbulkan banyak resiko, termasuk memilih produk yang dijual berdasarkan pengalaman sebelumnya dan menyesuaikan dengan produk yang lebih laku terjual dan memberi keuntungan.

Pendapatan rata-rata yang diperoleh dari usaha tersebut bervariasi dari rentang Rp.1.000.000, - Rp. 3.000.000, - yang masih dibawah upah minimum Kabupaten Bogor sebesar Rp. 4.579.541, -. Keuntungan dari hasil usaha utamanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya pendidikan anggota keluarga. Meskipun dukungan bantuan sosial kewirausahaan belum sepenuhnya mengeluarkan penerima bantuan dari kondisi kemiskinan, namun kewirausahaan berkontribusi menjadi sumber pendapatan dan membantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Konversi kapital yang dimiliki penerima bantuan sosial kewirausahaan untuk pengentasan kemiskinan multidimensional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kapital yang dimiliki oleh penerima bantuan sosial kewirausahaan saling berinteraksi melalui kewirausahaan untuk pengentasan kemiskinan multidimensional.

3.2 Konversi kapital ekonomi ke bentuk kapital lainnya

Hasil penelitian konversi kapital ekonomi ke bentuk kapital lainnya ditemukan terjadi melalui partisipasi dalam kelompok arisan dan investasi dalam kegiatan sosial keagamaan untuk membangun kapital sosial.

Investasi dalam bentuk Arisan

Arisan sering dianggap sebagai tabungan oleh masyarakat di pedesaan meskipun arisan pada dasarnya tidak termasuk kategori tabungan. Kegiatan arisan dapat menjadi wadah berinteraksi dengan sesama anggota untuk memperkuat hubungan sosial dalam komunitas. Arisan mempersyaratkan setiap anggota mengeluarkan sejumlah uang yang telah disepakati bersama untuk dikumpulkan dan dikembalikan dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam kelompok. Arisan merupakan bentuk tradisional konversi kapital ekonomi ke kapital sosial yang lazim banyak ditemukan di pedesaan maupun perkotaan di wilayah Indonesia. Diantara tujuh partisipan penerima bantuan sosial kewirausahaan dalam penelitian ini, terdapat tiga orang penerima bantuan yang terlibat dalam keanggotaan arisan.

“Setiap minggu mengeluarkan uang untuk arisan sebesar 100 ribu di pengajian ibu-ibu. Tapi ikut arisan hanya untuk kebersamaan saja dan kalau sewaktu-waktu butuh uang untuk berobat bisa narik arisan, dan buat kebutuhan macam-macam juga.” (MSD, 17 agustus 2024).

Arisan memungkinkan terjadi interaksi rutin misalnya setiap minggu dengan anggota arisan lainnya. Partisipasi dalam arisan tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, namun untuk membangun ikatan sosial dengan anggota lain. Arisan dapat berfungsi sebagai wadah untuk bersosialisasi untuk membangun dan memperkuat kapital sosial, serta strategi finansial saat menghadapi kebutuhan tidak terduga. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi proses konversi kapital ekonomi ke kapital sosial melalui keterlibatan dalam kegiatan arisan. Investasi dalam kegiatan arisan tidak hanya melibatkan konversi kapital ekonomi ke kapital sosial namun juga sebaliknya dapat dimanfaatkan kembali untuk dikonversi ke kapital ekonomi.

“Saya ikut arisan 200 sampai 300 ribu per bulan, ada 3 tempat. Biasanya arisan di sekolah anak, arisan keluarga, arisan teman SMK. Karena saya bisa sekalian dagang disitu. Jadi saya bisa bawa barang, bisa sambil nawar-nawarin gitu. Kan disitu banyak temen kita kan, jadi kita bisa sambil sosialisasi kaya gitu buat dagang. Jadi tujuannya ikut arisan biar bisa dagang, bisa berteman juga”. (NL, 15 Agustus 2024).

Keterlibatan dalam arisan tidak hanya memperkuat kapital sosial namun dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan produk yang dijual kepada peserta arisan yang lain untuk mendapatkan konsumen. Bagi sebagian penerima bantuan, arisan sebagai wadah interaksi sosial namun dapat berfungsi untuk mendukung kegiatan usaha. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan jaringan yang dimiliki dapat meningkatkan peluang kegiatan kewirausahaan sekaligus menegaskan bahwa kapital ekonomi dapat dikonversi ke kapital sosial dan sebaliknya dapat dikonversi kembali menjadi bentuk kapital ekonomi.

Kontribusi ekonomi dalam kegiatan sosial keagamaan

Konversi kapital ekonomi ke kapital sosial juga terjadi dalam bentuk kontribusi ekonomi untuk kegiatan keagamaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran keagamaan untuk berbuat baik dan membantu orang lain diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosial keagamaan. Hal ini mendorong kebersamaan, identitas bersama dan solidaritas diantara anggotanya dalam struktur sosial. Kontribusi ekonomi dalam kegiatan keagamaan dianggap sebagai bentuk solidaritas untuk memperkuat ikatan dan mendukung kegiatan sosial keagamaan. “*Pengajian malam jumat biasanya 10 ribuan per minggu untuk infaq, seikhlasnya*” (MSD, 17 agustus 2024). Partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan juga dapat mengarah pada akumulasi pengetahuan dan keterampilan tentang nilai dan ajaran dalam agama yang dapat mengatur dan mempengaruhi interaksi sosial kehidupan masyarakat. Dalam hal ini terjadi konversi kapital ekonomi ke kapital sosial dan kapital budaya.

Investasi dalam bentuk objectified (kapital budaya)

Konversi kapital ekonomi ke kapital budaya dalam bentuk *objectified* juga terjadi dalam bentuk penyediaan alat/mesin untuk mendukung kegiatan keterampilan. Kapital ekonomi dalam bentuk objek berupa peralatan/mesin memungkinkan penerima bantuan sosial kewirausahaan mempelajari keterampilan baru seperti mengecat motor. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan alat dapat meningkatkan pengetahuan teknis individu dimana keterampilan tersebut nantinya memiliki nilai yang dapat diakumulasi ke kapital ekonomi untuk mendapatkan pendapatan. “*Karena saya kan minta alat kompresor juga, trus saya belajar nge cat motor. Jadi sekarang bisa nge cat body motor. Minimal ada sebulan sekali orang datang nge cat body motor gitu. Ibaratnya bonusnya lah disitu*” (AL, 27 September 2024). Kapital budaya yang diperoleh melalui pemanfaatan alat-alat atau mesin yang dimiliki untuk mendukung keterampilan dapat dikonversikan kembali ke kapital ekonomi untuk mendapatkan pendapatan dan mendukung keberlanjutan usaha.

Tabel 2 Ringkasan Konversi Kapital Ekonomi

Kapital Ekonomi	Kapital yang dikonversi	Keterangan
Investasi dalam bentuk Arisan	Kapital Sosial	Partisipasi dalam Arisan dapat memperluas jaringan sosial, membangun kepercayaan, dan memperkuat ikatan/hubungan. Bagi sebagian penerima bantuan, arisan menjadi wadah untuk promosi dan mendapatkan konsumen.
Kontribusi ekonomi dalam kegiatan sosial keagamaan	Kapital Sosial	Investasi dalam kegiatan keagamaan membuka peluang untuk memperluas jaringan sosial, namun dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pelanggan melalui anggota pengajian.
Investasi pada peralatan usaha (<i>objectified</i>) untuk	Kapital budaya	Bantuan kewirausahaan dalam bentuk alat usaha mendorong individu untuk mempelajari keterampilan

mendukung
keterampilan

baru seperti keterampilan teknis atau manual untuk
memaksimalkan penggunaan alat usaha

Sumber : Olahan penelitian, 2024

3.3 Konversi kapital sosial ke bentuk kapital lainnya

Konversi kapital sosial ke kapital ekonomi dapat terjadi karena pemanfaatan jaringan sosial, koneksi atau relasi, kepercayaan dan norma yang dapat memberikan keuntungan.

Pemanfaatan jaringan sosial

Pemanfaatan jaringan sosial pribadi, komunitas atau relasi dapat membantu rumah tangga miskin mendapatkan keuntungan ekonomi yang dapat mendukung kewirausahaan dan mendapatkan berbagai sumber daya lainnya yang sebelumnya tidak terjangkau seperti terhubung dengan bantuan dari pihak eksternal, akses dana bergulir, pemasaran produk usaha, memfasilitasi tempat berjualan, mempertemukan dengan calon pelanggan, dan mendorong penggunaan teknologi digital (*handhpone*).

Terhubung dengan bantuan eskternal

Hasil temuan pada penerima bantuan sosial kewirausahaan menunjukkan kapital sosial memfasilitasi rumah tangga miskin untuk mendapatkan akses bantuan dari pihak eksternal melalui jaringan sosial dan koneksi. Interaksi sosial dan koneksi membantu penerima bantuan sosial kewirausahaan mendapatkan akses pada jaringan sosial vertikal yang sebelumnya tidak dapat terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa konversi kapital sosial ke kapital ekonomi terjadi dalam proses mendapatkan bantuan usaha termasuk keanggotaan dalam suatu komunitas. "*Melalui komunitas disabilitas, PPDI mengajukan bantuan untuk disabilitas ke Sentra Galih Pakuan di Bogor*" (AH, 22 Agustus 2024). Keanggotaan dalam jaringan sosial dapat menjembatani anggotanya untuk mendapatkan akses bantuan ke berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kapital sosial dapat bertransformasi menjadi kapital ekonomi melalui keanggotaan dalam suatu komunitas yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mendapatkan akses bantuan usaha ke jaringan yang lebih luas.

Mendapatkan akses dana pinjaman bergulir

Pada komunitas tertentu, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas atau kelompok dapat memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan bantuan dana bergulir. "*Pernah dipinjem modal bergulir sebesar 2 juta dalam 6 bulan.....Dana yang dipinjam diganti, trus dikasih ke orang lain lagi supaya semua anggota merasakan pinjaman dana itu*" (NL, 15 Agustus 2024). Hal ini menciptakan kerjasama dan ikatan yang kuat di antara anggota komunitas karena keanggotaan dalam komunitas memberikan keuntungan bagi mereka yang tergabung didalamnya. Bantuan dana bergulir yang diberikan oleh komunitas kepada anggota untuk dipinjam dan dikembalikan lagi tanpa ada bunga menggambarkan konversi kapital sosial ke kapital ekonomi melalui keanggotaan dalam jaringan sosial.

Pemasaran produk usaha

Pemasaran produk melalui jaringan sosial yang dimiliki dapat menjadi langkah bagi penerima bantuan sosial kewirausahaan untuk menjalankan usahanya. Pemasaran produk dapat dilakukan dengan cara memberitahu saudara, tetangga dan lingkungan sekitar untuk mendapatkan dukungan dan mempertemukan dengan calon pelanggan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh informan SM "*Pas mulai usaha, kita kasih tahu saudara-saudara disini kalau mau jualan.... Trus kita kasih tahu tetangga-tetangga*" (SM, 15 Agustus 2024). Hal ini menunjukkan konversi kapital sosial ke kapital ekonomi terjadi melalui pemanfaatan jaringan sosial dalam bentuk pemasaran produk. Hal yang sama juga dilakukan oleh informan "*Biasanya saya ngider. Ngider itu jalan tapi tidak jauh-jauh. Misalnya nih rumah teman saya dimana, saya datengin gitu. Trus kasih bonus, misalnya dari 10 barang kita kasih 11, atau kita kasih harga murah supaya teman bisa ambil keuntungan dari penjualan itu*"(NL, 15 Agustus 2024). Hal yang sama juga

Astriyana Telaumbanua & Robert M.Z.Lawang

Konversi Bentuk Kapital Untuk Pengentasan Kemiskinan Multidimensional Pada Penerima Bantuan Sosial Kewirausahaan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

dikemukakan oleh informan SM yang memanfaatkan kegiatan pengajian untuk mempromosikan usaha *“Jadi biasanya setiap ada pengajian gitu, anggota pengajian pada jajan gitu”*. (SM, 15 Agustus 2024).

Memfasilitasi tempat berjualan

Pada komunitas tertentu, penerima bantuan sosial kewirausahaan mendapatkan peluang untuk berdagang melalui pertemuan rutin komunitas. Hal ini dapat membantu penerima bantuan untuk mendapatkan pelanggan dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. *“biasanya kalau ada acara, kita dipanggil dan kita diberi kesempatan untuk membuka tenda untuk bertiga atau berempat.... kadang ada teman juga yang mau bawa dagangan saya untuk dijual lagi ke orang lain.”* (NL, 15 Agustus 2024). Pemanfaatan pertemuan komunitas untuk melakukan penjualan produk menunjukkan konversi kapital sosial ke kapital ekonomi, yang dapat meningkatkan penjualan produk usaha dan meningkatkan pendapatan.

Mempertemukan dengan calon pelanggan

Jaringan sosial pribadi seperti relasi dan koneksi dapat mempertemukan penerima bantuan sosial kewirausahaan dengan calon pelanggan. Hal ini dikemukakan oleh informan AL dimana lokasi bengkel yang dimilikinya tidak terletak di lokasi yang strategis karena usaha tersebut dilakukan di rumah. Namun, koneksi dengan teman memberi keuntungan karena relasi yang dimiliki memfasilitasi informan untuk mendapatkan pelanggan dan promosi dari mulut ke mulut. *“Dengan cara dibawa konsumen ke saya, itu udah mendukung segitu kalau menurut saya. Ibaratnya teman saya itu ya kehidupan saya juga gitu...”* (AL, 27 September 2024).

Menyesuaikan produk usaha sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen

Produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen terutama di wilayah pedesaan dapat beresiko pada kegagalan usaha. Hasil penelitian menunjukkan keputusan untuk melakukan konversi kapital didasarkan pada pengalaman penerima bantuan untuk menyesuaikan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen berdasarkan hasil pengamatan dan interaksi sosial. *“Kalau yang frozen bakar kan, awalnya bahannya diberikan dari Sentra Galih Pakuan. Tapi kalau frozen-frozen gitu kurang laku kalau disini, gak maju. Akhirnya saya putar yang ini aja deh gitu, saya buat jenis jajanan yang anak-anak suka.”* (SM, 15 Agustus 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kapital ekonomi merupakan jenis kapital yang paling mudah dikonversi menjadi uang namun kapital sosial memainkan dimana hasil interaksi sosial dan pengamatan mendorong informan SM untuk menyesuaikan produk usaha sesuai dengan kebutuhan konsumen untuk menjaga keberlanjutan usaha.

Pengembangan keterampilan melalui jaringan sosial

Dalam penelitian ini, pendidikan informan paling rendah SD dan paling tinggi SMA. Hubungan sosial melalui jaringan pribadi memberikan kesempatan pada penerima bantuan untuk mendapatkan sumber daya tambahan dengan ikut serta dalam kegiatan pengembangan keterampilan yang nantinya berkontribusi membangun kapital ekonomi. Selain itu, penerima bantuan juga memanfaatkan hubungan jaringan pertemanan (kapital sosial) untuk mengakses keterampilan yang diperlukan. *“Pertama awalnya ngikut teman dulu, teman di bengkel sekitar sini. Saya ngikut temen di bengkel sekitar enam bulan kalau nggak salah. Istilahnya saya curi-curi ilmu dari dia”* (AL, 27 September 2024). Hal ini menunjukkan bahwa memanfaatkan hubungan pertemanan, individu dapat mencari pengalaman kerja melalui pelatihan informal untuk mengembangkan keterampilan.

Mendorong penggunaan teknologi digital

Kapital sosial dapat berperan dalam mendorong penerima bantuan sosial kewirausahaan untuk mengadopsi teknologi digital. Hal ini terjadi pada informan MNP yang sudah setahun terakhir menggunakan handphone yang memiliki aplikasi WhatsApp. *“kan maunya hp yang biasa gitu. Tapi*

orang-orang bilang, pakai HP yang ada WA gitu. Jadi beli... tetangga semua yang bantu diajarkan caranya" (MNP, 13 Agustus 2024). Adopsi teknologi digital dapat memperkuat kapital sosial penerima bantuan sosial kewirausahaan ke ranah dalam jaringan (daring). Hal ini menunjukkan bahwa kapital sosial dikonversi ke kapital digital melalui adopsi teknologi digital yang memungkinkan penerima bantuan terhubung dengan jaringan sosial yang lebih luas dan mempertahankan kapital sosial sudah dimiliki melalui daring.

Kepercayaan

Kepercayaan tidak dapat terjadi instan tetapi melalui proses interaksi sosial untuk memperkuat ikatan antara individu atau kelompok. Dalam konteks kewirausahaan, kepercayaan pelanggan memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan usaha. "Orang yang sudah biasa jahit sama saya biasanya sudah tahu kualitas jahitan dan kepercayaan mereka sama saya, jadi pasti mereka jarang pindah ke lain hati" (AH, 22 Agustus 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan melalui kualitas produk atau jasa yang diberikan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan yang pada akhirnya kepercayaan tersebut memberikan keuntungan ekonomi untuk menjaga keberlanjutan usaha. Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan "Dari mulut ke mulut dan karena kepuasan orang. Kalau orang puas dengan hasil kerja kan, akan datang lagi" (AL, 27 September 2024).

Berikut ringkasan konversi kapital sosial ke berbagai bentuk kapital lainnya dalam mendukung kewirausahaan pada penerima bantuan sosial kewirausahaan:

Tabel 3. Ringkasan konversi kapital sosial ke bentuk kapital lainnya

Kapital Sosial	Kapital yang dikonversi	Keterangan
Peran jaringan sosial dalam menghubungkan akses dengan bantuan dari pihak eksternal	Kapital ekonomi	Akses bantuan dari pihak eksternal melalui jaringan sosial membantu rumah tangga miskin mendapatkan sumber daya ekonomi untuk kegiatan usaha.
	Kapital sosial	Pemanfaatan koneksi sosial menunjukkan adanya perluasan jaringan yang dapat memberikan peluang sumber daya lain dan mendapatkan dukungan sosial.
Peran komunitas untuk mendapatkan akses dana pinjaman bergulir	Kapital ekonomi	Jaringan sosial yang dimiliki melalui keanggotaan dalam kelompok tertentu dapat membuka akses pada dana pinjaman untuk digunakan dalam kegiatan usaha.
Pemanfaatan jaringan sosial untuk mendukung kegiatan usaha	Kapital ekonomi	Pemanfaatan jaringan sosial untuk mendukung kegiatan usaha melalui fasilitasi tempat berjualan, mempertemukan dengan calon pelanggan dan menyesuaikan produk usaha sesuai kebutuhan dan preferensi konsumen.
Mendorong adopsi penggunaan teknologi digital (<i>handphone</i>)	Kapital digital	Jaringan sosial pribadi dapat mendorong penerima bantuan sosial kewirausahaan untuk mengadopsi teknologi digital untuk memperkuat kapital sosial dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kapital digital rumah tangga miskin dalam menggunakan aplikasi melalui teknologi digital.
Pengembangan keterampilan melalui jaringan sosial	Kapital budaya	Kesediaan saling membantu karena adanya perasaan senasib dan ikatan yang kuat antara anggota yang tergabung didalam kelompok untuk mengembangkan keterampilan teknis yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Misalnya berbagi pengetahuan cara memijat dan perbengkelan

Astriyana Telaumbanua & Robert M.Z.Lawang

Konversi Bentuk Kapital Untuk Pengentasan Kemiskinan Multidimensional Pada Penerima Bantuan Sosial Kewirausahaan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

Kepercayaan	Kapital ekonomi	Memastikan kualitas layanan jasa/produk yang ditawarkan untuk menjaga kepercayaan konsumen yang berkontribusi pada keberlanjutan usaha.
-------------	-----------------	---

Sumber : olahan penelitian, 2024

3.4 Konversi Kapital Digital ke Bentuk Kapital Lainnya

Berdasarkan riwayat akses dan penggunaan peralatan teknologi digital (*the first level of digital divide and second level of digital divide*) hasil temuan menunjukkan masih terdapat penerima bantuan sosial kewirausahaan yang tidak memiliki akses pada teknologi digital, dua partisipan kurang dari setahun telah mengakses teknologi digital sedangkan penerima bantuan lainnya lebih dari lima tahun sudah mengakses teknologi digital melalui *handhpone*. Motivasi utama menggunakan teknologi digital ditemukan karena adanya dorongan dari jaringan sosial melalui relasi dan interaksi dengan pelanggan agar lebih mudah dalam berkomunikasi dan melakukan pemesanan layanan barang atau jasa. Namun, sebagian besar penerima bantuan masih kesulitan dalam menggunakan berbagai aplikasi digital yang menunjukkan bahwa penerima bantuan sosial kewirausahaan memiliki kapital digital yang rendah.

Konversi kapital digital ke kapital ekonomi terjadi melalui promosi usaha menggunakan platform digital seperti WA group dan status WA, *google maps* untuk menunjukkan lokasi usaha dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Tindakan ini memberikan kemudahan pencarian informasi usaha yang nantinya berpotensi mendapatkan pelanggan baru. Konversi kapital digital ke kapital budaya terjadi melalui pemanfaatan aplikasi platform digital untuk mempelajari keterampilan baru meskipun sedikit penerima bantuan sosial kewirausahaan yang melakukannya, sebagaimana dikemukakan oleh informan AL “*Tapi sekarang kalau ada kesulitan banyakan saya cari solusinya di youtube. Saya nyari ilmu sekarang di youtube. Saya baca juga artikelnya, kadang-kadang nyari di Google*” (AL, 27 September 2024).

Berikut adalah ringkasan konversi kapital digital ke kapital budaya yang ditemukan pada penerima bantuan sosial kewirausahaan di pedesaan.

Tabel 4 Ringkasan konversi kapital digital ke bentuk kapital lainnya

Kapital Digital	Kapital yang dikonversi	Keterangan
Penggunaan teknologi digital (<i>the second level digital divide</i>)	Kapital sosial	Penggunaan teknologi digital menjadi jembatan antara kapital sosial “ <i>luring</i> ” dengan kapital sosial “ <i>daring</i> ”
	Kapital Ekonomi	Promosi usaha melalui platform digital seperti penggunaan aplikasi whatsapp untuk mendukung kegiatan usaha.
	Kapital budaya	Mencari informasi untuk menyelesaikan masalah (<i>problem solving</i>) melalui platform digital (<i>youtube</i>) untuk meningkatkan pengetahuan yang mendukung usaha.
Pemanfaatan media sosial (Wa group atau status wa)	Kapital sosial dan kapital ekonomi	Pemanfaatan media sosial dapat memperkuat kapital sosial, peluang melakukan pemasaran dan menjangkau pelanggan.

Sumber : olahan penelitian, 2024

3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Kapital

Faktor Pendukung

Kapital sosial memainkan peran penting dalam proses konversi kapital melalui relasi sosial yang kuat. Relasi sosial yang kuat dengan komunitas dan jaringan sosial pribadi melalui keluarga dan teman

memainkan peran penting dalam mendukung konversi kapital, sehingga menciptakan banyak peluang dan dukungan pada penerima bantuan sosial kewirausahaan. Relasi sosial yang kuat terjadi karena adanya proses hubungan interaksi yang lama, saling mendukung, memiliki perasaan senasib dan solidaritas, serta kesediaan untuk membantu orang lain dalam jaringan yang dimiliki. Selain itu, jaminan atas kualitas layanan jasa yang diberikan termasuk menerima komplain menguatkan relasi penerima bantuan dengan konsumen. Hal ini menimbulkan kepercayaan dan loyalitas konsumen yang dapat berkontribusi pada keberlangsungan usaha.

Faktor Penghambat

Pada aspek konversi kapital ekonomi, faktor penghambat terjadi karena penerima bantuan takut mengambil resiko, misalnya menolak kredit usaha yang ditawarkan oleh lembaga keuangan karena takut tidak dapat mengembalikan pinjaman. Hal ini menunjukkan sikap yang bertolak belakang dengan seorang wirausaha yang berani mengambil risiko untuk mengembangkan usahanya. Faktor penghambat lainnya adalah infrastruktur dan peralatan yang dimiliki oleh penerima bantuan masih terbatas, serta

Pada aspek konversi kapital digital ke berbagai bentuk kapital lainnya, faktor penghambat adalah sebagian besar penerima bantuan sosial kewirausahaan masih memiliki kapital digital yang rendah termasuk dalam hal akses pada perangkat digital dan konektivitas. Disisi lain masih terdapat penerima bantuan yang tidak menggunakan teknologi digital sama sekali yang menunjukkan kesenjangan digital pada level pertama (*the first level digital divide*). Pada aspek konversi kapital sosial, faktor penghambat berasal dari internal individu seperti kurangnya memiliki motivasi untuk membangun jaringan sosial yang lebih luas meskipun jaringan seperti relasi telah menyediakan kesempatan untuk membangun kapital sosial yang lebih luas. Faktor lainnya adalah persepsi diri yang negatif terhadap stigma sosial sebagai orang miskin dan memiliki kekurangan termasuk isu disabilitas. "*Teman share di WA. Dia kan punya perkumpulan. Terus dia dapat info dari situ, terus dia kasih tahu aku, ngajak aku, nawarin, mau ikut ini enggak, tapi aku bilang males.*" (MNP, 13 Agustus 2024). Dalam hal ini, konversi kapital tidak terjadi jika individu atau kelompok tidak memanfaatkan jaringan yang dimiliki untuk mengembangkan kapital sosialnya.

Faktor penghambat konversi kapital yang berkaitan dengan masalah struktural dalam penelitian ini adalah kurangnya pendampingan kepada penerima bantuan dalam mengakses jaringan pasar yang lebih luas dan kesenjangan aspirasi penerima manfaat dengan arahan program. Faktor penghambat lainnya adalah kebiasaan masyarakat pada utang di warung kelontong yang menghambat konversi kapital ekonomi dan berpotensi merusak kapital sosial yang ada, ketidakmampuan melawan persaingan usaha pada bidang yang sama karena kurangnya inovasi, keterbatasan peralatan dan stock barang, lokasi usaha yang kurang strategis, keterbatasan jaringan dan relasi sosial, resistensi terhadap usaha kelompok serta keterbatasan pengetahuan dan keterampilan penerima manfaat

4 Pembahasan

Konversi kapital dalam konteks penerima bantuan sosial kewirausahaan menunjukkan bahwa jenis kapital seperti sosial, ekonomi, *embodied* dan digital saling berinteraksi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun kapital yang dapat berdiri sendiri karena semuanya saling berinteraksi (Bottero, 2009). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa dalam konteks kewirausahaan, konversi kapital tidak hanya melibatkan dua jenis kapital namun melibatkan bentuk kapital lainnya (Pret et al., 2015). Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian pada pengusaha kerajinan dimana kapital simbolik yang memainkan peran penting dalam proses konversi kapital (Pret et al., 2015). Sedangkan hasil temuan pada penerima bantuan sosial kewirausahaan, kapital sosial cenderung lebih dominan pada proses konversi kapital. Hal ini menunjukkan bahwa kapital sosial berpengaruh pada kegiatan usaha rumah tangga miskin (Shepherd et al., 2020). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan kapital sosial agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Suri et al., 2023).

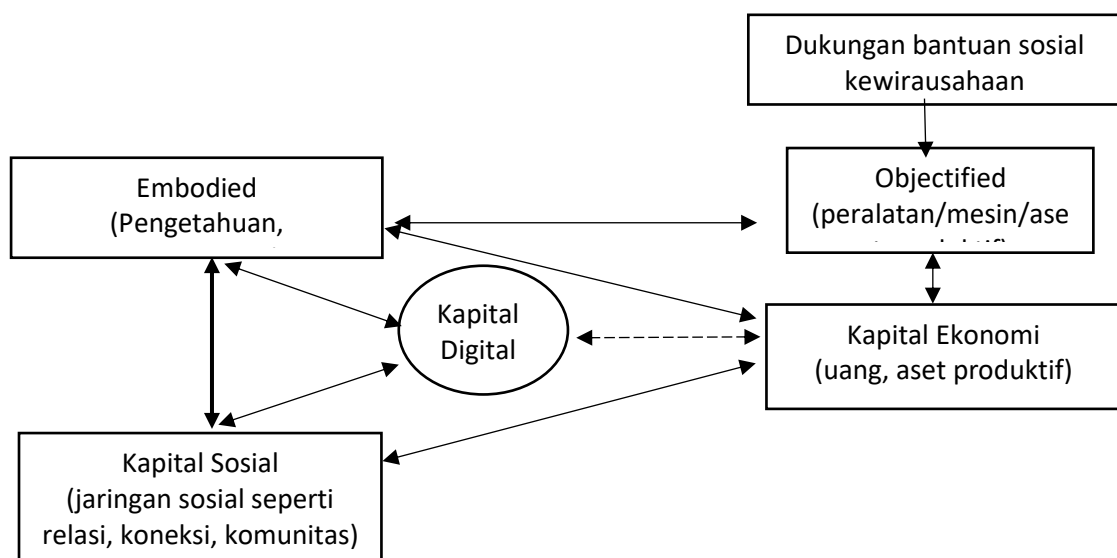
Astriyana Telaumbanua & Robert M.Z. Lawang

Konversi Bentuk Kapital Untuk Pengentasan Kemiskinan Multidimensional Pada Penerima Bantuan Sosial Kewirausahaan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

Bantuan sosial kewirausahaan yang diterima oleh penerima manfaat berinteraksi dengan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki sebelumnya (*embodied*), yang membentuk *habitus* penerima bantuan berdasarkan pengalaman sosial yang terus menerus dan berulang-ulang serta bertahan lama, sehingga sudah tertanam atau terinternalisasi dalam diri mereka melalui proses yang panjang. Misalnya pada informan SM yang menerima bantuan peralatan memasak dan bahan makanan, SM mampu mengelola usahanya karena sudah memiliki bakat dan keterampilan yang sudah tertanam (*embodied*) dan berpengalaman dalam memasak aneka makanan ringan atau jajan. Hal ini kemudian tidak menyulitkan bagi penerima bantuan ketika harus beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi konsumen agar usaha yang dilakukan tetap berjalan.

Keterampilan yang sudah dimiliki (*embodied*) melalui pengalaman dapat dimanfaatkan untuk mengelola aset produktif untuk mendapatkan kapital ekonomi. Dalam hal ini, konsep *habitus* Bourdieu memungkinkan wirausaha memahami dan mengenali peluang (Shingirai, 2023). Kapital *embodied* berinteraksi dengan kapital sosial dalam bentuk pemahaman preferensi konsumen mendorong wirausaha menyesuaikan produk, yang kemudian dikonversi ke kapital ekonomi untuk mendapatkan pendapatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Zelekha & Dana (2019) yang menyebutkan bahwa kapital sosial ketika berinteraksi dengan kapital budaya dapat memberikan hasil yang positif.

Embodied dalam bentuk keterampilan ditemukan pada penerima bantuan yang memiliki jenis usaha yang memerlukan keahlian teknis seperti perbengkelan, jasa pijat, konveksi, dan penjual makanan ringan dan minuman. Sedangkan pada jenis usaha lainnya seperti usaha warung dan pedagang eceran keliling, pengetahuan diperoleh dari hasil pengalaman berinteraksi dengan jaringan sosial yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa konversi kapital tidak serta merta dapat langsung berhasil karena ada beberapa kondisi dan konteks tertentu yang perlu diperhatikan (James et al., 2022). Berikut adalah proses konversi kapital yang terjadi dalam konteks kewirausahaan pada penerima bantuan sosial kewirausahaan pedesaan di Bojonggede, Kabupaten Bogor.



Gambar 1. Konversi kapital pada penerima bantuan sosial kewirausahaan
Sumber : Olahan penelitian, 2024

Konversi kapital ekonomi ke kapital sosial terjadi melalui investasi dalam kegiatan arisan (*social gatherings*) dan kontribusi ekonomi pada kegiatan sosial keagamaan. Hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan kewirausahaan sebagian digunakan untuk membayar arisan karena dilandasi motif untuk memperkuat kapital sosial. Bagi sebagian penerima bantuan, keikutsertaan dalam arisan dilandasi motif untuk mendapatkan pelanggan, mempromosikan usaha dan mendapatkan dana

darurat. Begitu pula halnya kegiatan sosial keagamaan yang tidak hanya membangun nilai-nilai spritual, namun dapat menjadi sarana untuk saling membantu satu sama lain melalui kontribusi dana sosial. Bagi penerima bantuan lain, kegiatan sosial keagamaan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan konsumen.

Konversi kapital ekonomi ke kapital budaya terjadi dalam bentuk *embodied* dan *objectified*. Dukungan bantuan sosial kewirausahaan dalam bentuk *objectified* dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan untuk mendapatkan pendapatan (kapital ekonomi) melalui keterampilan yang sebelumnya sudah tertanam dan dimiliki (*embodied*) oleh penerima bantuan. Selain memanfaatkan hasil usaha (kapital ekonomi) untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sebagian penerima bantuan memiliki upaya untuk melakukan investasi pada peralatan usaha (*objectified*) untuk mengembangkan keterampilan yang mendukung kegiatan usaha meskipun kapital ekonomi yang diinvestasikan tidak banyak.

Konversi kapital sosial ke bentuk kapital ekonomi terjadi dalam bentuk pemanfaatan jaringan sosial dan kepercayaan. Jaringan sosial menghubungkan penerima bantuan dengan bantuan dari pihak eksternal, mendapatkan akses dana pinjaman bergulir, pemasaran produk usaha, fasilitasi tempat berjualan, mempertemukan dengan calon pelanggan, menyesuaikan produk usaha sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen, mendorong penggunaan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga miskin yang memiliki kapital sosial yang tinggi cenderung lebih mendapatkan keuntungan karena mendapatkan lebih banyak pelanggan yang pada akhirnya berkontribusi pada pendapatan. Kewirausahaan tidak hanya memungkinkan rumah tangga miskin mendapatkan sumber daya ekonomi (finansial), tetapi mereka juga memperkuat hubungan sosial dan ikatan yang erat dengan jaringan yang dimiliki. Disamping itu juga ditemukan bahwa kepercayaan dalam bentuk kualitas layanan jasa/produk mendorong terbentuknya loyalitas konsumen yang berkontribusi pada keberlanjutan usaha.

Jaringan sosial yang dimiliki juga dapat membantu rumah tangga miskin mendapatkan akses bantuan yang diperlukan termasuk bantuan kewirausahaan. Misalnya keanggotaan dalam suatu organisasi atau komunitas dapat membantu rumah tangga miskin mendapatkan sumber daya yang diperlukan baik dalam bentuk pengembangan keterampilan dan kebutuhan dasar. Organisasi atau komunitas memberikan informasi yang dapat membantu menghubungkan antara penerima manfaat dengan institusi pemerintah dan pihak eksternal lainnya. Diantara penerima bantuan lainnya, penerima bantuan yang memiliki kedisabilitas atau anggota rumah tangga yang disabilitas ditemukan memiliki ikatan yang lebih kuat dalam komunitas yang mereka ikuti karena adanya rasa solidaritas, perasaan senasib dan saling memahami dalam mendukung kegiatan usaha.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa kapital sosial memainkan peran penting dalam mendorong adopsi penggunaan teknologi digital pada penerima bantuan sosial kewirausahaan. Hasil temuan ini sejalan dengan temuan pada penelitian sebelumnya bahwa alasan utama seseorang mengakses media digital biasanya karena memenuhi tuntutan yang berkaitan dengan kapital sosial atau kapital budaya (Villanueva-Mansilla et al., 2015). Dorongan dan dukungan sosial untuk mengadopsi teknologi digital menunjukkan adanya proses konversi dari kapital sosial ke kapital digital. Akses pada teknologi digital memungkinkan penerima bantuan sosial kewirausahaan meningkatkan kapital digital, mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang sebelumnya tidak diperoleh. Dalam hal ini tuntutan sosial dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga miskin untuk mengadopsi dan mengakses teknologi digital.

5 Kesimpulan

Konversi kapital ekonomi, sosial dan digital melalui kewirausahaan memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan multidimensional di kalangan penerima bantuan sosial kewirausahaan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Proses konversi kapital ekonomi ke kapital sosial terjadi melalui investasi dalam kegiatan arisan dan kontribusi ekonomi pada kegiatan sosial keagamaan. Partisipasi dalam kelompok seperti arisan dan kegiatan keagamaan terbukti dapat menguatkan

Astriyana Telaumbanua & Robert M.Z. Lawang

Konversi Bentuk Kapital Untuk Pengentasan Kemiskinan Multidimensional Pada Penerima Bantuan Sosial Kewirausahaan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

jaringan relasi sosial. Konversi kapital ekonomi ke kapital budaya juga dapat terjadi dalam bentuk investasi peralatan/mesin yang mendukung pengembangan keterampilan untuk digunakan dalam pengembangan usaha.

Konversi kapital sosial ke kapital ekonomi juga ditemukan terjadi dalam bentuk pemanfaatan jaringan sosial dan koneksi untuk memperoleh akses bantuan eksternal, dana pinjaman, serta dukungan pemasaran dan pelatihan keterampilan. Hal ini membantu penerima bantuan sosial kewirausahaan untuk memperoleh pendapatan melalui kewirausahaan. Konversi kapital sosial ke kapital digital juga terjadi melalui dukungan relasi sosial yang mendorong penerima bantuan untuk mengadopsi teknologi digital untuk memperkuat kapital sosial luring ke ranah daring. Konversi ini dapat membuka potensi bagi penerima bantuan sosial kewirausahaan untuk memperoleh keterampilan digital dan melakukan pemasaran melalui status WhatsApp atau WA group.

Konversi kapital digital ke kapital ekonomi ditemukan masih terbatas pada bentuk pemasaran usaha dan pemesanan layanan barang atau jasa menggunakan platform digital seperti WhatsApp. Temuan menunjukkan penerima bantuan sosial kewirausahaan menggunakan teknologi digital untuk memperkuat kapital sosial yang sebelumnya sudah terbangun. Sebagian penerima bantuan sosial kewirausahaan masih mengalami hambatan dalam hal konektivitas dan kompetensi digital yang menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan digital tingkat pertama dan kedua (*the first level of digital divide and the second level of digital divide*).

Ikatan relasi sosial yang kuat mendukung proses konversi kapital untuk memperoleh sumber daya lain yang sebelumnya tidak terjangkau. Namun, disisi lain terdapat faktor penghambat yang berasal dari faktor struktural dan internal seperti motivasi diri yang rendah, takut mengambil resiko, dan ketergantungan pada utang dan kurangnya kapital digital menjadi faktor penghambat proses konversi. Temuan lainnya adalah bahwa pendampingan terhadap penerima bantuan kewirausahaan ini masih belum optimal terutama dalam menghubungkan penerima bantuan dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Sebagian besar penerima bantuan sosial kewirausahaan dalam penelitian ini masih menjalankan usahanya dalam lingkungan yang terbatas dimana konsumen utama adalah keluarga, tetangga dan teman. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa pendekatan integratif melalui konversi kapital diperlukan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis kewirausahaan pada rumah tangga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Program kemitraan konservasi yang berjalan memiliki kebermanfaatan bagi kelompok masyarakat desa hutan konservasi untuk dapat melestarikan, menjaga serta mengelola kawasan dengan bertanggung jawab. Kemitraan konservasi cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan peningkatan pendapatan petani sebesar 4-30 Juta rupiah/tahun hingga dapat membeli kendaraan bermotor, efektif dalam meningkatkan tutupan tanaman pokok sebesar 35% dan efektif meningkatkan kesadaran petani untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi. Hubungan antara efektivitas program pemberdayaan masyarakat dengan program kemitraan konservasi memiliki hubungan yang cukup signifikan dan berkorelasi kuat serta kemudahan interaksi dengan penyuluh. Kebermanfaatan yang ditimbulkan dengan adanya program kemitraan konservasi turut memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Dampak yang ditimbulkan secara ekologi dapat menjaga ketersediaan air saat kemarau, berkurangnya banjir dan kemunculan satwa liar namun dari partisipasi petani dalam penanaman tanaman pokok masih cukup rendah. Dampak secara sosial anggota kelompok terjadi kemudahan interaksi pertemuan lebih antar petani dan penyuluh. Hal ini karena adanya pertemuan rutin yang difasilitasi oleh pihak Resort Wonoasri.

6 Saran

Program pengentasan kemiskinan multidimensional semestinya tidak hanya berfokus pada pengembangan kapital ekonomi semata, namun mengintegrasikannya dengan aspek kapital lainnya seperti kapital sosial, kapital budaya (*embodied, objectified, institutionalized*), kapital digital dan

bentuk-bentuk kapital lainnya yang terbatas dimiliki oleh penerima bantuan sosial kewirausahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapital sosial, embodied, objectified dan digital sama pentingnya dengan kapital ekonomi dalam mendukung keberhasilan kewirausahaan. Oleh karena itu, program pemberdayaan perlu memperhatikan bagaimana membangun dan meningkatkan kapital penerima bantuan (kapital ekonomi, sosial, embodied, objectified dan digital) dan melakukan pendampingan yang intensif seperti menghubungkan dengan jaringan pasar yang lebih luas, memasarkan produk, memfasilitasi penerima bantuan untuk mendapatkan konsumen yang lebih luas, meningkatkan keterampilan digital dan sebagainya.

Hasil temuan ini mungkin dapat saja berbeda pada konteks wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda. Beberapa partisipan dalam penelitian ini juga memiliki keterbatasan akses pada teknologi digital yang membatasi dalam mengeksplorasi potensi kapital digital untuk pengetasan kemiskinan pada penerima bantuan sosial kewirausahaan. Keterbatasan ini dapat memberikan peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam memahami interaksi kapital sosial dan kapital digital pada penerima bantuan sosial kewirausahaan di wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda.

Ucapan terima kasih, Kami mengucapkan terimakasih kepada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI, Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, Sentra Galih Pakuan di Bogor, partisipan dan para pihak yang telah mendukung dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Addeo, F., D'Auria, V., Delli Paoli, A., Punziano, G., Ragnedda, M., & Ruiiu, M. L. (2023). Measuring digital capital in Italy. *Frontiers in Sociology*, 8. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1144657>
- Adi, I. R. (2024). *Praktik Komunitas, Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Edisi Revisi 2023)* (Yayat Sri Hayati, Ed.). Rajawali Pers. PT Rajagrafindo Persada. <http://www.rajagrafindo.co.id>
- Ailiyah, N., Chalimah, N., Fauzi, M. A. N., & Wahyudi, M. A. (2023). Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro Kabupaten Probolinggo . *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3 SE-Articles). <https://doi.org/10.33007/ska.v12i3.3359>
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. *World Development*, 59, 251–274. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.026>
- Asimaki, A., & Koustourakis, G. (2014). Habitus: An Attempt at a Thorough Analysis of a Controversial Concept in Pierre Bourdieu's Theory of Practice. *Social Sciences*, 3(4), 121–131. <https://doi.org/10.11648/j.ss.20140304.13>
- Bhagavatula, S., Elfring, T., van Tilburg, A., & van de Bunt, G. G. (2010). How social and human capital influence opportunity recognition and resource mobilization in India's handloom industry. *Journal of Business Venturing*, 25(3), 245–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.10.006>
- Bottero, W. (2009). Relationality and social interaction. *British Journal of Sociology*, 60(2), 399–420. <https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2009.01236.x>
- Bourdieu, P. (1986a). The Forms of Capital. In N. W. Biggart (Ed.), *Readings in Economic Sociology* (pp. 280–291). Blackwell Publishers Ltd. <https://doi.org/10.1002/9780470755679.ch15>
- Bourdieu, P. (1986b). The Forms of Capital. In N. W. Biggart (Ed.), *Readings in Economic Sociology* (pp. 280–291). Blackwell Publishers Ltd. <https://doi.org/10.1002/9780470755679.ch15>
- Bourdieu, P. (1986c). *The forms of capital*. In: Richardson, J., *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (1986), Westport, CT: Greenwood: 241–58. (pp. 241–258). <https://www.socialcapitalgateway.org/sites/socialcapitalgateway.org/files/data/paper/2016/10/18/rbasicsbourdieu1986-theformsofcapital.pdf>

Astriyana Telaumbanua & Robert M.Z.Lawang

Konversi Bentuk Kapital Untuk Pengentasan Kemiskinan Multidimensional Pada Penerima Bantuan Sosial Kewirausahaan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

- Bourdieu, P. (1986d). *The forms of capital*. In: Richardson, J., *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (1986), Westport, CT: Greenwood: 241–58. (pp. 241–258).
- BPS. (2024). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024*. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Hill, I. (2018). How did you get up and running? Taking a Bourdieuan perspective towards a framework for negotiating strategic fit. *Entrepreneurship & Regional Development*, 30(5–6), 662–696.
<https://doi.org/10.1080/08985626.2018.1449015>
- Hill, I. R. (2021). Spotlight on UK artisan entrepreneurs' situated collaborations: through the lens of entrepreneurial capitals and their conversion. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 27(1), 99–121. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-11-2019-0642>
- James, M., Boden, R., & Kenway, J. (2022). How Capital generates capitals in English elite private schools: Charities, tax and accounting. *British Journal of Sociology of Education*, 43(2), 179–198.
<https://doi.org/10.1080/01425692.2022.2026211>
- Jonsson, S., & Lindbergh, J. (2013). The Development of Social Capital and Financing of Entrepreneurial Firms: From Financial Bootstrapping to Bank Funding. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 37(4), 661–686.
<https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2011.00485.x>
- Junaidi, J. (2022). *Capital Transformation in the Ethnic Restaurant Brand in Pekanbaru, Indonesia*. 6(1), 185–198.
<https://doi.org/doi:10.1515/culture-2022-0154>
- Karatas-Ozkan, M., Ibrahim, S., Ozbilgin, M., Fayolle, A., Manville, G., Nicolopoulou, K., Tatli, A., & Tunalioglu, M. (2023). Challenging the assumptions of social entrepreneurship education and repositioning it for the future: wonders of cultural, social, symbolic and economic capitals. *Social Enterprise Journal*, 19(2), 98–122.
<https://doi.org/10.1108/SEJ-02-2022-0018>
- Keen, C., & France, A. (2022). Capital gains in a digital society: Exploring how familial habitus shapes digital dispositions and outcomes in three families from Aotearoa, New Zealand. *New Media & Society*, 26(8), 4554–4571. <https://doi.org/10.1177/14614448221122228>
- Lawang, R. M. Z. (2019). Small Farmers and Conversion: the Role of Social Capital (Evidence From Manggarai, Flores, East Nusa Tenggara, Indonesia). *Journal of Asian Rural Studies*, 3(1), 48.
<https://doi.org/10.20956/jars.v3i1.1717>
- Liang, B., Xiong, Y., Yang, J., Li, A., & Yang, Y. (2024). The Impact of Social Capital on College Students' Entrepreneurial Behavior: A Moderated Mediation Model. *SAGE Open*, 14(2).
<https://doi.org/10.1177/21582440241244952>
- Madsen, H., Neergaard, H., & Ulhøi, J. P. (2008). Factors influencing the establishment of knowledge-intensive ventures. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 14(2), 70–84.
<https://doi.org/10.1108/13552550810863062>
- Morris, M. H., & Tucker, R. (2021). Poverty and Entrepreneurship in Developed Economies: Re-Assessing the Roles of Policy and Community Action. *Journal of Poverty*, 25(2), 97–118.
<https://doi.org/10.1080/10875549.2020.1747587>
- Nieto, M., & González-Álvarez, N. (2016). Social capital effects on the discovery and exploitation of entrepreneurial opportunities. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 12(2), 507–530.
<https://doi.org/10.1007/s11365-014-0353-0>
- OEDC. (2015). In It Together: Why Less Inequality Benefits All. OEDC.
<https://doi.org/doi.org/10.1787/9789264235120-en>
- Omrane, A. (2014). Entrepreneurs social capital and access to external resources: The effects of social skills. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 24(3), 357–382.
<https://doi.org/10.1504/IJESB.2015.067463>
- Öztopcu, A. (2023). Social capital in sustainable cooperative entrepreneurship: an insight at cooperatives in Turkey. *International Journal of Sustainable Development*, 26(3–4), 356–382.
<https://doi.org/10.1504/IJSD.2023.134408>
- Park, L. Y. J., Oh, Y. W., & Sang, Y. (2024). Digital Access, Digital Literacy, and Afterlife Preparedness: Societal

- Contexts of Digital Afterlife Traces. *Social Media + Society*, 10(3), 20563051241274676.
<https://doi.org/10.1177/20563051241274676>
- Payne, G. T., & Hayes, N. T. (2021). Social capital, entrepreneurship, and family businesses. In *Family Entrepreneurship: Insights from Leading Experts on Successful Multi-Generational Entrepreneurial Families* (pp. 331–344). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66846-4_24
- Perkumpulan PRAKARSA. (2023). *Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia di 34 Provinsi di Indonesia 2012-2021*.
- Pret, T., Shaw, E., & Drakopoulou Dodd, S. (2015). Painting the full picture: The conversion of economic, cultural, social and symbolic capital. *International Small Business Journal*, 34(8), 1004–1027.
<https://doi.org/10.1177/0266242615595450>
- Ragnedda, M. (2018a). Conceptualizing digital capital. *Telematics and Informatics*, 35(8), 2366–2375.
<https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.10.006>
- Ragnedda, M. (2018b). Conceptualizing digital capital. *Telematics and Informatics*, 35(8), 2366–2375.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.10.006>
- Ragnedda, M., Addeo, F., & Laura Ruiiu, M. (2022). How offline backgrounds interact with digital capital. *New Media & Society*, 26(4), 2023–2045. <https://doi.org/10.1177/14614448221082649>
- Ragnedda, M., & Ruiiu, M. L. (2020). *Digital Capital : A Bourdieusian Perspective on the Digital Divide*. Emerald Publishing Limited. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-83909-550-420201008/full/pdf?title=prelims>
- Ragnedda, M., Ruiiu, M. L., & Addeo, F. (2020). Measuring Digital Capital: An empirical investigation. *New Media and Society*, 22(5), 793–816. <https://doi.org/10.1177/1461444819869604>
- Shepherd, D. A., Parida, V., & Wincent, J. (2020). Entrepreneurship and Poverty Alleviation: The Importance of Health and Children’s Education for Slum Entrepreneurs. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 45(2), 350–385. <https://doi.org/10.1177/1042258719900774>
- Shingirai, N. (2023). The Entrepreneurial Habitus of Zimbabweans in South Africa. *Journal of Asian and African Studies*, 00219096231197766. <https://doi.org/10.1177/00219096231197766>
- Silva, T. A. S., Corrêa, V. S., Vale, G. M. V., & Giglio, E. M. (2020). Influence of social capital offline and online on early-stage entrepreneurs. *Revista de Gestao*, 27(4), 393–408. <https://doi.org/10.1108/REGE-10-2019-0103>
- Šmaguc, T., & Vuković, K. (2023). Forms and conversions of the economic capital of Croatian entrepreneurs in the computer programming industry with insights into variations of the company’s development stages. *Journal of Information and Organizational Sciences*, 47(2), 305–331. <https://doi.org/10.31341/jios.47.2.4>
- Smith, C., Smith, J. B., & Shaw, E. (2017). Embracing digital networks: Entrepreneurs’ social capital online. *Journal of Business Venturing*, 32(1), 18–34. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2016.10.003>
- Suri, D. M., Yogia, M. A., & Suyastri, C. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Objek Wisata dengan Memanfaatkan Modal Sosial. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3 SE-Articles). <https://doi.org/10.33007/ska.v12i3.3363>
- Tantriana, A., & Rakhmawan, S. A. (2024). Looking at Social Assistance: Is It Effective in Strengthening the Economy in East Java. *East Java Economic Journal*, 8(2), 179–202. <https://doi.org/10.53572/ejavvec.v8i2.126>
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. L. (2016). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource. (Fourth Edition)*. John Wiley and Sons Inc.
- Villanueva-Mansilla, E., Nakano, T., & Evaristo, I. (2015). From Divides to Capitals: An Exploration of Digital Divides as Expressions of Social and Cultural Capital. In *Communication and Information Technologies Annual* (Vol. 10, pp. 89–117). Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S2050-206020150000010004>
- Wong, N. D., & McGovern, T. (2022). Entrepreneurial strategies in a family business: growth and capital conversions in historical perspective. *Business History*, 65(3), 454–478.
<https://doi.org/10.1080/00076791.2020.1807952>
- Xie, Y., & Xie, E. (2021). Comparing Income Poverty with Multidimensional Well-being Based on the “Conversion Efficiency.” *Social Indicators Research*, 154(1), 61–77. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02561-y>
- Zelekha, Y., & Dana, L.-P. (2019). Social Capital Versus Cultural Capital Determinants of Entrepreneurship: An Empirical Study of the African Continent . In *The Journal of entrepreneurship* (Vol. 28, Issue 2, pp. 250–269). SAGE Publications . <https://doi.org/10.1177/0971355719851900>

Astriyana Telaumbanua & Robert M.Z.Lawang

Konversi Bentuk Kapital Untuk Pengentasan Kemiskinan Multidimensional Pada Penerima Bantuan Sosial Kewirausahaan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

Zhao, F., Barratt-Pugh, L., Standen, P., Redmond, J., & Suseno, Y. (2022). An exploratory study of entrepreneurial social networks in the digital age. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 29(1), 147–173.

<https://doi.org/10.1108/JSBED-10-2020-0359>

Zhao, J., & Li, T. (2021). Social Capital, Financial Literacy, and Rural Household Entrepreneurship: A Mediating Effect Analysis. *Frontiers in Psychology*, 12.

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.724605>



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Praktik Anti-Opresi pada Lembaga Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas

Nurliana Cipta Apsari^{1*}  Hadiyanto A. Rachim¹ 

1 Pusdi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, FISIP Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesian

* Korespondensi: nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id; Tel: +62 81320713795

Diterima: 26 Maret 2024; Disetujui: 20 Desember 2024; Diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstrak: Ketidakadilan sosial yang dialami populasi disabilitas di berbagai rentang umur diperparah dengan kurangnya pelayanan lintas umur dan lintas jenis disabilitas yang disediakan baik itu oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Lembaga penyedia layanan bagi populasi disabilitas mayoritas masih bersifat karitas dan masih belum berubah dari model tradisional ke model sosial. Model sosial memandang fenomena disabilitas sebagai suatu kondisi yang dipengaruhi oleh struktur fisik lingkungan, perilaku sosial serta nilai budaya yang berkembang mengenai populasi disabilitas. Tujuan penulisan adalah untuk menggambarkan pelayanan yang ada bagi penyandang disabilitas kemudian dianalisa dari sudut pandang praktik anti-oppressive. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, dengan pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur, diperoleh 9 lembaga penyedia layanan bagi populasi disabilitas dan semua memberikan pelayanan yang bersifat rehabilitative. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan sudut pandang teori anti-oppressive. Hasil penelitian menemukan layanan bagi populasi disabilitas masih menggunakan pendekatan model medis dan orang disabilitas menjadi obyek dari layanan. Layanan yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap populasi disabilitas, perlu terus digalakkan sehingga tidak ada lagi cara pandang diskriminatif dan perlakuan oppressive yang diberikan kepada populasi disabilitas.

Kata kunci: Model sosial, disabilitas, layanan promotive, anti-opresif

Abstract: Social injustice experienced by disabled populations in various age ranges is exacerbated by the lack of services across ages and types of disabilities provided by both government and non-governmental organizations. Service providers for the majority of the disabled population are still charismatic and have not changed from traditional models to social models. The social model views the phenomenon of disability as a condition that is influenced by the physical structure of the environment, social behavior, and cultural values that develop regarding the disabled population. This paper aims to look at existing services for the disabled population and critically reflect on the existing services from a social model view to avoid anti-oppressive practices for the disabled population. Using in-depth interviews and literature studies, nine institutions provided services to the disabled population, all offering rehabilitative services. The research found services are using the medical model approach and putting the people with disability as the object of the service. Promotive services for the disabled population that change the way society views the disabled population must still be encouraged so that there is no longer a discriminatory perspective and oppressive treatment given to the disabled population. social capital. We expect this research to contribute to implementing a more integrated social assistance program better suited to alleviating multidimensional poverty.

Keywords: social model, disability, promotive service, anti-oppressive

1. Pendahuluan

Ketidakadilan sosial yang diterima oleh populasi disabilitas di berbagai rentang umur semakin diperparah dengan kurangnya pelayanan yang disediakan baik itu oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah bagi populasi disabilitas lintas umur dan lintas jenis disabilitas (Isfandari & Roosiermatie, 2018; Apsari & Raharjo, 2021) Lokasi geografis tempat tinggal orang dengan disabilitas

juga menentukan ketersediaan layanan bagi populasi disabilitas sesuai dengan jenis disabilitasnya dan berpotensi memperburuk ketidakadilan sosial yang telah diterima oleh populasi disabilitas (Luthfiyah, 2018). Lembaga penyedia layanan bagi populasi disabilitas mayoritas masih bersifat karitas karena cara pandang masyarakat yang masih belum berubah dari model tradisional ke model sosial (Santoso & Apsari, 2017). (Hutchinson, 2019) menjelaskan bahwa model tradisional memandang penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak beruntung, berbeda, tidak sempurna dan mungkin tidak dipandang sebagai manusia sehingga pengucilan atau pembuangan biasanya merupakan solusi yang dilakukan secara umum. Lebih lanjut, (Hutchinson, 2019) menjelaskan selain model tradisional, ada model medis, dimana orang dengan kerusakan anggota tubuh dipandang memiliki kondisi yang tidak sehat secara medis, sehingga untuk mengatasinya adalah dengan “menyehatkan” para orang-orang dengan kekurangan tersebut secara medis sehingga mereka dapat beradaptasi lebih baik dengan lingkungannya.

Perspektif lainnya dalam memahami fenomena disabilitas adalah model sosial. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam (Hutchinson, 2019) bahwa kerusakan/kekurangan anggota tubuh tidak dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat berpengaruh dibanding dengan kekurangan yang dibentuk oleh struktur fisik, perilaku sosial dan nilai budaya, maka model sosial memandang fenomena disabilitas sebagai suatu kondisi yang dipengaruhi oleh struktur fisik lingkungan, perilaku sosial serta nilai budaya yang berkembang mengenai populasi disabilitas. Lebih lanjut, (Hutchinson, 2019) mengutip Peters (2014) menyatakan bahwa lingkungan lah yang membuat orang-orang menjadi disabilitas, sehingga solusinya adalah membuat perubahan terhadap lingkungan fisik dan/atau sosial.

Dengan adanya perubahan cara pandang tersebut, pelayanan dan tujuan-tujuan dari aksi komunitas disabilitas juga mengalami perubahan (Apsari & Raharjo, 2021; Santoso & Apsari, 2017; Setiawan & Apsari, 2019; Riyanti & Apsari, 2020; Fathimah & Apsari, 2020). Aksi-aksi komunitas disabilitas yang merupakan bagian dari pergerakan sosial bertujuan agar mendapatkan penerimaan dari masyarakat akan kedisabilitasan mereka dan membuat lingkungan mereka menjadi lebih aksesibel (Hutchinson, 2019). Sementara, banyak program yang ada selama ini memusatkan perhatian pada layanan bagi penyandang disabilitas nya sendiri dibandingkan dengan layanan bagi masyarakat agar lebih aksesibel kepada para penyandang disabilitas (Yasin & Apsari, 2020; Effendi, Darwi, & Apsari, 2020; Rosalina & Apsari, 2020; Dhairrya & Herawati, 2019; Tjahjono, 2017; Sukmana, 2020). Berdasarkan hal tersebut, maka kajian mengenai lembaga pelayanan yang memusatkan perhatian pada layanan kepada masyarakat bukan penyandang disabilitas merupakan hal yang penting untuk dilakukan sehingga terjadi perubahan stigma dan diskriminasi yang terjadi di masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Pelayanan-pelayanan yang diberikan bagi populasi disabilitas saat ini di Indonesia masih bersifat rehabilitatif, dimana pelayanan yang diberikan masih berfokus pada orang dengan disabilitas sebagai klien. Padahal, seperti yang dikemukakan oleh (Hutchinson, 2019) jelas bahwa orang menjadi disabilitas adalah karena kurangnya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi orang-orang dengan gangguan fungsi tubuh. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang penting untuk membuat karya ilmiah berkaitan dengan profil lembaga pelayanan sosial bagi populasi disabilitas, sehingga tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan profil beberapa lembaga pelayanan sosial bagi populasi disabilitas, termasuk program-program atau layanan-layanan yang ada dalam lembaga tersebut.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui *in-depth interview*. Selain wawancara, data sekunder dikumpulkan untuk melengkapi hasil wawancara. Saat penelitian ini dilakukan, Covid-19 masih menjadi pandemi dan kebijakan hybrid diterapkan dalam penelitian ini.

Penentuan lembaga dalam penelitian ini dilakukan secara purposive dengan kriteria lembaga berupa lembaga yang menyediakan layanan bagi disabilitas dan bersedia menjadi tempat penelitian. Lembaga yang menjadi informan dalam penelitian ini berlokasi di 5 kota dan kabupaten di Indonesia, yaitu Kota Bandung, Kab. Sumedang, Kota Jakarta, Kota Bekasi serta Kota Batam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi partisipatif dan data sekunder dari Lembaga-lembaga yang diteliti. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengolahan dan analisa data melalui reduksi, penyajian dan verifikasi data melalui triangulasi data, dilanjutkan dengan proses penulisan naskah artikel.

3. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 6 lembaga sosial dengan status yayasan dan 3 SLB yang memberikan layanan terutama kepada anak dengan disabilitas. Lembaga sosial yang berhasil diidentifikasi adalah Yayasan Biruku Indonesia; Parakerja; Cahaya Inklusi Indonesia; Yayasan Sayap Ibu; Sentra Wyata Guna; Yayasan Galuh; SLB Raharja; SLB Darul Hidayah; dan SLB Putra Kami sebagaimana tergambar dalam Tabel 1

Tabel 1. Layanan bagi Populasi Disabilitas

No.	Nama Lembaga	Karakteristik Lembaga
1.	Yayasan Biruku Indonesia	Sekolah terapi, minat dan bakat, bagi anak penyandang autism. Pelayanan yayasan ini dikhususkan bagi anak berusia 12 tahun kebawah, dengan program meliputi pembinaan potensi anak autisme, acara yang memfokuskan untuk kepedulian terhadap anak disabilitas, dan melaksanakan beberapa kegiatan seperti fashion show, seni musik, dan teater untuk anak-anak autis.
2.	Parakerja	<i>Start-up</i> digital yang hadir sebagai solusi dari permasalahan aksesibilitas pendidikan dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas di era digital.
3.	Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia	Organisasi nirlaba yang befokus pada bidang kesejahteraan sosial dan pendidikan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berbasis inklusif, berkeadilan, dan partisipatif
4.	Yayasan Sayap Ibu	Layanan kepada populasi disabilitas khususnya anak dengan disabilitas melalui perawatan panti, dan luar panti (non panti). Untuk di luar panti, anak dengan disabilitas diasuh dan dirawat oleh orang tua atau keluarga intinya di rumah yang

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 5. Sentra Wyata Guna | berada di sekitar Yayasan Sayap Ibu dan berasal dari keluarga pra sejahtera. |
| 6. Yayasan Gagasan Leluhu (Galuh) | Merupakan lembaga rehabilitasi sosial yang berada di bawah naungan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lembaga pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk melatih dan membimbing pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam memaksimalkan serta mengembalikan keberfungsian sosialnya |
| 7. SLBN Raharja | Tempat rehabilitasi yang melakukan penampungan, perawatan, dan pengobatan bagi orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Menyediakan Pendidikan bagi anak disabilitas buta, tuli, dan disabilitas intelektual. Pendidikan diselenggarakan dalam kelompok. Selain fasilitas sekolah, SLBN Raharja juga memiliki panti perawatan disabilitas yang memberikan perawatan dan tempat tinggal bagi penyandang disabilitas beberapa murid sekolah, alumni sekolah, dan warga sekitar. |
| 8. SLB Darul Hidayah | Layanan pendidikan untuk siswa disabilitas. Pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. |
| 9. SLB Putrakami | Fokus awal adalah terapi anak berkebutuhan khusus dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Di Tahun 2009 Yayasan SLB Putrakami membuka jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SD dan SMP untuk penyandang disabilitas. |

Sumber: Hasil Penelitian, 2022.

Yayasan Biruku Indonesia yang berlokasi di Kota Bandung dan merupakan layanan untuk anak autisme. Yayasan Biruku Indonesia beralamat di Jalan Senam 1 No. 8 Jawa Barat (<https://yayasan-biruku-indonesia.business.site/#detailsness.site>). Yayasan Biruku Indonesia merupakan sekolah terapi, minat dan bakat, bagi anak penyandang autisme. Pelayanan yayasan ini dikhususkan bagi anak berusia 12 tahun kebawah, dengan program meliputi pembinaan potensi anak autisme, acara yang memfokuskan untuk kepedulian terhadap anak disabilitas, dan melaksanakan beberapa kegiatan seperti fashion show, seni musik, dan teater untuk anak-anak autis. Yayasan Biruku Indonesia memiliki ambisi agar anak-anak autisme tersebut dapat berkembang dan mendapatkan penerimaan yang baik, baik itu dari lingkungan dalam maupun luar lingkungan. Selain itu, Yayasan Biruku Indonesia juga melakukan sosialisasi mengenai autisme kepada masyarakat agar mereka sadar dan paham bagaimana menghadapi atau melayani anak penyandang autisme. Namun demikian, layanan utama dari Yayasan Biruku Indonesia ini adalah layanan Pendidikan bagi anak dengan autisme.

Hasil wawancara pada informan DS menunjukkan bahwa pengurus Yayasan Biruku Indonesia memiliki semangat untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap anak penyandang autisme,

sehingga yang dilakukan lembaga tersebut adalah dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan karya dan kemampuan anak dengan autisme seperti mengikutsertakan anak dengan autisme kepada *fashion show* atau pameran-pameran hasil karya buah tangan anak-anak dengan autisme yang menjadi binaan Yayasan Biruku Indonesia. Melalui kegiatan-kegiatan di masyarakat, pengurus Yayasan Biruku Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak dengan autisme juga tidak jauh berbeda dengan anak-anak yang tidak dengan autisme.

Lembaga selanjutnya adalah **Parakerja** yang memberikan pelayanan bagi orang dewasa dengan disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan Y, diketahui bahwa Parakerja adalah startup digital yang berdiri di Batam pada Desember 2018, dengan nama perusahaan PT. Parakerja Disabilitas Bisa. Parakerja hadir sebagai solusi dari permasalahan aksesibilitas pendidikan dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas di era digital. Dalam websitenya, Parakerja merupakan sebuah platform digital dan mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan formal anak disabilitas di SLB. Selain itu Parakerja juga meluaskan program lain, seperti Kelas Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), Fundraising Campaign, Rebranding SLB, dan juga pelatihan kerja disabilitas di Parakerja Disability Center.

Menurut pengelola Parakerja, tujuan berdirinya Lembaga Parakerja adalah sebagai platform pendidikan bagi para penyandang Disabilitas dan non Disabilitas agar memiliki kesetaraan dalam aspek pendidikan, aksesibilitas dan pekerjaan (<https://parakerja.co.id/home/#home>). Parakerja memiliki visi untuk menjadi platform yang memberi kesempatan peningkatan kapasitas diri melalui pelatihan dan penempatan kerja yang aksesibel sebagai bagian dari kampanye #KerjaUntukSetara, serta mendukung pendidikan disabilitas yang lebih baik dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi SLB. Misi Parakerja adalah belajar dan berdaya melalui berbagai modul pembelajaran melalui video interaktif, yang diyakini dapat membantu disabilitas dan non disabilitas mendapatkan kesetaraan dalam pendidikan hingga pekerjaan. Selain itu, misi berikutnya adalah kerja untuk setara yang mana Parakerja memiliki misi untuk menciptakan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dan non disabilitas dalam dunia pekerjaan melalui layanan pendidikan di Parakerja.

Kelebihan layanan yang diberikan oleh Parakerja adalah aksesibel, dimana para peserta mendapatkan aksesibilitas dalam setiap layanan di Parakerja melalui video - video yang dilengkapi bahasa isyarat dan animasi yang menarik. Selain itu, Parakerja juga memiliki jaringan yang luas dengan berbagai organisasi disabilitas, SLB, instansi pemerintah, media hingga perusahaan swasta yang sudah bekerja sama dengan Parakerja untuk menghadirkan kesetaraan dalam pendidikan, pekerjaan dan kehidupan sehari - hari bagi penyandang disabilitas maupun non disabilitas. Hingga penelitian ini dilakukan, Parakerja memiliki beberapa program unggulan yang berfokus pada disabilitas Tuli dan Autisme, diantaranya adalah Parakerja Disability Center yang merupakan program pemberdayaan bagi disabilitas untuk dapat memperoleh keterampilan sehingga siap untuk bekerja. Program unggulan berikutnya adalah Kelas BISINDO yang merupakan program kelas pelatihan bahasa isyarat yang saat ini sudah terbuka untuk umum. Program ini juga yang menjadi wadah bagi disabilitas Tuli. Setelah menjalani program pelatihan atau pemberdayaan, para penyandang tuli yang mampu mengajar akan diberikan kesempatan untuk menjadi tutor tuli dalam kelas bahasa isyarat ini.

Program lainnya dari Parakerja adalah *Campaign Fundraising* yang dilakukan oleh divisi Digital Fundraising untuk mengadakan kampanye untuk penggalangan dana. Sasaran utama dari penggalangan dana ini adalah komunitas yang membutuhkan dan disabilitas yang tengah kekurangan, sakit, ataupun terkena musibah. Selanjutnya, Parakerja memiliki program Digitalisasi dan Rebranding SLB yang dirancang untuk memberdayakan SLB (Sekolah Luar Biasa) agar dapat beradaptasi dengan pembelajaran berbasis digital serta promosi secara digital.

Lembaga berikutnya yang menyediakan layanan bagi populasi disabilitas adalah **Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia** (CAI). Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia atau CAI merupakan sebuah organisasi

nirlaba yang befokus pada bidang kesejahteraan sosial dan pendidikan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa CAI bertujuan untuk menjadikan lembaganya sebagai lembaga yang mampu mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berbasis inklusif, berkeadilan, dan partisipatif. CAI sendiri berawal dari sebuah pergerakan di tahun 2017 yang bernama Disabilitas Bergerak Indonesia (DBI). DBI terdiri dari beberapa organisasi disabilitas yang ada di Jawa Barat. CAI mulai mendapatkan legalitas sebagai sebuah lembaga yang berbadan hukum pada tahun 2020. Perubahan nama dari DBI menjadi CAI dilakukan karena untuk mendapatkan legalitas, penggunaan nama DBI sudah banyak terdaftar sehingga perlu adanya perubahan nama.

Dalam memberikan layanannya sebagaimana diungkapkan oleh informan K, CAI berusaha untuk memberikan layanan kepada seluruh kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan lansia. Layanan utama yang diberikan oleh CAI adalah dengan membuka konseling dan juga advokasi kepada pemangku kepentingan untuk mendukung pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Saat ini program layanan CAI memang lebih banyak terfokus pada kelompok penyandang disabilitas. Beberapa layanan yang diberikan oleh CAI, antara lain ialah mengadakan sosialisasi terkait Undang-Undang no. 8 Tahun 2016 dan CRPD (*Convention Rights on Person With Disabilities*) kepada pemangku kepentingan, bersama Perkumpulan Inisiatif dan Voice menyelenggarakan Sekolah Kepemimpinan Generasi Muda Disabilitas, Disability goes to Campus, dan Program Pengurangan Risiko Bencana untuk Perempuan Disabilitas di daerah Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat.

Lembaga pelayanan yang juga memberikan pelayanan bagi populasi disabilitas adalah **Yayasan Sayap Ibu** yang berdiri pada tahun 1955. Pada awal berdirinya, Yayasan Sayap Ibu tidak secara spesifik memberikan pelayanan bagi populasi disabilitas. Motivasi Ibu Sulistina (Istri Bung Tomo yang saat itu adalah Menteri Sosial) membangun Yayasan Sayap Ibu ini karena setiap hari di depan rumahnya beliau mendapati ibu-ibu yang berdagang dari pagi hingga sore dengan membawa anak-anaknya yang masih sangat kecil dan rentan terkena penyakit. Melihat kondisi tersebut Ibu Sulistina dan Bung Tomo tergerak hatinya untuk menolong mereka dengan membuka rumahnya untuk para ibu tersebut bisa menitipkan anak-anak mereka, sampai para ibu selesai berdagang.

Informan S menceritakan bahwa di rumah tersebut Ibu Sulistina memberikan waktunya untuk menjaga, mendidik, dan mengayomi anak-anak tersebut dan beliau akhirnya mengetahui bahwa banyak dari anak-anak tersebut yang tidak diharapkan keberadaanya karena berbagai hal. Mulai dari faktor ekonomi keluarga yang minim, ketidakadaan tanggung jawab seorang ayah, bahkan sampai yang benar-benar tidak memiliki figur seorang ayah. Akhirnya pada tanggal 25 Mei 1955 Yayasan Sayap Ibu resmi didirikan pertama kali di Jakarta dengan maksud dan tujuan untuk menolong anak-anak bayi yang tidak ada yang memelihara, anak-anak bayi yang orang tuanya tidak mampu untuk memeliharanya.

Seiring berjalannya waktu, Yayasan Sayap Ibu yang semula hanya menerima anak bayi, mulai meningkatkan kriteria usia anak menjadi usia 0-5 tahun. Selanjutnya juga mulai ada proses pengangkatan anak, pembukaan cabang Yayasan Sayap Ibu di Yogyakarta, Banten, dan Jawa Timur. Yayasan Sayap Ibu mempunyai visi bahwa anak adalah amanah yang berhak akan perawatan dan perlindungan sejak semasa dalam kandungan dan sesudah dilahirkan. Sementara itu, misi Yayasan Sayap Ibu adalah melaksanakan usaha kesejahteraan anak yang holistik terpadu dan berkesinambungan dalam arti yang seluas-luasnya yang bertujuan untuk menolong anak-anak balita yang 1) Tidak ada orang tua/wali yang merawatnya; 2) Tidak diketahui orang tuanya atau kerabatnya; 3) Orang tua/ walinya tidak mau merawatnya; 4) Terlantar, dan; 5) Karena sebab-sebab lain yang patut diberi pertolongan.

Pada perkembangannya, Yayasan Sayap Ibu kemudian memberikan layanan kepada populasi disabilitas khususnya anak dengan disabilitas. Untuk anak-anak penyandang disabilitas, ada yang berada dalam perawatan panti, dan ada juga yang berada di luar panti (non panti) dimana mereka diasuh dan dirawat oleh orang tua atau keluarga intinya di rumah yang berada di sekitar Yayasan Sayap Ibu dan berasal dari keluarga pra sejahterah. Anak-anak disabilitas non panti ini diberikan bantuan berupa fasilitas seperti alat bantu, obat-obatan, biaya untuk operasi, juga berbagai pelatihan khusus merawat anak penyandang disabilitas, dan juga terapi. Selain panti yang ada di dalam YSI Jakarta di Jalan Barito, ada juga panti asuhan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta Unit Cirendeui yang memberikan pelayanan bagi anak dengan disabilitas. Perbedaannya adalah panti yang berada di Jalan Barito khusus bagi anak-anak balita perempuan, sedangkan panti yang berada di Cirendeui khusus untuk anak-anak usia remaja laki-laki.

Informan S mengungkapkan Panti asuhan Yayasan Sayap Ibu Jakarta Unit Cirendeui ini khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas. Anak-anak yang tinggal berada di Panti Cirendeui ini berusia antara 11-17 tahun yang memiliki disabilitas visual, anak dengan keterlambatan tumbuh kembang, dll. Beberapa tinggal di panti dan mendapatkan fasilitas pendidikan bersekolah di sekolah umum, dan ada juga yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa. Di Panti yang berada di Cirendeui, kegiatan sehari-hari anak sudah terjadwal mulai dari bangun tidur hingga mereka tidur lagi. Tugas masing-masing anak juga sudah ditentukan sehingga mereka bisa belajar untuk mandiri.

Menurut informan S, kegiatan yang juga dilakukan sehari-hari oleh kakak-kakak pengurus dan anak-anak panti yaitu kegiatan menanam tanaman secara hidroponik. Beberapa hasil tanaman hidroponiknya antara lain pakcoy, kangkung, bayam, timun jepang, selada, dan beberapa lainnya. Anak-anak juga seringkali diajarkan memasak yang mana hasil masakannya mereka jual di depan panti atau berkeliling di wilayah sekitar panti. Begitupun dengan hasil hidroponik yang mereka dapat. Selain itu di setiap hari Sabtu, anak-anak akan mendapatkan kelas menggambar, dan juga yang baru-baru ini diberikan kepada anak-anak yaitu kelas merajut yang tujuannya adalah untuk melatih fokus dan motorik anak. Sementara itu, bagi anak dengan disabilitas yang tidak tinggal di panti mendapatkan fasilitas pendidikan di pondok pesantren.

Lembaga berikutnya adalah Sentra **Wyata Guna** yang merupakan Lembaga rehabilitasi sosial yang berada di bawah naungan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dan terletak di Jl. Padjajaran No.52, Kota Bandung. Sentra Wyata Guna sebelumnya terkenal sebagai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna. Sentra Wyata Guna merupakan Lembaga pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk melatih dan membimbing pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam memaksimalkan serta mengembalikan keberfungsian sosialnya.

Menurut informan RN, BRSPDSN Wyata Guna berfokus pada rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sensorik netra saja, hal ini berbeda dengan Sentra Wyata Guna sebagai sentra layanan sosial yang memiliki fokus pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Adapun filosofi dan legalitas lembaga yakni diawali pada tahun 1901, dr Ch. A Westhiff seorang dokter ahli mata bangsa belanda mendirikan Rumah Buta yang sistem pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta. Jauh dari tahun berdirinya, pada tahun 1979 berdasarkan SK Mensos Nomor 41/huk/kepxi/79 Wyata Guna menjadi unit pelaksana teknis Kanwil Departemen Sosial Provinsi Jawa Barat dengan nama Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN) dan berubah menjadi Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna pada tahun 1994. Berdasarkan SK Mentri Sosial RI Nomor 06/huk/2001 PSBN Wyata Guna sebagai UPT dibawah Dirjen Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI. Pada tahun 2018 PSBN Wyata Guna merupakan UPT di lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kemensos RI dan pada tahun 2022 berdasarkan Permensos RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Visi dari lembaga

Sentra Wyata Guna adalah terwujudnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Selanjutnya, informan menginformasikan misi Sentra Wyata Guna bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terutama memberikan pelayanan rehabilitasi sosial prima; memberikan perlindungan dan advokasi; sebagai pusat respon kasus dan intervensi krisis; menjadi lembaga percontohan bagi panti, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) serta Sebagai pusat penguatan kelembagaan dan kapasitas pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Jangkauan pelayanan dari lembaga Sentra Wyata Guna ialah terdiri dari Jawa Barat dan Lampung. Jawa Barat mencakup Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Lampung mencakup Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Waykanan, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat. Sebagaimana tercantum dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2022 bahwa Sentra Wyata Guna yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas untuk melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI).

Lembaga berikutnya adalah **Yayasan Gagasan Leluhur** atau lebih dikenal dengan **Yayasan Galuh** merupakan sebuah lembaga pelayanan sosial yang berlokasi di Jl. Cut Mutia Bambu Kuning 9 Kp. Sepatan, RT. 02/RW. 03, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi. Pendiri yayasan memilih kata “Galuh” sebagai akronim dari “Gagasan Leluhur” dengan pemaknaan bahwa didirikannya sebuah yayasan ini sebagai gagasan dari leluhur atau orang tua. Yayasan Galuh menjadi tempat rehabilitasi yang melakukan penampungan, perawatan, dan pengobatan bagi orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan.

Menurut hasil wawancara kepada informan NM, pengelola Yayasan Galuh menceritakan mengenai berdirinya Yayasan Galuh diinisiasi oleh Pak Gendu Mulatip, bermula dari kesadaran dan kepeduliannya terhadap orang dengan gangguan jiwa. Pak Gendu menyadari fenomena bahwa orang dengan gangguan jiwa belum dapat diterima baik oleh masyarakat, sehingga mereka menjadi kelompok yang rentan untuk mendapatkan perlakuan buruk, gangguan, dan penindasan dari masyarakat. Kemudian, kepedulian Pak Gendu menggerakkan hatinya untuk membantu orang dengan gangguan jiwa yang mana beliau membawa mereka ke rumah pribadinya sebagai tempat penampungan untuk dirawat dan direhabilitasi. Berkat tekadnya yang luar biasa, Pak Gendu akhirnya mendirikan sebuah panti rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa pada tahun 1982.

Yayasan Galuh dirintis dari generasi ke generasi dengan terus memberikan pengobatan dan pembinaan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Meskipun pada awal tahun kehadiran yayasan sempat mendapat penolakan dari masyarakat sekitar lokasi karena masih rendahnya pemahaman masyarakat, tetapi hal ini tidak membuat pihak yayasan goyah. Seiring berjalannya waktu, masyarakat akhirnya dapat menerima kehadiran dan mau untuk tinggal secara berdampingan dengan keberadaan yayasan.

Informan NM menegaskan keberadaan Yayasan Galuh semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat karena adanya akta legal yang mereka miliki. Pihak yayasan mendaftarkan Yayasan Galuh kepada notaris Laksmi Moerti Adhianto, S.H. dengan Akta Notaris No. 264 Tahun 1994. Kemudian, pada tahun 2003 terdaftar di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 062/342/PRLS/2003. Kedua dokumen tersebut kian memperkuat eksistensi yayasan dalam pemberian layanan kepada orang dengan gangguan jiwa. Hingga saat ini juga semakin banyak pihak keluarga yang membawa anggota keluarga untuk menjadi pasien di Yayasan Galuh.

Pasien yang dibawa ke Yayasan Galuh perlu untuk memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak yayasan. Adapun kriterianya adalah orang yang memiliki gangguan mental skizofrenia atau

depresi berat, berusia 20-57 tahun, dan tidak mengalami stroke, autis, atau lumpuh. Kemudian, pihak yayasan tidak membatasi asal atau domisili pasien, sehingga mereka menerima pasien yang berasal dari dalam Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Kedatangan pasien ke yayasan juga bukan hanya diantar untuk dititipkan oleh keluarga, tetapi ada juga yang dibawa sebab mereka ditangkap oleh Satuan Polisi Paming Praja (Satpol PP), atau mereka dibawa karena adanya informasi dan pengaduan dari masyarakat.

Selain ke enam Yayasan yang telah diuraikan sebelumnya, ada 3 lembaga yang berstatus Sekolah Luar Biasa yang merupakan Lembaga Pendidikan khusus bagi anak-anak dengan disabilitas. Lembaga SLB yang berhasil di wawancara adalah **SLBN Raharja** yang berlokasi di Tanjungsari Kab. Sumedang. Sekolah Luar Biasa Negeri Raharja adalah sebuah sekolah luar biasa yang terletak di Desa Raharja, Kelurahan Tanjungsari di Kabupaten Sumedang. Sekolah tersebut dibangun pada tahun 2009 dan mendapatkan izin operasional pada tahun 2012. Pada awalnya sekolah tersebut dibangun sebagai sebuah sekolah swasta, tetapi menjadi sekolah negeri pada tahun 2021 lalu. SLBN Raharja pada saat ini mendidik sebanyak 63 siswa yang memiliki berbagai kondisi disabilitas seperti buta, tuli, dan disabilitas intelektual. Siswa-siswa tersebut diajar dengan bantuan 12 guru yang mendidik siswa dan siswi dalam kelompok-kelompok yang dibagi-bagi per guru. Selain fasilitas sekolah, SLBN Raharja juga memiliki panti perawatan disabilitas yang memberikan perawatan dan tempat tinggal bagi penyandang disabilitas beberapa murid sekolah, alumni sekolah, dan warga sekitar.

SLBN Raharja pada saat pengumpulan data, sedang dalam tahap mengimplementasikan program pelayanan konsultasi disabilitas di desa Cileles di Jatinangor. Menurut informan AS, program tersebut dirancang sebagai sebuah ekstensi dari sekolah untuk melayani anak-anak disabilitas dilokasi yang jauh dari bangunan sekolah. Pihak SLB bersama dengan kader desa Cileles bekerjasama untuk mendata dan memberikan konseling serta pendidikan untuk memberikan terapi kepada anak-anak mereka yang disabilitas. Program tersebut masih berada dalam tahap awal dimana pihak SLB masih mencoba untuk mengembangkan relasi dengan pihak kepala desa dan beberapa sekolah di daerah Cileles untuk mendapatkan data anak-anak disabilitas. Program yang serupa juga sedang direncanakan untuk diimplementasikan di beberapa desa di sekitar Tanjungsari. Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Raharja Tanjungsari merupakan SLB yang beralamat di Kampung Babakan Sirna, Desa Raharja, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. SLB ini didirikan pada tahun 2009 oleh Yayasan Raharja Mandiri dengan nama SLB Plus Raharja Mandiri. Kemudian SLB ini mendapat izin operasional pada tahun 2012 dan pada akhir tahun 2021 SLB Plus Raharja Mandiri berganti status menjadi SLBN. Berdasarkan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 30 Juni 2022, sekolah ini memiliki 12 guru dan 73 peserta didik dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas.

SLBN Raharja Tanjungsari menerima peserta didik dari berbagai jenis disabilitas, mulai dari disabilitas fisik, disabilitas intelektual, dan disabilitas sensorik. Sekolah ini memberikan pendidikan formal dan berbagai pelatihan keterampilan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan bersosialisasi. Selain itu, sekolah ini juga mewadahi peserta didik untuk mengembangkan potensinya dalam bidang lain, seperti kesenian dan olahraga.

Program layanan yang diberikan oleh SLBN Raharja Tanjungsari juga tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga melatih kemampuan sensorik dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah ini juga membuka les Bahasa Inggris untuk peserta didik selama dua kali seminggu. Selain itu, SLBN Raharja Tanjungsari juga berencana membuka Unit Layanan Disabilitas (ULD) di berbagai desa sekitar Tanjungsari dan Jatinangor. Tujuannya adalah untuk mewadahi penyandang disabilitas yang tersebar dan belum terdata di desa-desa.

SLB Darul Hidayah merupakan sekolah luar biasa di bawah Yayasan Darul Hidayah. Pemberian izin operasional kepada Yayasan Darul Hidayah untuk mendirikan sekolah luar biasa diberikan pada tahun 2014 dan saat ini SLB Darul Hidayah sudah berakreditasi A serta berlokasi di Jl. 17 Agustus II.

Saat penelitian ini dilakukan, SLB Darul Hidayah memiliki siswa sebanyak 23 orang, dengan pembagian tingkat sekolah dasar berjumlah 13 orang, tingkat sekolah menengah pertama berjumlah 9 orang, dan tingkat sekolah menengah atas sejumlah 1 orang. Untuk jumlah guru yang ada di SLB Darul Hidayah sebanyak 4 orang. Menurut informan LS, yayanan yang diberikan SLB Darul Hidayah merupakan pemenuhan hak pendidikan untuk siswa disabilitas. Pembelajaran yang dilakukan di SLB Darul Hidayah dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Pada siswa sekolah dasar, ada yang lebih fokus ke pembentukan motorik seperti menggambar dan mewarnai, ada pula yang sudah berlatih menulis dan membaca. Untuk siswa sekolah menengah pertama dan menengah atas, lebih difokuskan kepada minat dan bakat siswa, seperti ada yang pandai dalam memasak, membuat kue, merangkai bunga, dan menjadi atlet renang. Sekolah mendukung dan mendorong siswa-siswinya untuk bisa mengembangkan minat dan bakat mereka. Sekolah juga melatih siswa-siswinya untuk menjadi lebih mandiri.

Yayasan **SLB Putrakami** didirikan dengan alasan adanya stigma di masyarakat. Stigma yang melekat tersebut menghambat perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam hal bergaul dengan teman sebaya, hingga menyulitkan mereka dalam mendapatkan hak mereka sebagai anak, terutama hak untuk mendapat pendidikan formal. Sehingga ketua Yayasan SLB Putrakami tergerak untuk membangun yayasan untuk dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus agar dapat mendapatkan pendidikan serta perawatan yang sesuai untuk tumbuh kembang mereka. Yayasan SLB Putrakami didirikan pada tahun 2001-2002 dengan fokus awal, yaitu terapi anak berkebutuhan khusus dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Di Tahun 2009 Yayasan SLB Putrakami membuka jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SD dan SMP. Hingga saat ini Yayasan SLB Putrakami memiliki 4 SLB yang tersebar di beberapa titik kota/kabupaten Kepulauan Riau, diantaranya: 1) SLB Putrakami, Batam; 2) SLB Anak Brilliant, Batam; 3) SLB Mutiara, Tanjung Pinang; dan 4) SLB Sehati, Karimun.

Berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder, terlihat bahwa telah banyak lembaga-lembaga yang bergerak dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dengan segala jenis disabilitas dan usia penyandang disabilitas. Akan tetapi, hasil penelitian membuktikan bahwa mayoritas lembaga-lembaga tersebut memusatkan perhatiannya pada bagaimana mengubah penyandang disabilitas agar dapat diterima oleh masyarakat daripada mengubah masyarakat agar dapat menerima penyandang disabilitas apa adanya. Hasil wawancara kepada para informan di lembaga-lembaga tersebut menunjukkan kesadaran pengelola lembaga bahwa penyandang disabilitas mengalami kesulitan karena adanya stigma dan diskriminasi masyarakat umum terhadap penyandang disabilitas, namun pengelola lembaga tetap menysasar penyandang disabilitas sebagai objek layanan mereka dibanding masyarakat umum. Ini terjadi karena para pengelola lembaga merasa kesulitan untuk mengubah cara pandang masyarakat dan berpikir bahwa dengan “aksi nyata” yang ditunjukkan oleh penyandang disabilitas agar dapat diterima oleh masyarakat akan dapat mengubah stigma dan diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas. Selain itu juga, karena pengelola memandang bahwa upaya mengubah stigma dan diskriminasi tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong terjadinya perubahan tersebut.

3 Pembahasan

Pelayanan bagi populasi disabilitas seharusnya tidak hanya memusatkan perhatian pada orang dengan disabilitas nya saja, atau dengan kata lain hanya menempatkan orang dengan disabilitas sebagai klien. Akan tetapi seharusnya juga memusatkan perhatian pada masyarakat dan organisasi masyarakat sehingga cara pandang mereka terhadap populasi disabilitas dapat berubah dari hanya

berdasarkan belas kasihan menjadi berdasarkan pemenuhan hak orang dengan disabilitas sebagai manusia. Dengan adanya cara pandang model sosial terhadap disabilitas, jelaslah bahwa yang menjadi fokus adalah pada upaya-upaya merekonstruksi lingkungan fisik dan sosial untuk mewujudkan kemandirian orang dengan disabilitas untuk beraktifitas dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sehingga tidak hanya selesai pada layanan bagi orang dengan disabilitasnya saja.

Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dijejali informasi bahwa orang dengan disabilitas berhak untuk mendapatkan rehabilitasi bahkan peraturan terkini berkenaan dengan disabilitas, yaitu UU No. 8 Tahun 2016, menyebutkan bahwa salah satu hak orang dengan disabilitas adalah hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi. Sangat disayangkan karena ini menunjukkan bahwa yang menjadi fokus dari semua layanan yang tersedia dan diberikan adalah kepada individu dengan disabilitasnya, bukan kepada cara pandang masyarakat terhadap kondisi disabilitas seorang individu. Fenomena tersebut memperkuat posisi orang dengan disabilitas sebagai kelompok yang mengalami tindakan opresi dari semua pihak, termasuk pemerintah. Penyediaan akomodasi yang layak untuk orang dengan disabilitas merupakan salah satu upaya pemenuhan hak orang dengan disabilitas berdasarkan pendekatan anti-oppressive dan anti-diskriminasi.

Opresi merupakan sebuah konstruksi sosial yang menghasilkan pengelompokan orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (Baines, 2011; Cudd, 2006; Darlymple & Burke, 2000; Amadasun & Omorogiwa, 2020). Seringkali tindakan opresi terjadi ketika seseorang bertindak atau sebuah kebijakan yang diberlakukan secara tidak adil terhadap seseorang atau sebuah kelompok yang menghalangi individu atau kelompok individu untuk dapat bekerja, berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan atau terpenuhi hak-hak asasi nya sebagai manusia. Berdasarkan definisi tersebut, maka pendekatan anti-opresi adalah pendekatan yang menolak tindakan atau kebijakan yang tidak adil dan bahkan mengubah perilaku atau kebijakan yang tidak adil tersebut (Dominelli, 2002; Payne, 2014). Anti-oppressive merupakan teori dan praktik kunci dari profesi pekerjaan sosial dan dianggap sebagai pendekatan yang emansipatoris yang berkomitmen untuk keadilan sosial dan perubahan sosial (Wilson & Beresford, 2000).

Demikian juga yang dialami oleh populasi disabilitas, dimana pelayanan yang diberikan kepada orang dengan disabilitas masih menekankan pada gangguan fungsi anggota tubuh, patologi dan kekurangan (Amadasun, 2020). Padahal sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, Hutchinson (2019) secara jelas menerangkan bahwa orang menjadi disabilitas adalah karena kurangnya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi orang-orang dengan gangguan fungsi tubuh sehingga seharusnya yang menjadi fokus dari mayoritas pelayanan adalah menambah aksesibilitas dan penyediaan akomodasi yang layak bagi orang-orang dengan gangguan fungsi tubuh tersebut. Dengan pelayanan-pelayanan yang memusatkan perhatiannya pada upaya-upaya penambahan aksesibilitas dan akomodasi yang layak sejalan dengan prinsip pekerjaan sosial yang berusaha mengurangi ketidakadilan sosial yang dialami oleh kelompok rentan, dalam hal ini adalah populasi orang dengan disabilitas.

Clifford (1995) dalam Burke & Harrison (2002) mengembangkan prinsip-prinsip *anti-oppressive* yang menjadi dasar bagi pekerja sosial pada saat bekerja dengan kelompok rentan. Prinsip-prinsip tersebut adalah *social difference; linking personal and political; power; historical and geographical location; dan reflexivity/mutual involvement* (Burke & Harrison, 2002, p. 133). Lebih lanjut, dalam *social difference*, asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial harus memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang terjadi karena adanya kesenjangan kelompok sosial yang dominan dan mendominasi yang saling berinteraksi sehingga pemahaman dan pengalaman opresi menjadi sesuatu hal yang kompleks dan saling berhubungan (Burke & Harrison, 2002). Sementara itu, *linking personal and political* berkaitan dengan hidup seorang individu pasti berkaitan dengan konteks sosial, budaya,

ekonomi dan politik yang berlaku di tempat dan masa individu tersebut tinggal dan hidup (Burke & Harrison, 2002). Prinsip selanjutnya adalah *power*, atau kekuatan. Menurut Burke & Harrison (2002), pada praktiknya, kekuatan berada di tingkat personal dan juga struktural yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi dan psikologis. Kesemua faktor tersebut harus menjadi pertimbangan saat pekerja sosial melakukan analisa bagaimana individu-individu dan kelompok-kelompok memiliki posisi kekuatan yang berbeda-beda terhadap akses-akses sumber-sumber daya (Burke & Harrison, 2002). Prinsip *historical and geographical location* menekankan pada pemahaman bahwa pengalaman dan kejadian kehidupan seseorang terjadi dalam konteks waktu dan tempat tertentu, sehingga pengalaman dan kejadian tersebut dimaknai sesuai dengan konteks fakta sosial, perbedaan-perbedaan budaya (Burke & Harrison, 2002). Prinsip yang terakhir, adalah prinsip *reflexivity/mutual involvement*, dimana dalam prinsip ini, pekerja sosial harus mempertimbangkan bagaimana nilai, perbedaan sosial dan kekuatan yang dimiliki oleh pekerja sosial tersebut dapat mempengaruhi interaksi antar individu. Interaksi-interaksi tersebut sebaiknya tidak saja dipahami secara psikologis, tetapi juga harus dimaknai secara sosiologis, sejarah, etis dan politis (Burke & Harrison, 2002).

Penggunaan prinsip anti-oppressive dalam mengadvokasi hak-hak orang dengan disabilitas memungkinkan pekerja sosial bekerja dalam situasi yang melemahkan dan penuh dengan tantangan karena melawan arus utama yang memandang disabilitas sebagai sebuah kekurangan individual. Situasi yang melemahkan yang dialami pekerja sosial saat bekerja dengan orang dengan disabilitas diantaranya dipengaruhi oleh kebijakan lembaga tempat pekerja sosial bekerja, kondisi politik, dan bahkan juga kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang dimiliki oleh pekerja sosial tersebut (Burke & Harrison, 2002). Berdasarkan kondisi tersebut, penggunaan pendekatan anti-opresi di layanan publik masih sangat lemah, padahal struktur lembaga yang mendukung penggunaan pendekatan anti-opresi seharusnya mencoba membangun lingkungan yang aman dan penuh penghormatan bagi populasi yang termarginalisasi termasuk orang dengan disabilitas (Karabanow, 2004; Strier & Binyamin, 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang diwawancarai mayoritas memusatkan perhatiannya pada orang dengan disabilitas, dan tidak ada yang memusatkan perhatian pada bagaimana mengubah stigma dan diskriminasi terhadap populasi disabilitas. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai tempat mengembangkan diri, rehabilitasi dan pemberi bantuan bagi populasi disabilitas sehingga, populasi disabilitas menjadi objek dari kegiatan di lembaga-lembaga tersebut.

Berkaca dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa lembaga pelayanan sosial bagi orang dengan disabilitas masih bersifat rehabilitatif dan fokus pada orang dengan gangguan fungsi anggota tubuh saja, memperkuat hasil penelitian sebelumnya bahwa agar terjadi perubahan cara pandang terhadap layanan bagi orang dengan disabilitas menggunakan pendekatan anti-opresi, merupakan pekerjaan rumah yang masih jauh dari selesai. Agar dapat bekerja secara efektif, penting bagi seorang pekerja sosial untuk bekerja secara fleksibel tanpa kehilangan fokus, kemudian juga menerima cara pandang individu dan kelompok yang termarginalkan. Selain itu, penting juga bagi pekerja sosial untuk mengevaluasi dan mengubah praktik dan pemahaman-pemahaman yang berkembang saat ini serta dapat menganalisa penyebab opresi dan budaya organisasi serta dampaknya terhadap praktik pekerjaan sosial. Pekerja sosial harus selalu melakukan refleksi dan evaluasi terhadap praktik yang dilakukannya serta memiliki strategi-strategi perubahan multidimensi yang melibatkan jaringan, kerjasama serta partisipasi. Penting bagi pekerja sosial untuk memiliki kemampuan menganalisa secara kritis mengenai isu-isu kekuasaan baik itu secara personal maupun struktural.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan anti-opresi, lembaga-lembaga penyedia layanan bagi populasi disabilitas dan juga pekerja sosial yang melakukan praktik di lembaga-lembaga tersebut memiliki dasar saat bekerja dengan individu-individu yang mengalami ketidakadilan sosial, yang salah satunya adalah kelompok orang dengan disabilitas. Bersama dengan populasi disabilitas, lembaga dan pekerja sosial bekerja untuk menghapuskan stigma dan diskriminasi pada populasi disabilitas.

4 Kesimpulan

Lembaga pelayanan bagi orang dengan disabilitas dalam penelitian ini masih memusatkan perhatian pada orang dengan disabilitas saja dan menjadikan mereka sebagai target intervensi. Layanan yang disediakan lembaga-lembaga adalah rehabilitasi, terapi dan Pendidikan bagi orang dengan disabilitas. Meskipun target layanan lembaga-lembaga tersebut tercapai sesuai dengan fungsi dan tujuan pendirian lembaga, namun rehabilitasi saja tidak cukup untuk membuat orang dengan disabilitas menjadi mandiri, sehingga lembaga-lembaga pelayanan sosial bagi orang dengan disabilitas harus mengubah cara pandang mereka terhadap populasi disabilitas dan mulai memandang masyarakat umum atau orang selain orang disabilitas lah yang menjadi target intervensi dari lembaga-lembaga tersebut. Keterbatasan penelitian ini adalah pada kurang banyaknya lembaga yang menjadi lokasi penelitian, yang memungkinkan terungkapnya lembaga-lembaga lain yang menyediakan layanan selain rehabilitasi dan terapi.

Pekerja sosial sebagai salah satu profesi yang bekerja dengan kelompok rentan harus menggunakan perspektif anti-oppressive dalam memandang isu disabilitas, sehingga dapat merancang dan melakukan intervensi berupa pemberdayaan masyarakat dan pembuatan kebijakan yang menyasar pada perubahan cara pandang masyarakat umum terhadap orang dengan disabilitas. Pekerja sosial dengan cara pandang anti-oppressive akan berupaya mengadvokasikan pemenuhan hak orang dengan disabilitas dengan cara menjembatani setiap pemangku kepentingan untuk dapat menyediakan akomodasi dan aksesibilitas bagi orang dengan disabilitas sesuai dengan jenis kedisabilitas yang mereka alami. Membuat perubahan cara pandang terhadap orang dengan disabilitas menggunakan pendekatan anti-opresi masih dimungkinkan walaupun menjadi tantangan yang sangat berat bagi profesi pekerja sosial yang berjuang bersama kelompok disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dan individu.

5 Saran

Rekomendasi yang ditawarkan berdasarkan hasil temuan lapangan di antaranya adalah kepada lembaga-lembaga pelayanan agar menambah pekerja sosial untuk melakukan upaya-upaya promotif kepada masyarakat umum mengenai kondisi orang dengan gangguan fungsi tubuh menjadi disabilitas. Selain itu, lembaga-lembaga penyedia layanan bagi disabilitas juga mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk mengembangkan akomodasi yang layak bagi setiap lingkungan yang dapat menghambat kemandirian orang dengan disabilitas. Rekomendasi berikutnya adalah mengembangkan kerjasama antara pemerintah, sebagai pembuat kebijakan untuk mengembangkan, melakukan dan menyediakan akomodasi yang layak bagi setiap jenis disabilitas yang dialami oleh orang dengan gangguan fungsi tubuh. Penelitian selanjutnya mengenai kebijakan lembaga pelayanan sosial termasuk cara pandang setiap orang yang terlibat dalam pemberian pelayanan di lembaga pelayanan sosial bagi orang dengan disabilitas dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pekerja sosial yang menggunakan pendekatan anti-opresi mengalami tantangan untuk melakukan perubahan karena kebijakan lembaga yang bertentangan dengan prinsip-prinsip anti-opresi.

Ucapan terimakasih: Terima kasih kepada para Lembaga pelayanan sosial yang telah bersedia diwawancara untuk kebutuhan penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka



- Amadasun, S., & Omorogiuwa, T. B. (2020). Applying anti-oppressive approach to social work practice in Africa: reflection of Nigerians BSW students. *Journal of Humanities and Applied Social Sciences*, 2(3), 197-213.
- Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2021). Orang dengan Disabilitas: Situasi, Tantangan dan Layanan di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(3), 159-169.
- Baines, D. (2011). *Doing anti-Oppressive Practice: social Justice Social Work*, 2nd edition. Halifax and Winnipeg: Fernwood Publishing.
- Burke, B., & Harrison, P. (2002). Anti-Oppressive Practice. In R. Adams, L. Dominelli, & M. Payne, *Anti-Oppressive Practice* (pp. 131-139). Basingstoke: Palgrave MacMillan, Ltd.
- Cudd, A. (2006). *Analyzing Oppression*. New York: Oxford University Press.
- Dalrymple, J., & Burke, B. (2006). *Anti-Oppressive Practice: Social Care and the Law*. London: Open University Press.
- Dominelli, L. (2002). *Anti-Oppressive Social Work Theory and Practice*. London: Palgrave MacMillan.
- Fathimah, K., & Apsari, N. C. (2020). Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Disabilitas Fisik Dalam Mengakses Fasilitas Pelayanan Publik Ditinjau dari Activity Daily Living (Accessibility as the form of PWD Physical in Accessing the Public Service Facilities). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 120-132.
- Hutchinson, E. D. (2019). *Dimensions of Human Behavior: Person and Environment*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Isfandari, S., & Roosihermiatie, B. (2018). Higher Disability Risk Among People With Non-Communicable Disease: Riskesdas 2013 Further Analysis for People with Disability Program Development. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21(4), 254 - 260. doi:<http://dx.doi.org/10.22435/hsr.v2i4.221>
- Karabanow, J. (2004). Making Organization Work: Exploring Characteristics of anti-oppressive organization structures in street youth shelters. *Journal of Social Work*(4), 47-60.
- Luthfiyah, N. (2018). Peningkatan Peran Forum Peduli Anak Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Desa Mekarsaluyu Kabupaten Bandung. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 17(1), 55-77.
- Payne, M. (2014). *Modern Social Work Theory 4th edition*. London: Palgrave Macmillan.
- Peters, S. (2014). *Disability Culture*. Retrieved July 15, 2023, from Encyclopaedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/disability-culture>

- Riyanti, C., & Apsari, N. C. (2020). Gambaran Kebutuhan Aktualisasi Diri Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Bekerja (The Overview of Self-Actualization Need of Physical Disability Person through Employment). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 40-52.
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestics: Journal of International Studies*, 1(2), 166-176. doi:10.24198/intermestic.v1n2.6
- Setiawan, E., & Apsari, N. C. (2019). Inclusive Education: Efforts to Realize Equality and Non-Discrimination in the Education Sector for Children with Disability. *Sosio Informa*, 5(3), 188-198.
- Strier, R., & Binyamin, S. (2014). Introducing Anti-Oppressive Social Work Practices in Public Services: Rhetoric to Practice. *British Journal of Social Work*, 44, 2095-2112.
- Wilson, A., & Beresford, P. (2000). "Anti-Oppressive Practice": Emancipation or Appropriation? *British Journal of Social Work*, 30, 553-573.
- Yasin, M. I., & Apsari, N. C. (2020). Pembinaan Orang dengan Disabilitas Rungu untuk Mendapatkan Pekerjaan. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 393-405.
- Yayasan Biruku Indonesia. (n.d.). Retrieved 03 5, 2024, from <https://yayasan-biruku-indonesia.business.site/#detailsnness.site>.
- Yuk Belajar Bahasa Isyarat Indonesia Bersama Parakerja. (n.d.). Retrieved 03 12, 2024, from <https://parakerja.co.id/home/#home>.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Sistem Peringatan Dini berbasis Masyarakat di Daerah Rawan Bencana: Studi di Tiga Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Alfian Helmi ^{1*}  Nur Hannah Muthohharoh ² 

¹ Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

² Center for Sustainability and Transformative Governance, Bogor, Indonesia

* Korespondensi: alfianhelmi@apps.ipb.ac.id

Diterima: 11 Oktober 2023; Disetujui: 20 Desember 2024; Diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peringatan dini (SPD) berbasis masyarakat yang dikembangkan di daerah rawan bencana. Secara spesifik, tulisan ini menggambarkan profil bencana di lokasi studi; menganalisis bagaimana setiap komponen SPD yang dikembangkan berjalan; serta pada bagian akhir tulisan ini mengulas aspek tata kelola, komitmen pemerintah, dan perspektif inklusi dalam implementasi SPD berbasis masyarakat. Topik ini penting untuk diangkat karena pembahasan mengenai SPD berbasis masyarakat di Indonesia masih minim. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan partisipatif dengan mewawancarai sebanyak 20 informan kunci dan 6 kali *focus group discussion* (FGD) di ketiga desa di NTT, yakni Desa Bena (Kabupaten Timor Tengah Selatan), Desa Meusin (Kabupaten Timor Tengah Selatan) dan Desa Motaulun (Kabupaten Malaka). Meskipun dihadapkan pada keterbatasan akses informasi dan pemahaman teknis SPD, hasil studi menunjukkan bahwa sistem peringatan dini berbasis masyarakat yang dikembangkan di ketiga desa dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan, tentang peringatan dini dan tindakan respons yang tepat. Sayangnya, kebutuhan disabilitas, anak-anak, dan lansia belum menjadi fokus perhatian. Keberlanjutan dan pengembangan sistem ini kedepan sangat tergantung pada dukungan dari pemerintah dan kolaborasi lintas sektor di ketiga desa.

Kata kunci: bencana, banjir, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan

Abstract: This study aims to analyze a community-based early warning system (EWS) developed in disaster-prone areas in three villages in East Nusa Tenggara Province. Specifically, this paper describes the disaster profiles in the three study location villages; analyze how each EWS component developed works; as well as at the end of this paper reviews aspects of governance and government commitment in the implementation of community-based EWS. This topic is important to bring up because discussion on community-based EWS in Indonesia is still minimal. The research was conducted using qualitative methods and a participatory approach by interviewing 20 key informants and 6 FGDs in the three villages, namely Bena Village, Meusin Village, and Motaulun Village. Despite being faced with limited access to information and technical understanding of EWS, the study results show that the community-based early warning system developed in the three villages can increase community understanding, especially women, about early warning and appropriate response actions. Unfortunately, the needs of people with disabilities, children and the elderly have not been the focus of attention. The sustainability and development of this system in the future is very dependent on support from the government and cross-sector collaboration in the three villages.

Keywords: disaster, flood, early warning systems, preparedness

1. Pendahuluan

Dua kerangka aksi global Hyogo dan Sendai telah menekankan pentingnya sistem peringatan dini sebagai salah satu elemen kunci pengurangan risiko bencana (UN/ISDR, 2007; UN/ISDR, 2015). Namun demikian, Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap beragam bencana belum mampu mengembangkan sistem peringatan dini (SPD) secara optimal (Lauterjung & Letz, 2017). Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4/2022 tentang Pelaksanaan

<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk/article/view/3302>

DOI : [10.33007/ska.v14i1.3302](https://doi.org/10.33007/ska.v14i1.3302)

Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penyebaran informasi bencana masih mengandalkan media massa dan media sosial (Pasal 8), sehingga belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di daerah terpencil dan tertinggal, pengembangan SPD menghadapi tantangan yang lebih besar karena keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal sekaligus rawan bencana menghadapi kerentanan yang lebih serius.

Studi-studi sebelumnya telah menyoroti bahwa pengembangan sistem peringatan dini (SPD) di Indonesia umumnya berfokus pada aspek teknologi dan infrastruktur, seperti penggunaan system informasi berbasis digital dan perangkat keras untuk peringatan dini bencana (Kafle, 2017; Sufri et al., 2020), penggunaan IoT (Tenda et al., 2021), penggunaan arduino dan ethernet (Satria et al., 2017). Namun perhatian terhadap aspek sosial, seperti kapasitas masyarakat, jaringan sosial, dan kepercayaan publik, masih sangat minim. Kafle (2017) menegaskan bahwa SPD yang efektif memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengguna utama sistem, sementara penelitian Sufri et al. (2020) menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung fungsi SPD.

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk dalam wilayah tertinggal berdasarkan Perpres No. 63/2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Pada saat yang bersamaan, dua kabupaten ini juga merupakan wilayah yang rentan terhadap beragam jenis bencana, antara lain bencana geofisik (gempa bumi, tsunami), hidrologi (banjir, tanah longsor) meteorologi (angin kencang), dan klimatologi (kekeringan) (Bappeda TTS, 2014; Hoeppe, 2016). Kombinasi bencana hidro-meteorologi juga menjadi ancaman di wilayah NTT. Pada bulan April 2021, siklon tropis Seroja telah menghantam sebagian wilayah NTT, termasuk Kabupaten TTS dan Malaka. Badai ini menjadi pemicu terjadinya hujan dengan intensitas tinggi, petir, dan angin kencang, sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor (Pranita & Wibawa, 2021). Sebanyak 182 orang meninggal dunia dan 47 orang dinyatakan hilang dalam bencana ini (BNPB, 2021).

Tingginya ancaman bencana di wilayah terpencil dan tertinggal seperti di TTS dan Malaka mengindikasikan pentingnya SPD yang dibangun berbasiskan masyarakat. Penelitian ini menguraikan bagaimana profil bencana di ketiga desa lokasi studi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan SPD berbasis masyarakat; menganalisis bagaimana setiap komponen SPD yang dikembangkan berjalan; serta pada bagian akhir tulisan ini mengulas aspek tata kelola, komitmen pemerintah dan perspektif inklusi dalam implementasi SPD berbasis masyarakat.

Topik ini penting untuk diangkat karena pembahasan mengenai SPD berbasis masyarakat di Indonesia masih minim. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan analisis kapasitas masyarakat, tata kelola lokal, dan perspektif inklusi dalam pengembangan SPD berbasis masyarakat. Pendekatan ini berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung berorientasi pada penguatan teknologi dan infrastruktur. Studi ini juga menawarkan kerangka kerja implementasi SPD berbasis masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam konteks Indonesia. Ulasan ini bermanfaat sebagai pembelajaran dalam mengurangi risiko bencana, serta membuka diskusi kritis terhadap bagaimana membangun resiliensi masyarakat melalui pengembangan SPD berbasis masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek agar mampu mengenali kehidupan dan lingkungannya (Heron, 1996). Melalui pendekatan ini, peneliti dan masyarakat bersama-sama menemukan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan strategi triangulasi untuk menghindari kesalahan dan bias yang melekat pada suatu pengukuran (Heath, 2015). Strategi triangulasi mengembangkan desain penelitian multi metode dan memadukan berbagai teknik pengumpulan data, jenis data, dan berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa di NTT yaitu Desa Bena (Kab. TTS), Desa Meusin (Kab. TTS), dan Desa Motaulun (Kab. Malaka). Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2023, sementara pengambilan data di lapangan dilaksanakan pada 21-28 Mei 2023. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) studi literatur; 2) wawancara mendalam (*indepth interview*); 3) diskusi kelompok terarah/*Focus Group Discussion* (FGD); dan 4) observasi lapang. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahap: 1) dokumentasi; 2) konseptualisasi, koding, dan kategorisasi; 3) penyajian data; 4) penarikan kesimpulan; dan 5) refleksi (Schutt, 2018).

Wawancara mendalam dilakukan dengan 20 informan dari level desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, mencakup: 1) Kepala Desa; 2) Tim Siaga Bencana Desa; 3) tokoh agama; 4) Camat; 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat kabupaten; 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat kabupaten; 7) Dinas Sosial tingkat kabupaten; 8) Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) tingkat kabupaten dan provinsi; dan 9) LSM CIS Timor. FGD dilakukan sebanyak enam kali di tingkat komunitas dengan memisahkan partisipan laki-laki dan perempuan, meliputi: 1) Desa Bena (L: 8; P: 5); 2) Desa Meusin (L: 9; P: 6); dan 3) Desa Motaulun (L: 6; P: 5).

3. Hasil

3.1 Profil Wilayah dan Kebencanaan di Tiga Desa

Secara administrasi, Desa Bena (Kecamatan Amanuban Selatan) dan Desa Meusin (Kecamatan Boking) termasuk dalam wilayah Kabupaten TTS, sementara Desa Motaulun masuk dalam Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Kabupaten TTS merupakan salah satu kabupaten terluas di NTT, dengan luas wilayah 3.955,36 km² (BPS TTS, 2022), sementara Kabupaten Malaka dengan luas 1.160,63 km² baru terbentuk tahun 2013, merupakan pemekaran dari Kabupaten Belu (BPS Belu, 2022). Secara topografi, wilayah Kabupaten TTS dan Malaka (dan mayoritas NTT) berupa bukit-bukit dengan daratan tersebar secara sporadik, sehingga lahan pada daratan sangat terbatas (BPBD NTT, 2021). Dua kabupaten tersebut termasuk dalam kawasan DAS, yaitu DAS Noelmina dan Sub DAS Panite (sebagian wilayah TTS); serta DAS Benenai (sebagian Kabupaten Malaka). Kabupaten TTS dan Kabupaten Malaka beriklim tropis, dengan musim hujan yang pendek (Desember – Maret) dan musim kemarau yang panjang (April – November) (CIS Timor Desa Bena, et al., 2023; CIS Timor Desa Meusin, et al., 2023; CIS Timor Desa Motaulun, et al., 2023).

Tabel 1. Karakteristik Wilayah Desa Bena, Meusin, dan Motaulun

Aspek	Bena ^a	Meusin ^b	Motaulun ^c
Luas (km ²)	56,2	15,31	5,97
Ketinggian	27 - 50 mdpl	19 - 50 mdpl	<500 mdpl
DAS	DAS Noelmina & Sub DAS Panite	-	DAS Benenai
Profil risiko	Kekeringan, banjir, hama tanaman	Kekeringan, banjir, banjir bandang	Kekeringan, banjir, tsunami, angin puting beliung

a BPS TTS (2021); CIS Timor (2023b)

b BPS TTS (2021); CIS Timor (2023c)

c BPS Belu (2021); CIS Timor (2023a)

Karakteristik wilayah yang demikian menempatkan Kabupaten TTS dan Malaka sebagai wilayah yang rentan terkena bencana alam, antara lain bencana geofisik (gempa bumi, tsunami), hidrologi (banjir, tanah longsor) meteorologi (angin kencang), dan klimatologi (kekeringan) (Bappeda TTS, 2014; Hoeppe, 2016; Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka, 2021). Kombinasi bencana hidro-

meteorologi juga menjadi ancaman di wilayah NTT, yaitu terjadinya banjir dan longsor akibat badai dari siklon tropis *Seroja*, s yang terjadi pada April 2021. Kerusakan ekologis, di wilayah hulu hingga hilir, juga turut memperparah kerawanan bencana. Kerusakan hutan di NTT setiap tahun mencapai 30-40 persen, mulai 2006 hingga 2020 (BPS NTT, 2023). BPS NTT (2023) mencatat degradasi hutan lebih serius terjadi di Kab TTS, yakni dari 54.436,77 ha pada 2017 menjadi 32.242,32 ha pada 2020. Adapun karakteristik spesifik di ketiga desa lokasi penelitian ini dirangkum dalam Tabel 1.

Desa Bena dan Meusin merupakan wilayah yang dekat dengan laut, dengan ketinggian masing-masing 27-50 mdpl dan 19-50 mdpl. Sementara itu, Desa Motaulun berada di wilayah daratan yang dekat dengan sungai (*lowland river*) dengan ketinggian <500 mdpl. Tipe lahan di Desa Bena cenderung berpasir, sehingga kapasitas tanah untuk menampung air rendah. Sama halnya dengan Desa Bena, Desa Meusin juga memiliki tipe lahan yang cenderung berpasir pada wilayah yang dekat dengan laut, serta tanah berbatu pada wilayah bukit. Tanah yang berbatu juga memiliki kapasitas menampung air yang rendah. Berdasarkan identifikasi dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana di setiap desa, ketiga desa mengalami kekeringan dan banjir. Hanya di Desa Motaulun yang mengidentifikasi adanya potensi angin puting beliung (CIS Timor Desa Bena, et al., 2023; CIS Timor Desa Meusin, et al., 2023; CIS Timor Desa Motaulun, et al., 2023). Desa Bena dan Motaulun merupakan wilayah DAS. Sementara Desa Meusin yang terdiri atas wilayah dataran tinggi yang curam dan dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai pemukiman, sehingga aliran air dari dataran tinggi mengancam terjadinya banjir bandang.

3.2. Keragaman Penduduk, Mata Pencarian dan Sosial Budaya

Kabupaten TTS dan Malaka termasuk dalam daerah tertinggal menurut Perpres No. 63/2020. Beberapa indikator juga menunjukkan kedua kabupaten tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar: *pertama*, persentase penduduk miskin di kedua kabupaten masih sangat tinggi, yaitu sebesar 27,49 persen pada tahun 2020 di TTS dan 17,31 persen pada tahun 2021 di Malaka. *Kedua*, angka stunting di TTS dari 48,1% pada 2019 menjadi 28,3% pada 2022, sementara di Malaka sebesar 31,4% pada 2021. *Keempat*, angka partisipasi sekolah masih rendah, sebesar 27,61% (TTS) dan 26,69% (Malaka) penduduk usia >15 tahun yang tidak memiliki ijazah jenjang apapun, serta masih ada 11,23% (TTS) dan 1,41% (Malaka) penduduk usia >15 tahun yang buta huruf pada 2021. *Kelima*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di TTS adalah 62,15 pada tahun 2020 dan 60,42 pada 2021 di Malaka (BPS TTS, 2022) (BPS Belu (Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu), 2022).

Tabel 2. Karakteristik Penduduk, Mata Pencarian, dan Sosial-Budaya

Aspek	Bena ^a	Meusin ^b	Motaulun ^c
Populasi	6.792 (L: 3.286 P:3.506)	1.621 (L: 820 P: 801)	2.019 (L: 1.017 P: 1.002)
Ragam mata pencarian	<ul style="list-style-type: none"> • Petani (padi, palawija & hortikultura) • Peternak • PNS & honorer 	<ul style="list-style-type: none"> • Petani (palawija & hortikultura) • Peternak • Produsen Sopi • PNS & honorer 	<ul style="list-style-type: none"> • Petani (padi, palawija, & hortikultura) • Peternak • Pengrajin tenun • PNS & honorer
Etnis	<i>Timor Dawan</i>	<i>Timor Dawan</i>	<i>Timor Tetun</i>
Tipe kekerabatan	Patrilineal	Patrilineal	Matrilineal
Agama	Protestan	Protestan	Katolik

^aBPS TTS (2021); CIS Timor (2023b)

^bBPS TTS (2021); CIS Timor (2023c)

^cBPS Belu (2021); CIS Timor (2023a)

Masalah tersebut terjadi secara simultan, dan diperparah dengan ancaman bencana yang dihadapi masyarakat. Masyarakat di ketiga desa mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak (Tabel 2). Petani di ketiga desa rentan mengalami gagal tanam atau panen akibat banjir dan kekeringan, sehingga produktivitas sangat rendah. Di Desa Bena, petani menanam padi di lahan basah, sementara di lahan kering (kebun halaman rumah) ditanami jenis-jenis tanaman budidaya (jagung, ubi-ubian, dan kacang-kacangan). Di Desa Meusin, selain sebagai petani dan peternak, masyarakat juga memproduksi *Sopi* (Minuman tradisional beralkohol yang terbuat dari penyulingan lontar). Petani di Desa Meusin hanya menanam di musim penghujan saja. Di saat musim kemarau, mayoritas masyarakat Meusin memproduksi *Sopi*, beternak, dan bekerja sebagai tukang bangunan. Sementara di Desa Motalun, mayoritas masyarakat juga bekerja sebagai petani dan peternak. Sebagian perempuan di Motalun bekerja sebagai pengrajin tenun.

Dari aspek sosial-budaya, Desa Bena dan Meusin yang berada di satu wilayah kabupaten yang sama cenderung memiliki karakteristik yang mirip. Mayoritas etnis di Bena dan Meusin adalah Timor Dawan dengan sistem kekerabatan patrilineal. Sementara di Desa Motalun (dan Malaka Barat), mayoritas masyarakat berasal dari etnis Timor Tetun dan menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, garis keturunan diperoleh dan diturunkan dari/kepada perempuan. Di Desa Motalun, perempuan mendapatkan posisi yang lebih tinggi dalam adat istiadat. Kepemilikan aset/harta warisan juga diturunkan kepada perempuan. Dalam pernikahan, perempuan tidak menerima belis/mahar dari laki-laki.

3.3 Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan SPD/*community early warning system* (CEWS) pertama kali dipromosikan melalui Kerangka Aksi Hyogo/*Hyogo Framework for Action* (HFA) pada tahun 2005. HFA, yang kini dilanjutkan dengan kerangka aksi Sendai 2015-2030, mendorong masyarakat agar mampu memahami ancaman dan menerapkan cara mengatasinya (UN/ISDR, 2007). CEWS berangkat dari asumsi bahwa masyarakat perlu memberdayakan diri dan mengambil partisipasi aktif untuk mengurangi risiko bencana. CEWS juga dapat melengkapi upaya pemerintah dalam membangun resiliensi nasional (Smith et al., 2017). Meski demikian, pandangan kritis juga muncul terhadap pengembangan CEWS yang menilai bahwa CEWS adalah wujud dari ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi hak-hak masyarakat (Gladfelter, 2018).

IFRC (2012) membedakan CEWS berdasarkan bentuk keterlibatan masyarakat, yaitu masyarakat sebagai partner (*community based*) dan masyarakat sebagai pengelola (*community driven*). CEWS didefinisikan sebagai “*an effort by or with, but not for, a community to systematically collect, compile and/or analyse information that enables the dissemination of warning messages that when actionable can help the community (or others 'downstream') reduce harm or loss from a hazard (or threat) event (or process)*”. Dari definisi tersebut, CEWS merupakan suatu upaya sistematis yang dilakukan oleh atau dengan masyarakat, dalam mengumpulkan, menyusun, dan/atau menganalisis informasi menjadi pesan peringatan yang disebarkan kepada masyarakat, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tindakan tertentu untuk mengurangi bahaya atau kerugian. Macherera & Chimbari (2016) menyebutkan bahwa CEWS tidak sama dengan EWS tradisional, namun melibatkan desain yang diadopsi dari praktik yang telah diujicobakan. CEWS dapat menggunakan teknologi sederhana atau tanpa teknologi untuk menyebarkan pesan peringatan (Macherera & Chimbari, 2016).

Di ketiga desa lokasi studi, telah disepakati dan disahkan dokumen “Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir” komunitas pada April 2023. Dokumen tersebut berisi penjelasan setiap komponen SPD, termasuk panduan mendeteksi ancaman bencana, tindakan yang harus diambil, dan kesepakatan media komunikasi peringatan. Informasi Peringatan dini bencana di ketiga desa mengacu pada empat

level peringatan, yakni: Normal, Waspada, Siaga, dan Awas. Tabel 3 berikut merupakan contoh kesepakatan bentuk informasi peringatan dini yang telah dibangun di Desa Bena:

Tabel 3. Informasi Peringatan Dini yang telah disepakati di Desa Bena

Status	Indikator	Bentuk Informasi	Tindakan
Normal	Keadaan normal seperti biasa, baik itu cuaca dan juga volume air di kali atau sungai	Menginstruksikan kepada masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitasnya seperti biasa	TSBD meneruskan informasi ini kepada masyarakat dan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan lainnya
Waspada	Burung hujan mulai berbunyi, Hujan dan awan tebal lebih dari 1 hari dengan intensitas yang tinggi di bagian hulu, volume air dikali mulai naik, angin kencang, laut pasang dan gelombang tinggi (besar).	Memukul lonceng dengan 3 ketukan sebanyak 30 kali, berteriak (koa) berantai ke seluruh masyarakat terdampak	TSBD dan Masyarakat meneruskan informasi ini ke seluruh masyarakat, sambil terus waspada dan memantau kondisi Desa Bena
Siaga	Burung hujan mulai berbunyi, Hujan dan awan tebal lebih dari 2-3 hari dengan intensitas yang tinggi di bagian hulu, volume air dikali sudah meluap ke jalan, angin kencang, laut pasang dan gelombang tinggi (besar).	Memukul lonceng dengan 2 ketukan sebanyak 45 kali, berteriak (koa) berantai ke seluruh masyarakat terdampak, sambil berlari menyampaikan informasi ini ke masyarakat	TSBD dan Masyarakat meneruskan informasi ini ke seluruh masyarakat, sambil terus siaga, menyebarkan surat-surat penting di dalam Tas siaga, mulai mengumpulkan seluruh anggota keluarga di satu tempat untuk persiapan evakuasi dan memantau kondisi Desa Bena, memasang jalur evakuasi, membangun koordinasi dengan pihak lain untuk persiapan evakuasi ke tempat evakuasi
Awat	Burung hujan mulai berbunyi, Hujan dan awan tebal lebih dari 3-4 hari dengan intensitas yang tinggi di bagian hulu, volume air dikali sudah meluap ke kampung setinggi mata kaki orang dewasa, angin kencang, laut pasang dan gelombang tinggi (besar).	Memukul lonceng dengan cepat selama 5 menit, berteriak (koa) berantai ke seluruh masyarakat terdampak, sambil berlari menyampaikan informasi ini ke masyarakat	TSBD dan Masyarakat meneruskan informasi ini ke seluruh masyarakat, dengan melakukan evakuasi melalui jalur evakuasi yang telah disepakati atau dipasang, dengan mendahulukan kelompok rentan (Lansia, ibu hamil, menyusui anak-anak dan penyandang disabilitas), membangun koordinasi dengan pihak lain untuk membantu proses evakuasi.

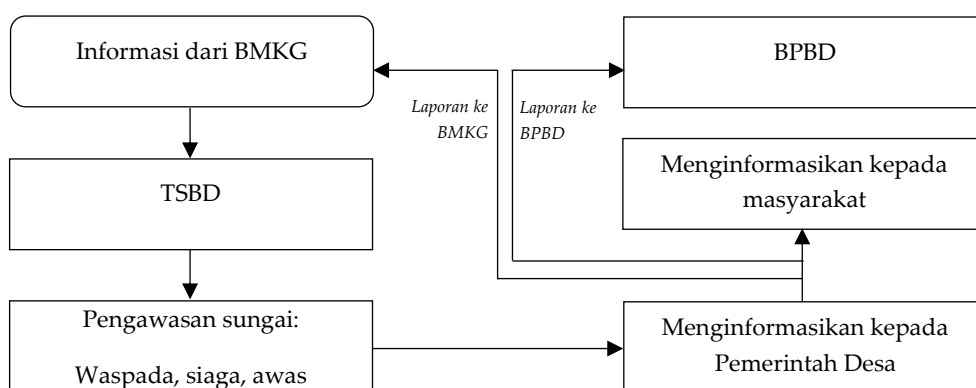
Masyarakat di ketiga desa mempraktikkan peringatan bencana secara tradisional yang disebut dengan “Koa” di Desa Bena dan Meusin (Bahasa Etnis Timor Dawan yang berarti ‘teriakan berantai’) dan “Klalak” di Desa Motaulun (Bahasa Tetun Timor Leste yang juga berarti ‘teriakan berantai’). *Koa* dan *Klalak* dipraktikkan dengan meneriakkan informasi bencana dari satu sumber, kemudian diteruskan menyebar ke seluruh masyarakat. Isi pesan *Koa* yaitu “*Auheeee, maen emat Noe Naheun!*” yang berarti “Mari berkumpul dan bersiap, banjir akan datang!”, sementara pesan dalam *Klalak* adalah “*Hoe... ambei sia imbei sia, buka fatin maran mak ass ba halibur, We sae Tian!*” yang berarti “Hei... Bapak, Ibu, cari tempat yang tinggi untuk berkumpul karena sudah banjir!”.

Selain itu, masyarakat menggunakan penanda tradisional seperti tiang listrik dengan cara dipukul-pukul (dipraktikkan di Kampung Bena dan Meusin). Namun, sebagian masyarakat menilai pemukulan tiang listrik rentan disalahpahami karena dapat menimbulkan persepsi yang berbeda,

seperti adanya pencurian atau kejadian lainnya. Peringatan tradisional yang dipraktikkan tidak melibatkan pengawasan status bahaya yang terukur, serta tidak terhubung dengan informasi peringatan bencana di tingkat kabupaten/provinsi. Hal ini berdampak pada tingginya risiko bencana yang dihadapi masyarakat. Misalnya, pada kejadian bencana *Seroja* April 2021 lalu, jumlah warga yang terdampak siklon seroja di Desa Bena sebanyak 160 KK/678 jiwa, sementara di Desa Meusin sebanyak 4 KK/16 jiwa. Kerugian yang dialami komunitas Desa Bena dan Meusin berupa kerusakan rumah, fasilitas umum, dan lahan pertanian (BPBD NTT, 2021).

Praktik peringatan bencana yang telah ada juga diperkuat dengan membuka akses informasi kebencanaan dan jejaring kolaborasi dengan stakeholder kunci hingga level kabupaten (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika/BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD). Sistem di tingkat lokal dibangun dan didokumentasikan dalam di ketiga desa yang Alur koordinasi SPD untuk bencana banjir di ketiga desa ditunjukkan pada Gambar 1. Disamping akses informasi dan pengembangan jejaring kolaborasi, di ketiga desa juga telah membentuk Tim Siaga Bencana Desa (TSBD). TSBD berfungsi untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di desa, seperti melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana, menyusun rencana aksi pengurangan risiko bencana, dan menghidupkan kembali kearifan lokal dalam rangka mengurangi risiko bencana. Untuk memperkuat TSBD, pemerintah desa berkolaborasi dengan beberapa lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat seperti Oxfam di Indonesia dan CIS Timor melalui Proyek ACT (Asia Community Disaster Preparedness and Transformation), terutama dalam menyediakan pelatihan peningkatan kesiapsiagaan bencana, termasuk pendidikan risiko bencana dan sistem peringatan dini.

Tujuan utama Proyek ACT yaitu mengurangi kerentanan masyarakat di daerah rawan bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan bencana, serta siap memimpin pertolongan dan pemulihan dengan bekerjasama dengan otoritas setempat. Dari tujuan tersebut, ada tiga fokus kerja yang dilakukan Proyek ACT yaitu: 1) peningkatan kapasitas, 2) pengurangan risiko bencana dan perlindungan aset, dan 3) berbagi pembelajaran dan pengetahuan. Ketiganya merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk mengurangi kerentanan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Pengembangan SPD menjadi salah satu indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam Proyek ACT. Untuk bersama-sama merancang dan mengembangkan SPD, Proyek ACT mendorong empat hal berikut: 1) pembentukan komite manajemen risiko bencana; 2) peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB); 3) penyusunan dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB); dan 4) memperkuat konektivitas masyarakat dan otoritas setempat. Proyek ACT mendorong masyarakat membentuk kelompok kepemimpinan PRB yang diberi nama Tim Siaga Bencana Desa (TSBD). TSBD diharapkan mampu menghubungkan masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya dalam manajemen risiko bencana. Ketiga desa telah membentuk TSBD pada tahun 2021 dan telah mendapat pengakuan formal oleh Pemerintah Desa. Agar dapat berperan dalam memimpin manajemen risiko bencana di level lokal, Proyek ACT memperkuat kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan terkait beberapa hal berikut: 1) pengurangan risiko, kesiapsiagaan, dan respon bencana; 2) komponen SPD; 3) kepemimpinan dan koordinasi; serta 4) isu dan perlindungan gender. Informan dalam studi ini menyatakan anggota TSBD telah menguasai pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan upaya PRB. TSBD juga mampu memimpin manajemen risiko bencana di tingkat desa. Disamping penguatan kapaistas aktor di level desa, Proyek ACT juga mendorong penguatan kapasitas aktor-aktor lintas sektor di level kabupaten, untuk kemudian mengembangkan konektivitas dengan aktor di tingkat desa. Penguatan kapasitas aktor lokal menjadi kunci berjalannya agenda PRB, termasuk pengembangan SPD, mengingat kapasitas lembaga penanganan kebencanaan di daerah masih rendah (Sufri et al., 2020).



Gambar 1 Alur sistem peringatan dini untuk bencana banjir

Koordinasi informasi kebencanaan dilakukan melalui grup *WhatsApp* yang berisi stakeholder terkait penanganan bencana di setiap desa, meliputi anggota TSBD, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, BMKG, dan BPBD. Informasi pantauan cuaca disampaikan oleh BMKG, kemudian ditindaklanjuti oleh Tim TSBD yang akan memantau level ketinggian air di sungai. Berdasarkan pantauan level ketinggian air, TSBD menetapkan tiga status ancaman, yaitu waspada, siaga, dan awas, yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Desa. Pemerintah Desa menginformasikan kepada masyarakat melalui *Koa/Klalak* serta melalui lonceng gereja berdasarkan status ancaman. Ancaman bencana kemudian dilaporkan kepada BMKG dan BPBD.

Studi ini menunjukkan munculnya kepatuhan terhadap peringatan dini yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas, sehingga menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat juga mampu menerapkan SPD dalam kegiatan simulasi bencana yang diselenggarakan TSBD dan Pemerintah Desa. Dalam simulasi, masyarakat telah memahami informasi peringatan dan tindakan apa yang harus diambil. Masyarakat merasa pengembangan SPD sangat membantu mengurangi risiko bencana jika dibandingkan dengan kejadian bencana *Seroja* April 2021 lalu, "*Tahun 2021, kita tidak tahu apa-apa, lalu tiba-tiba air meluap tengah malam. Kami tidak tahu harus berbuat apa*" (Peserta FGD Desa Bena).

4. Pembahasan

4.1 Komponen Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat

CEWS terdiri atas empat komponen yang saling berhubungan (UN/ISDR, 2006; IFRC, 2012), yaitu pengetahuan risiko (*risk knowledge*), pengawasan (*monitoring*), komunikasi peringatan (*warning communication*), dan kemampuan merespon (*response capability*). Memahami komponen CEWS sangat penting agar pengembangannya dapat berjalan efektif, karena selama ini masukan masyarakat belum banyak dipertimbangkan dalam pengembangan SPD (Sufri et al., 2020). Di Indonesia, perhatian terhadap pelibatan masyarakat dalam pengembangan SPD baru muncul setelah kejadian bencana, ketika pengetahuan lokal tentang smong (gelombang laut tinggi) mampu menyelamatkan penduduk di Pulau Simeulue, Aceh, pada bencana tsunami 2004 (BNPB, 2022). Pengetahuan lokal lainnya juga banyak ditemukan pada masyarakat tradisional di daerah lain, seperti di Ambon, Palu, Barus, dan masyarakat selatan Jawa, namun sayangnya pengetahuan lokal tersebut mulai memudar (BNPB, 2022). Ketiga desa dengan bantuan proyek ACT berupaya untuk memperkuat praktik tradisional dan pengetahuan lokal masyarakat dalam peringatan bencana. SPD berbasis masyarakat di ketiga desa disepakati pada April 2023 dan telah dilakukan simulasi bencana. Tulisan ini menganalisis bagaimana setiap komponen CEWS berjalan berdasarkan pengalaman masyarakat di ketiga desa ketika melakukan simulasi bencana (Tabel 4).

Pengetahuan Risiko. Ada tiga hal utama yang perlu dilakukan untuk membangun pengetahuan risiko masyarakat, yaitu pemetaan bahaya utama, kerentanan, dan keterpaparan (UN/ISDR, 2006). Dalam CEWS, informasi risiko dapat diidentifikasi dengan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pendekatan partisipatif (IFRC, 2012). Di ketiga desa yang diteliti, masyarakat telah memiliki pengetahuan yang baik terkait ancaman bahaya dan kerentanan yang dihadapi masyarakat. Ketiga desa juga telah menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) serta Peta Kerentanan dan Evakuasi secara partisipatif. Masyarakat, khususnya perempuan, merasa bahwa dengan adanya peta dapat memudahkan masyarakat untuk mengevakuasi diri.

Pengawasan. Pemantauan berkelanjutan terhadap parameter bahaya sangat penting untuk menghasilkan peringatan yang akurat secara tepat waktu (UNDP, 2018). Untuk itu, harus ada dasar ilmiah yang kuat untuk memprediksi dan memperkirakan bahaya dan sistem peramalan dan peringatan yang andal yang beroperasi 24 jam sehari (UN/ISDR, 2007). Di dalam CEWS, masyarakat tidak hanya secara pasif menerima pesan peringatan dini, namun sebagai pelaku aktif dan penggerak dalam pemantauan dan analisis ancaman bahaya (IFRC, 2012). Untuk memantau bencana lokal, masyarakat di ketiga desa tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan basis data ilmiah, sehingga integrasi dengan BMKG dapat membantu meningkatkan akurasi peringatan. Sayangnya, dalam keadaan cuaca buruk, komunitas sering mengalami gangguan sinyal, sehingga komunikasi dengan BMKG dapat terputus.

Komunikasi Peringatan. Penyebaran pesan peringatan dini berkenaan dengan apakah pesan peringatan dapat menjangkau semua kelompok “berisiko” (UN/ISDR, 2006), dapat dipahami, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua masyarakat, terutama kelompok berisiko (IFRC, 2012). Pesan peringatan dini yang efektif mencakup pesan tentang waktu, lokasi, skala, probabilitas dampak, dan respon yang perlu diambil (Smith et al., 2017). Perlu ada diversifikasi saluran pesan untuk memastikan semua masyarakat menerima pesan peringatan dini (UN/ISDR, 2006). Di ketiga desa lokasi penelitian, penggunaan *Koa/Klalak* yang sudah lama dipraktikkan sebagai media peringatan dini dapat dipahami oleh semua masyarakat. Masyarakat menyepakati adanya tambahan media penyebaran pesan yaitu menggunakan lonceng gereja. Bunyi lonceng gereja dalam jumlah tertentu menandakan status ancaman (waspada, siaga, awas). Masyarakat di ketiga desa juga telah menyusun Rencana Kontijensi untuk bencana banjir.

Tabel 4. Komponen Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat

Komponen	Indikator	Deskripsi
Pengetahuan risiko	Pengetahuan bahaya dan kerentanan	Ketiga desa telah memiliki pengetahuan yang baik terkait ancaman bahaya dan kerentanan.
	Ketersediaan data risiko	Ketiga desa telah menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana.
	Ketersediaan peta	Ketiga desa telah menyusun peta kerentanan dan evakuasi.
Pengawasan	Ketepatan pemantauan parameter	Pemantauan di tingkat komunitas terintegrasi dengan perkiraan cuaca BMKG.

Komponen	Indikator	Deskripsi
	Ketersediaan basis data ilmiah untuk membuat perkiraan	Basis data ilmiah diintegrasikan dengan BMKG sebagai pihak yang berwenang.
	Peringatan yang akurat dan tepat waktu	Integrasi data BMKG dengan pengawasan di tingkat lokal meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu peringatan. Sayangnya, komunitas sering mengalami gangguan sinyal pada cuaca buruk.
Komunikasi peringatan	Jangkauan peringatan ke seluruh kelompok berisiko	Penyebaran pesan melalui <i>Koa/Klalak</i> dan lonceng gereja dapat menjangkau seluruh kelompok berisiko.
	Peringatan dapat dipahami	Seluruh anggota masyarakat dapat memahami peran peringatan.
	Pesan peringatan dapat ditindaklanjuti	Masyarakat telah mengetahui tindakan yang harus diambil untuk merespon peringatan. Ketiga desa telah menyusun dokumen Rencana Kontijensi bencana banjir.
Kemampuan merespon	Adanya perencanaan respon peringatan	Ketiga telah menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Bencana (RPB) untuk bencana banjir, namun dokumen tersebut perlu diperbarui secara regular.
	Pemanfaatan kapasitas dan kemampuan lokal	Dalam dokumen RPB telah diidentifikasi kemampuan komunitas dalam penanggulangan bencana, namun diperlukan dukungan sumber daya dari luar komunitas.
	Kesiapan bereaksi terhadap peringatan	Kesiapan masyarakat meningkat (khususnya pada aspek pengetahuan dan keterampilan pengurangan risiko bencana), namun perlu ditingkatkan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana.

Kemampuan Merespon. Kemampuan merespon berkenaan dengan kemampuan mengambil aksi ketika mengetahui tanda bahaya (IFRC, 2012). Hal yang paling esensial untuk meningkatkan kemampuan merespon adalah pendidikan kesiapsiagaan dan penentuan rencana penanggulangan bencana yang dipraktikkan dan diuji dengan baik (UN/ISDR, 2006). Selain peningkatan pengetahuan dan keterampilan, ketiga desa juga telah menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Bencana (RPB) untuk bencana banjir dengan bantuan proyek ACT. Namun demikian, RPB tersebut perlu terus disosialisasikan kepada stakeholder terkait. RPB juga perlu diperbarui secara regular untuk merespon perubahan yang terjadi.

4.2 Ruang Inklusi dalam Pengembangan SPD

Pendekatan inklusif berakar dari konsep keadilan sosial dan partisipasi, bahwa dalam setiap proses pembangunan harus mengutamakan keadilan dalam pemenuhan hak-hak kelompok

Alfian Helmi & Nur Hannah Muthohharoh

Sistem Peringatan Dini berbasis Masyarakat di Daerah Rawan Bencana: Studi di Tiga Desa di Nusa Tenggara Timur, Indonesia

masyarakat paling terpinggirkan atau rentan (Pouw & Gupta, 2017). Partisipasi kelompok rentan menjadi kunci untuk mengintegrasikan isu, ide, pengalaman, kebutuhan, kepentingan, dan kontribusi kelompok masyarakat rentan (Perera et al., 2020). Dalam mengembangkan SPD, penting untuk disadari bahwa setiap kelompok memiliki kerentanan yang berbeda (UN/ISDR, 2006). Perempuan dan laki-laki sering kali memainkan peran yang berbeda dalam masyarakat, sehingga memiliki akses yang berbeda terhadap informasi bencana (Gartrell et al., 2020). Di samping itu, beberapa kelompok seperti anak-anak dan lansia, penyandang disabilitas juga memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda (Yıldırım, 2023).

Ketiga desa juga berkolaborasi dengan Oxfam dan CIS Timor melalui proyek ACT yang berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kepemimpinan masyarakat agar aktor lokal mampu merespon bencana skala kecil secara efektif dengan menekankan pada peran kepemimpinan transformatif perempuan dan pemuda. Untuk mencapai tujuan ini, desa telah membentuk kelompok kepemimpinan pengurangan risiko bencana (PRB) yang diberi nama Tim Siaga Bencana Desa (TSBD). Ketiga desa telah membentuk TSBD pada tahun 2021. Mayoritas anggota TSBD merupakan kalangan pemuda, dengan jumlah anggota TSBD sebanyak 25 orang, dengan rincian: a) Desa Bena: 12 laki-laki dan 13 perempuan; b) Desa Meusin: 12 laki-laki dan 13 perempuan; serta c) Desa Motaulun: 10 laki-laki dan 15 perempuan.

Masyarakat yang termasuk ke dalam kelompok rentan terhadap ancaman bencana yaitu perempuan, disabilitas, anak-anak, dan lansia. Pembentukan TSBD di ketiga desa telah membuka ruang partisipasi perempuan dalam pengembangan SPD dan mampu meningkatkan sensitifitas akan kebutuhan perempuan. Hal ini selanjutnya dapat meningkatkan efektivitas SPD, misalnya terlihat dari meningkatnya kemampuan perempuan dalam merespon bencana karena keterlibatannya dalam pengembangan peta evakuasi (Gambar 2).



Gambar 2 Konsultasi penyusunan peta evakuasi di Desa Meusin

Keterlibatan perempuan dalam TSBD merupakan transformasi yang besar bagi masyarakat, karena sebelumnya kontrol pengambilan keputusan terkait proses-proses pembangunan di dalam komunitas berada pada aktor formal yang umumnya merupakan kelompok laki-laki dan golongan tua. Mengingat bahwa budaya patriarki (khususnya di Desa Bena dan Meusin) masih mengakar kuat, pembentukan TSBD mulai menempatkan perempuan dan sebagai tokoh strategis baru dalam masyarakat, sehingga ide dan kontribusi TSBD mulai diperhatikan dan diakui. Di Desa Bena, telah muncul kepemimpinan perempuan yang memiliki kapasitas baik dalam membentuk kesadaran perempuan akan pentingnya keterlibatan kaum perempuan dalam pengembangan SPD. Di Desa Meusin, belum ada kepemimpinan perempuan yang muncul, namun keterlibatan perempuan dalam

pengembangan SPD merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan sensitifitas akan kebutuhan kelompok perempuan. Di Desa Motaulun yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, perempuan menjadi aktor penting dalam implementasi SPD. Perempuan di Desa Motaulun juga berperan dalam pengawasan tanda bahaya dan mengoordinasikannya dengan aktor lain. Usulan-usulan perempuan ini juga mulai diakomodir, misalnya dalam pengadaan TOA atau pengeras suara untuk siaga bencana yang diadakan oleh Pemerintah Desa.

Walaupun keterlibatan perempuan dalam kegiatan TSBD sudah cukup baik, berbeda kondisinya dengan keterlibatan kelompok disabilitas dalam keanggotaan TSBD. Dari beberapa wawancara dengan informan, keterlibatan kelompok disabilitas yang minim dikarenakan adanya anggapan bahwa kelompok disabilitas tidak memungkinkan terlibat secara fisik dalam kegiatan-kegiatan TSBD. Padahal, pandangan demikian justru semakin melanggengkan pengucilan, bahwa kelompok disabilitas dianggap tidak mampu berkontribusi secara aktif (King et al., 2019). Disamping itu, perhatian terhadap kebutuhan anak-anak dan lansia juga belum menjadi prioritas dalam pengembangan SPD di ketiga desa. Anak-anak biasanya akan bergantung kepada ibunya dalam merespon peringatan bencana (Shahjahan, 2018), sehingga kapasitas perempuan dalam memberikan pemahaman dan mengevakuasi anak-anak perlu ditingkatkan.

4.3 *Komitmen Pemerintah dan Tata Kelola*

Pengaturan tata kelola yang dikembangkan dengan baik dapat mendukung keberhasilan dan keberlanjutan CEWS. Pengaturan tata kelola yang efektif harus mendorong pengambilan keputusan dan partisipasi lokal, dengan menyediakan kemampuan administrasi dan sumber daya. Tata kelola yang baik didorong oleh adanya komitmen politik jangka panjang, kerangka hukum yang kuat, kapasitas institusi (pemerintah dan non-pemerintah), serta sumberdaya finansial (UN/ISDR, 2006).

Komitmen Pemerintah. Di level nasional, komitmen pengembangan SPD sebagai bagian dari agenda pengurangan risiko bencana (PRB) terus menguat. Penyediaan akses bagi seluruh warga terhadap SPD menjadi satu poin penting yang dibahas dalam forum *Global Platform for Disaster Risk Reduction* (GPDRR) ke-7 tahun 2022 di Bali. Agenda PRB (termasuk pengembangan SPD) masuk dalam salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebagai anggota PBB, Indonesia juga turut berkomitmen mengimplementasikan kerangka Sendai 2016-2030. Hal ini merupakan instrumen penerus Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015 dalam upaya pengurangan risiko bencana. Namun demikian, laporan BNPB (2022) menunjukkan bahwa implementasi kerangka aksi Sendai belum memuaskan. Sementara di level daerah, pemerintah di kedua kabupaten juga menerima mandat untuk memprioritaskan agenda PRB sebagaimana yang tertuang di RPJMN 2020-2024. Di Kabupaten TTS, pengembangan infrastruktur dasar dan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan, menempati prioritas ke-enam dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Adapun di Kabupaten Malaka, menciptakan ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa menjadi salah satu misi pembangunan tahun 2021-2026.

Kerangka hukum. Kajian BPHN (2019) menunjukkan bahwa terdapat lebih dari dua puluh undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan turunannya yang berkaitan dengan bencana. Namun, peraturan tersebut dinilai ada yang saling tumpang tindih, yang menyebabkan tidak jelasnya alur komando dan kerjasama, serta belum ada pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar stakeholder yang terkait. UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu ditinjau kembali untuk menegaskan peran BNPB sebagai penanggung jawab utama dalam penanganan bencana. Di level daerah, Pemda TTS telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten TTS No.4/2001 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sementara itu, Kabupaten Malaka belum ditemukan adanya peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Malaka.

Secara khusus dalam pengembangan SPD, pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan BNPB Nomor 4/2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai dasar hukum penerapan praktik

Alfian Helmi & Nur Hannah Muthohharoh

Sistem Peringatan Dini berbasis Masyarakat di Daerah Rawan Bencana: Studi di Tiga Desa di Nusa Tenggara Timur, Indonesia

peringatan dini bencana yang mendorong peningkatan kapasitas nasional, daerah, dan masyarakat. Peraturan ini juga menyebutkan pentingnya partisipasi berbagai lembaga dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan. Namun, peraturan tersebut belum memuat mekanisme kolaborasi dan pembagian peran antarstakeholder dalam pengembangan SPD. Peraturan BNPB 4/2022 ini juga belum mengatur mekanisme pengambilan keputusan peringatan dini di level komunitas untuk jenis bencana-bencana di level desa. Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa wewenang pengambilan keputusan peringatan bencana dilakukan oleh Kepala BNPB atau Kepala Daerah.

Kapasitas institusi. Konsep pentaheliks yang mendasari implementasi PRB mensyaratkan bahwa setiap pihak harus memiliki kapasitas yang baik. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) —Oxfam dan CIS Timor— melalui proyek ACT memiliki peran utama dalam meningkatkan kapasitas institusi, baik di level desa maupun kabupaten. Proyek ACT berupaya untuk mendorong penguatan kapasitas organisasi di level daerah untuk berkolaborasi dalam upaya PRB. Keberhasilan yang paling menonjol dari pelaksanaan Proyek ACT yaitu mulai adanya pergeseran paradigma para aktor daerah dalam upaya penanggulangan bencana, yang semula fokus pada respon darurat menjadi upaya PRB. Di Kabupaten TTS, telah terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sejak 2012. FPRB beranggotakan perwakilan dari konsep pentaheliks (pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media) yang bersifat ad hoc, memiliki program kerja selama lima tahun masa jabatan. Dari unsur pemerintah, anggota FPRB merupakan representasi dari beberapa lembaga, antara lain BPBD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Di Kabupaten Malaka, FPRB baru dibentuk pada tahun 2022 (Keputusan Bupati Malaka No. 316/HK/2022). Sayangnya, untuk aspek pengembangan SPD, BMKG sebagai aktor penting belum masuk dalam keanggotaan FPRB di kedua kabupaten. Proyek ACT berhasil membuka koordinasi aktor di level desa dengan BMKG untuk pengembangan SPD berbasis masyarakat.

Pemerintah Kabupaten TTS terlihat memiliki kapasitas organisasi yang lebih baik dibandingkan dengan Kab. Malaka, mengingat Kabupaten Malaka baru dibentuk pada tahun 2013 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Belu. Kabupaten TTS telah menyusun dokumen-dokumen kelengkapan penanggulangan bencana, antara lain Kajian Risiko Bencana (KRB) yang dipublikasikan tahun 2018 dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) untuk tahun 2019-2023. Namun demikian, peningkatan pemahaman stakeholder terhadap isi KRB dan RPB juga masih menjadi tantangan utama. KRB dan RPB Kab. TTS perlu diperbarui pada tahun 2024, namun informan menyampaikan bahwa belum ada perhatian untuk melakukan revisi KRB dan RPB sebab kendala pendanaan. Sementara di Kabupaten Malaka, Pemerintah belum menyusun dokumen-dokumen terkait PRB.

Studi ini menunjukkan bahwa BPBD sebagai penanggungjawab penanggulangan bencana masih menghadapi permasalahan struktural dan keterbatasan kapasitas sumber daya (sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur). Secara struktural, BPBD membantu Bupati dalam mengoordinasikan sumber daya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya untuk urusan penanggulangan bencana. Koordinasi antar SKPD bertujuan untuk menyelaraskan agenda pembangunan dan efisiensi sumber daya. Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka kapasitas pemimpin dan sumber daya manusia di dalam institusi menjadi hal krusial. Sayangnya, studi ini menunjukkan bahwa posisi manajemen puncak di lembaga BPBD dan SKPD terkait lainnya sering mengalami mutasi yang diakibatkan pergolakan politik di daerah. Mutasi jabatan memengaruhi berjalannya agenda PRB, karena pemahaman terhadap PRB perlu dibangun ulang, sebagaimana yang disampaikan informan “Beberapa teman yang koordinasinya sudah jalan, tiba-tiba dimutasi, muncullah orang baru yang pemahamannya kembali kedaruratan” (BPBD Kab TTS).

Sumberdaya Finansial. Sebagai salah satu prioritas pembangunan, maka pendanaan agenda PRB, termasuk pengembangan SPD, dapat bersumber dari APBN dan APBD. Namun demikian, peran

APBD di kedua kabupaten untuk pembiayaan PRB secara khusus masih terbatas, karena kedua kabupaten masih berfokus pada penyelesaian masalah mendasar, seperti kemiskinan, pendidikan, stunting, dan permasalahan kesehatan lainnya. Paradigma aktor pemerintah dalam penanganan bencana yang awalnya masih pada aspek kedaruratan juga turut mengakibatkan minimnya sensitifitas penganggaran agenda PRB. Meskipun dalam porsi kecil, PRB telah diakomodir dalam program kerja setiap SKPD yang sudah berjalan. Ketiga desa lokasi studi telah menyusun RPB desa, namun pembiayaannya belum masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Agar RPB desa dapat dimasukkan dalam RKPD dan APBD, maka RPB perlu didiskusikan dan diusulkan melalui Musrenbangdes, sesuai dengan alur penetapan rencana kerja daerah (UU 24/2004; Permendagri No 114/2014).

Ketiga desa telah menyusun agenda PRB dalam rencana kerja dan anggaran desa. Ketiga desa telah mengalokasikan Dana Desa untuk penanganan bencana, namun belum secara tertulis masuk dalam dokumen rencana kerja desa. Sayangnya, anggaran tersebut masih berupa dana tanggap darurat dan belum mengakomodir upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Padahal, kerangka hukum pemanfaatan dana desa untuk PRB telah diatur dalam Kepmendesa PDTT No 71/2021. Kepmen ini memberikan panduan bagi desa untuk melaksanakan program pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Informan di ketiga desa menyebutkan telah mengetahui bahwa dana desa dapat dialokasikan bukan hanya untuk aspek tanggap darurat saja. Namun, informan juga menyatakan belum menguasai pemahaman tentang bagaimana mengalokasikan dana desa untuk aspek pencegahan/mitigasi dan kesiapsiagaan.

Selain bersumber dari negara dan OMS, sektor swasta dan lembaga keuangan juga diharapkan mendukung pembiayaan PRB. Namun, masyarakat di ketiga desa belum mampu mengakses pendanaan dari sektor swasta dan lembaga keuangan. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan hal ini, *pertama* paradigma penanganan bencana yang masih berfokus pada aspek kedaruratan. Ini terlihat misalnya ketika terjadi bencana Seroja pada April 2021. Beberapa perusahaan dan lembaga perbankan memberikan bantuan teknis kepada korban bencana. *Kedua*, berkaitan dengan faktor pertama, ada kecenderungan munculnya ego sektoral agar partisipasinya dapat dilihat secara konkret pada saat kondisi tanggap darurat. *Ketiga*, peluang pendanaan dari dua lembaga tersebut cenderung rendah. Di Kabupaten TTS, tercatat ada 428 perusahaan industri pengolahan yang beroperasi pada tahun 2021 (terdiri atas 218 industri besar/sedang, 69 industri kecil, dan 141 industri kerajinan rumah tangga), dengan kontribusi terhadap PDRB yang sangat rendah, yaitu sebesar 0,6% ((BPS TTS, 2022). Sementara di Kabupaten Malaka, jumlah perusahaan industri pengolahan tahun 2021 mencapai lebih dari 3000 perusahaan, namun didominasi skala kecil dan mikro (97%) (BPS Belu (Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu, 2022).

5. Kesimpulan

Berdasarkan studi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketiga desa memiliki profil bencana yang berbeda-beda, walaupun hampir sebagian besar dilanda banjir dan kekeringan yang ekstrim. Informasi ini penting untuk megidentifikasi potensi risiko bencana yang mungkin timbul. Untuk mengatasi ragam potensi bencana tersebut, masyarakat di ketiga desa telah mengembangkan system peringatan dini berbasis masyarakat. Sistem peringatan dini berbasis masyarakat itu meliputi: pengetahuan risiko (*risk knowledge*), pengawasan (*monitoring*), komunikasi peringatan (*warning communication*), dan kemampuan merespon (*response capability*). Meskipun dihadapkan pada keterbatasan akses informasi dan pemahaman teknis SPD, hasil studi menunjukkan bahwa sistem peringatan dini berbasis masyarakat yang dikembangkan di ketiga desa dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peringatan dini dan tindakan respons yang tepat. Keberlanjutan dan pengembangan sistem ini kedepan sangat tergantung pada dukungan dari pemerintah dan kolaborasi lintas sector di ketiga desa.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi bencana di wilayah studi, evaluasi kinerja komponen SPD dan perspektif inklusi dalam pengembangan SPD, serta memberikan gambaran mengenai peran serta pemerintah dalam implementasi SPD berbasis masyarakat. Kesimpulan ini memberikan dasar untuk rekomendasi dan perbaikan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan efisiensi dan dampak positif dari sistem peringatan dini berbasis masyarakat di desa-desa terpilih.

Namun demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. *Pertama*, cakupan penelitian yang hanya melibatkan tiga desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Malaka mungkin tidak sepenuhnya mewakili karakteristik wilayah rawan bencana lainnya di Indonesia. Hasil penelitian ini perlu diuji ulang di daerah lain dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis yang berbeda untuk memastikan validitasnya dalam skala yang lebih luas. *Kedua*, keterlibatan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia, dalam pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini (SPD) berbasis masyarakat masih terbatas, yang dapat memengaruhi efektivitas dan inklusivitasnya. *Ketiga*, pengembangan SPD masih sangat bergantung pada dukungan eksternal dari lembaga non-pemerintah, sehingga keberlanjutan program tanpa intervensi pihak luar belum terjamin sepenuhnya.

6. Saran

Penelitian di masa depan disarankan untuk memperluas cakupan studi ke wilayah lain dengan risiko bencana yang berbeda untuk memperkuat generalisasi hasil. Selain itu, pendekatan yang lebih inklusif perlu dikembangkan untuk melibatkan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan SPD. Pemerintah dan lembaga pendukung disarankan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui pelatihan dan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan SPD. Studi longitudinal juga diperlukan untuk mengevaluasi keberlanjutan SPD berbasis masyarakat, termasuk mekanisme adaptasi terhadap perubahan risiko bencana dan keberlanjutan finansial program. Akhirnya, pengembangan kerangka kerja inklusif yang mengintegrasikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat dalam SPD sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam pengurangan risiko bencana di masa depan.

Ucapan terimakasih: Ucapan terima kasih untuk Kepala Desa serta masyarakat di Desa Bena, Meusin dan Motaulun. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Oxfam di Indonesia yang telah mengimplementasikan proyek ACT di ketiga desa.

Daftar Pustaka

- Bappeda TTS. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- BNPB. (2021). Bencana Cuaca Ekstrem Nusa Tenggara Timur: Resiliensi, 1, 2.
- BNPB. (2022). Laporan Interim Tinjauan Tengah Waktu Pelaksanaan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana.
- BPBD NTT. (2021). Laporan Situasi Bencana Siklon Tropis Seroja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- BPHN. (2019). Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kebencanaan.

- BPS Belu (Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu). (2022). Kabupaten Malaka Dalam Angka 2022.
- BPS NTT. (2023). Luas Hutan Lindung Menurut Kabupaten/Kota (Hektar), 2017-2022.
- BPS TTS. (2022). Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka 2022.
- CIS Timor, Pemerintah Desa Bena, & Oxfam Indonesia. (2023). Kajian Risiko Bencana dan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Desa Bena.
- CIS Timor, Pemerintah Desa Meusin, & Oxfam Indonesia. (2023). Kajian Risiko Bencana dan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Desa Meusin.
- CIS Timor, Pemerintah Desa Motaulun, & Oxfam Indonesia. (2023). Kajian Risiko Bencana dan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Desa Motaulun.
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka. (2021). Review Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) 2017-2021.
- Gartrell, A., Calgaro, E., Goddard, G., & Saorath, N. (2020). Disaster experiences of women with disabilities: Barriers and opportunities for disability inclusive disaster risk reduction in Cambodia. *Global Environmental Change*, 64, 102134.
- Gladfelter, S. (2018). The Politics of Participation in Community-Based Early Warning Systems: Building Resilience or Precarity Through Local Roles in Disseminating Disaster Information?
- Heath, L. (2015). Triangulation: Methodology. In *international encyclopedia of the social & behavioral sciences* (pp. 639–644). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.44059-6>.
- Heron, J. (1996). Co-operative inquiry: Research into the human condition. *Co-Operative Inquiry*, 1–240.
- Hoeppe, P. (2016). Trends in weather related disasters—Consequences for insurers and society. *Weather and Climate Extremes*, 11, 70–79.
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). (2012). *Early Warning Early Action: A Regional Guideline for Effective Engagement*.
- Kafle, S. K. (2017). Disaster early warning systems in Nepal: Institutional and operational frameworks. *Journal of Geography & Natural Disasters*, 7(2), 2167–2587.
- King, J., Edwards, N., Watling, H., & Hair, S. (2019). Barriers to disability-inclusive disaster management in the Solomon Islands: Perspectives of people with disability. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 34, 459–466.
- Lauterjung, J., & Letz, H. (2017). 10 years Indonesian tsunami early warning system: Experiences, lessons learned and outlook.
- Macherera, M., & Chimbari, M. J. (2016). A review of studies on community based early warning systems. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 8(1).
- Perera, D., Agnihotri, J., Seidou, O., & Djalante, R. (2020). Identifying societal challenges in flood early warning systems. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 51, 101794.

- Pouw, N., & Gupta, J. (2017). Inclusive development: a multi-disciplinary approach. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 24, 104–108.
- Pranita, E., & Wibawa, S. W. (2021). 3 Faktor Penyebab Cuaca Ekstrem dan Banjir di NTT, BMKG Jelaskan. *Kompas.Com*.
- Satria, D., Yana, S., Munadi, R., & Syahreza, S. (2017). Sistem peringatan dini banjir secara real-time berbasis web menggunakan arduino dan ethernet. *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, 1(1), 1-6.
- Schutt, R. K. (2018). *Investigating the social world: The process and practice of research*. Sage publications.
- Shahjahan, M. (2018). Assessing the cyclone early warning services of women, children and person with disability: a case study in Nijhumdwip. <http://dspace.bracu.ac.bd/xmlui/handle/10361/10214>
- Smith, P. J., Brown, S., & Dugar, S. (2017). Community-based early warning systems for flood risk mitigation in Nepal. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 17(3), 423–437.
- Sufri, S., Dwirahmadi, F., Phung, D., & Rutherford, S. (2020). Enhancing community engagement in disaster early warning system in Aceh, Indonesia: opportunities and challenges. *Natural Hazards*, 103(3), 2691–2709.
- Tenda, E. P., Lengkong, A. V., & Pinontoan, K. F. (2021). Sistem Peringatan Dini Banjir Berbasis IoT dan Twitter. *CogITo Smart Journal*, 7(1), 26-39
- UNDP. (2018). Five approaches to build functional early warning systems. https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/resources/undp_brochure_early_warning_systems.pdf
- UN/ISDR. (2006). Developing Early Warning System: A Checklist. <https://www.unisdr.org/2006/ppew/info-resources/ewc3/checklist/English.pdf>
- UN/ISDR. (2007). Hyogo framework for action 2005-2015: building the resilience of nations and communities to disasters. http://www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf
- UN/ISDR. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>
- Yıldırım, S. D. (2023). Integrated disaster management experience of people with disabilities: A phenomenological research on the experience of people with orthopedic disabilities in Türkiye. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 88, 103611.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

Muslim Sabarisman^{1*}  Muhammad Belanawane Sulubere²  Johan Arifin¹ 

- 1 Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas, BadanRiset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia
- 2 Pusat Riset Kebijakan Publik, BadanRiset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia

* Korespondensi: sleem.ndr@gmail.com ; Tel: +62-8129-643-0470

Diterima: 1 Oktober 2024; Disetujui: 20 Desember 2024; Diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstrak: Artikel ini mengkaji kontribusi intervensi berbasis kewirausahaan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan jaringan sosial bagi penerima program bantuan sosial transfer bersyarat Indonesia, Program Keluarga Harapan. Melalui studi kasus pada Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di Kabupaten Mojokerto, digunakan metode kualitatif dengan data yang dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan tinjauan dokumentasi dari penerima manfaat, pendamping sosial, dan dinas pemerintah daerah. Temuan menunjukkan bahwa ProKUS berhasil mendorong peningkatan relatif pendapatan keluarga melalui berbagai kegiatan usaha mikro seperti produksi sepatu dan penjualan makanan keliling. Selain itu, interaksi dalam komunitas kewirausahaan ini memperkuat jaringan sosial di kalangan penerima manfaat, menciptakan solidaritas dan saling dukung yang merupakan faktor penting bagi keberhasilan usaha. Akan tetapi terdapat beberapa tantangan dalam implementasi ProKUS, di antaranya keterbatasan modal, kurangnya keterampilan kewirausahaan, dan kendala akses teknologi. Studi ini merekomendasikan peningkatan akselerasi model peningkatan pendapatan KPM PKH melalui model kewirausahaan dengan pelatihan usaha yang lebih relevan, akses modal yang berkelanjutan, dan kemudahan izin administrasi usaha. Dengan mengatasi tantangan ini dan memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas usaha lokal, ProKUS berpotensi menciptakan keluaran ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat PKH menuju keamanan finansial yang merupakan prasyarat vital bagi *upward mobility*.

Kata kunci: Kewirausahaan, kewirausahaan sosial, kemandirian ekonomi, jaringan sosial

Abstract: This article examines the contribution of entrepreneurship-based interventions in increasing economic independence and social networks for recipients of Indonesia's conditional cash transfer program, the Program Keluarga Harapan. Through a case study of the Social Entrepreneurship Program (ProKUS) in Mojokerto Regency, a qualitative method was used with data collected through in-depth interviews, field observations, and documentation reviews from beneficiaries, programme's assistants, and local government agencies. The findings show that ProKUS has succeeded in encouraging a relative increase in family income through various micro-enterprise activities such as shoe production and mobile food sales. In addition, interactions within this entrepreneurial community strengthen social networks among beneficiaries, creating solidarity and mutual support which are important factors for business success. However, there are several challenges in implementing ProKUS, including limited capital, lack of entrepreneurial skills, and obstacles to accessing technology. This study recommends increasing the acceleration of the PKH KPM income-increasing model through an entrepreneurship model with more relevant business training, sustainable access to capital, and ease of business administration permits. By addressing these challenges and strengthening synergies between the governments, private sector, and local business communities, ProKUS has the potential to create sustainable economic and social outcomes for PKH beneficiary families towards financial security, a vital preconditions for *upward mobility*.

Keywords: Entrepreneurship, social entrepreneurship, economic independence, social networks

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah kondisi ketidakcukupan penduduk memenuhi kebutuhan primer yang disebabkan oleh pengeluaran per kapita perbulannya masih di bawah garis kemiskinan (Ardi Adji, Taufik Hidayat, Hendratno Tuhiman, Sandra Kurniawati, 2020). Ini mencakup pendapatan untuk kebutuhan hidup, akses ke hak dasar, keadilan dalam perlakuan hukum, kesetaraan gender, dan kehidupan yang beradab serta bermartabat (International, 2023). Namun demikian, kemiskinan bukan hanya sekadar kekurangan harta benda, tetapi juga mencakup hilangnya kesempatan dan akses ke layanan vital. Kemiskinan memiliki aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang saling terkait dan dapat secara signifikan memengaruhi kualitas hidup seseorang (Laurens & Putra, 2020).

Masalah kesenjangan ekonomi menjadi isu global yang belum dapat diatasi sepenuhnya oleh banyak negara dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Mengatasi masalah ini, konsep Negara Kesejahteraan diperkenalkan. Konsep ini mencerminkan peran aktif pemerintah dalam melindungi dan memperjuangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi setiap warga negara (Dekki & Dody, 2022). Negara Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya (Pierson, 1998).

Negara Kesejahteraan menghendaki pemerintah bukan hanya sekadar memelihara ketertiban hukum, tetapi juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya (Svallfors, 2007). Lebih lanjut Svallfors menjelaskan, kesejahteraan mencakup banyak bidang, dimana program pemerintah dijalankan memastikan semua warga mendapatkan akses ke sumber daya yang cukup untuk menjalani kehidupan yang layak. Peran institusi, keterbelahan sosial, dan orientasi budaya perlu dipertimbangkan dalam pembentukan dan keberlanjutan program mengatasi kemiskinan. Svallfors melihat besarnya pengaruh sistem politik dan distribusi kekuasaan terhadap kebijakan kesejahteraan, dampak perbedaan sosial terhadap pandangan publik, serta bagaimana nilai-nilai budaya memengaruhi legitimasi dan popularitas program-program kesejahteraan sosial.

Alkire & Santos (Alkire & Santos, 2014), membagi kemiskinan menjadi dua jenis: kemiskinan primer (primary poverty) dan kemiskinan sekunder (secondary poverty). Kemiskinan primer adalah situasi di mana pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, sedangkan kemiskinan sekunder terjadi ketika pendapatan sebenarnya cukup, tetapi tidak digunakan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diperlukan pendekatan pemberdayaan ekonomi pada kemiskinan jenis ini melalui usaha ekonomi produktif dengan tetap menguatkan ikatan sosial.

Salah satu yang didorong dalam kerangka pemberdayaan ekonomi dengan menguatkan ikatan sosial adalah konsep kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial telah muncul sebagai bidang dinamis yang memanfaatkan kekuatan inisiatif kewirausahaan untuk mendorong perubahan sosial yang positif dan pembangunan berkelanjutan (Boffa et al., 2023). Kewirausahaan sosial semakin mendapat perhatian dari para akademisi, pembuat kebijakan, dan organisasi pembangunan sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan yang kompleks (Chundu et al., 2022) (Bansal et al., 2019). Ini melibatkan penerapan prinsip dan strategi kewirausahaan yang inovatif untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang menciptakan nilai sosial, daripada hanya mengejar maksimalisasi keuntungan (Shaw & Carter, 2007). Konsep kewirausahaan sosial berasal dari berbagai disiplin ilmu, termasuk kewirausahaan, sosiologi, dan studi pembangunan. Kewirausahaan sosial sering kali dicirikan sebagai bentuk kewirausahaan yang mengutamakan dampak sosial

daripada keuntungan finansial. Kewirausahaan sosial didorong oleh misi untuk menciptakan perubahan sosial yang positif, dan mereka memanfaatkan pendekatan kewirausahaan untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks (Iyengar, 2014).

Kewirausahaan sosial merupakan pendekatan inovatif yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, program kewirausahaan sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Melalui kolaborasi, inovasi, dan partisipasi aktif, kewirausahaan sosial tidak hanya menciptakan peluang ekonomi tetapi juga memperkuat jaringan sosial di dalam komunitas.

Pertama, kewirausahaan sosial dapat berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut Darwis et al., kewirausahaan sosial bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan melalui aktivitas ekonomi yang berkelanjutan (Darwis et al., 2021). Selain itu, penelitian oleh Hasanah menunjukkan bahwa program kompetisi proyek sosial di perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya mandiri secara ekonomi tetapi juga peka terhadap isu sosial, yang pada gilirannya dapat memperkuat ikatan sosial di antara mereka (Hasanah & Setiaji, 2019). Dengan demikian, program kewirausahaan sosial yang terstruktur dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan solidaritas di antara individu.

Kedua, inovasi sosial yang dihasilkan dari kewirausahaan sosial dapat mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bekerja sama. Siregar & Yusri menekankan bahwa kewirausahaan sosial berfungsi sebagai bentuk inovasi sosial yang dapat memperbaiki sistem yang ada di masyarakat (Siregar & Yusri, 2021). Melalui pendekatan ini, individu didorong untuk berkolaborasi dalam menciptakan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Wibowo et al. juga mencatat bahwa inovasi sosial dalam praktik kewirausahaan sosial dapat membantu menyelesaikan masalah sosial yang kompleks dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Wibowo et al., 2021).

Ketiga, pendidikan kewirausahaan sosial memainkan peran penting dalam membangun kesadaran dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan ikatan sosial yang kuat. Wijayanti et al. menunjukkan bahwa pendekatan design thinking dalam pendidikan kewirausahaan sosial dapat membantu mahasiswa memahami dan menerapkan konsep kewirausahaan sosial secara efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan sosial (Wijayanti et al., 2022). Selain itu, penelitian oleh Rahadi menyoroti pentingnya usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mendukung kewirausahaan sosial, yang dapat memperkuat jaringan sosial di tingkat lokal (Rahadi, 2017).

Keempat, tantangan dalam implementasi kewirausahaan sosial juga perlu diperhatikan. Penelitian oleh Reindrawati menunjukkan bahwa kurangnya dukungan dari pemerintah dan sumber daya yang terbatas dapat menghambat pengembangan kewirausahaan sosial di masyarakat (Reindrawati & Sos, 2017). Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi inisiatif kewirausahaan sosial agar dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan ikatan sosial.

Kementerian Sosial mengadopsi pendekatan kewirausahaan sosial melalui berbagai inovasi pemberdayaan sosial di samping perlindungan dan jaminan sosial. Kemandirian rumah tangga miskin dapat dicapai jika penerima bantuan memiliki jiwa kewirausahaan sekaligus solidaritas sosial. Berdasarkan pendekatan kewirausahaan sosial ini, Kementerian Sosial melaksanakan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk kewirausahaan sosial melalui Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS). Program ini bertujuan menciptakan kemandirian serta memutus ketergantungan keluarga miskin dan rentan terhadap bantuan sosial yang tercantum dalam Kepdirjendayasos Nomor 651/045.3/KPTs/10/2021 (Nadila, 2022). ProKUS merupakan program yang menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah graduasi atau keluar dari Program Keluarga Harapan (PKH) agar terbentuk kemandirian secara ekonomi sehingga mereka tidak kembali miskin.

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere & Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

Program ini berfokus pada pemberdayaan keluarga miskin dan rentan dengan menggabungkan kegiatan bisnis dan sosial untuk mengatasi masalah sosial. ProKUS diluncurkan pada tahun 2020 sebagai pilot project dengan 1.000 KPM, terutama mereka yang lulus dari PKH. ProKUS memiliki tiga komponen yang disebut *Triple Power*, yaitu Bantuan Sosial Insentif Modal Usaha (BSiMU), Inkubasi Mentoring Bisnis (IMB) dan pendampingan sosial. Pendampingan usaha dilakukan Kemensos bekerja sama dengan Oorange Unpad, Politeknik Negeri Semarang (Polines), ZFN Agape Indonesia (Titipku), dan Bina Swadaya, dan juga melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pendamping sosial dari Kementerian Sosial (Desi Purnamawati, 2020). Program bertujuan untuk menciptakan kemandirian serta memutus ketergantungan keluarga miskin dan rentan terhadap bantuan sosial (Nadila, 2022). Dengan demikian, ProKUS menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu individu atau kelompok dalam meningkatkan pendapatan dan menciptakan hubungan sosial yang lebih kuat di komunitas mereka.

Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) hadir sebagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pengembangan usaha kecil yang mandiri dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menyediakan dukungan finansial, pelatihan kewirausahaan, dan akses jaringan sosial yang lebih luas (Subekti et al., 2022). Melalui pelatihan ProKUS, penerima manfaat tidak hanya memahami konsep dasar kewirausahaan tetapi juga mengalami peningkatan keterampilan perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan pemasaran, yang mendorong mereka untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan sosial (paringsih et al., 2023). Dengan partisipasi dalam kegiatan kelompok seperti koperasi dan kelompok kerajinan, penerima manfaat dapat memperluas jaringan sosial mereka dan memperoleh dukungan dari sesama anggota komunitas (Seraj et al., 2022).

Dalam pelaksanaannya, ProKUS masih menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan modal dan sumber daya, kurangnya keterampilan kewirausahaan, dan kendala regulasi menjadi hambatan yang mempengaruhi keberhasilan program (Wahyuni et al., 2022). Mayoritas penerima manfaat belum mengoptimalkan strategi pemasaran dan kemasan produk, sehingga keberlanjutan usaha sosial mereka masih memerlukan dukungan dan bimbingan lebih lanjut (Utomo et al., 2023). Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dari pemerintah dan lembaga terkait, termasuk dukungan finansial berkelanjutan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan penerima manfaat, ProKUS berpotensi menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat.

Diharapkan dari artikel penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kontribusi Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan hubungan sosial di kalangan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih dalam tentang dampak ProKUS pada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi penerima manfaat, serta menyajikan rekomendasi untuk optimalisasi program. Hasil penelitian ini juga diharapkan membantu pemangku kepentingan dalam merancang strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung masyarakat yang rentan.

2. Metode

Penelitian deskriptif ini dilaksanakan pada tahun 2022 di Kecamatan Sooko dan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, untuk mengevaluasi kontribusi Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan membangun hubungan sosial berkelanjutan bagi penerima manfaat. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam,

observasi, studi dokumentasi, dan tinjauan literatur. Partisipan penelitian meliputi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), investor, tenaga kesejahteraan sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan pemangku kepentingan lainnya.

Data dianalisis secara tematik, mengidentifikasi kontribusi ProKUS terhadap peningkatan pendapatan dan hubungan sosial, serta mengevaluasi peluang dan tantangan program ini. Analisis mendalam juga melibatkan triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan. Hasilnya memetakan pengaruh ProKUS dalam mengatasi kemiskinan melalui kewirausahaan dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan program di masa depan. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan dari Dinas Sosial 3 orang, termasuk penerima manfaat 6 orang, investor 2 orang, TSKS 2 orang, pendamping PKH 2 orang, dan satu orang dari instruktur pusat inkubasi, untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.

Observasi lapangan dalam penelitian ini membantu memahami pelaksanaan program kewirausahaan dan partisipasi masyarakat secara langsung. Analisis studi dokumentasi dan literatur memperkuat hasil dengan data sekunder yang relevan. Data yang dikumpulkan dianalisis mendalam untuk melihat dampak Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) terhadap pendapatan dan hubungan sosial penerima, serta menghasilkan rekomendasi peningkatan program. Sesuai (Denzin & Lincoln, 2011), penelitian kualitatif memerlukan pemahaman yang mendalam, dengan partisipasi aktif dari responden.

Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskrip dan diorganisir, kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan pola dan tema penting. Validitas temuan diperkuat dengan triangulasi data, membandingkan hasil dari berbagai sumber. Analisis sistematis ini menyoroti dampak ProKUS dalam meningkatkan pendapatan dan relasi sosial penerima manfaat, serta mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi program. Temuan ini juga memberikan dasar rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program ke depannya.

3. Hasil

3.1 Implementasi Program Kewirausahaan di Mojokerto

ProKUS merupakan inisiatif pemberdayaan sosial yang berfokus pada keluarga miskin dan berpendapatan rendah. Program ini menggabungkan kegiatan komersial dan sosial serta solusi bisnis terhadap permasalahan sosial dan ekonomi. Implementasi ProKUS dimulai pada tahun 2020 dan memberikan bantuan kepada 1.000 kelompok sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi. Jumlah KPM yang diberikan modal pada tahun 2021 bertambah menjadi 8.000, dimana 7.000 merupakan KPM PKH saat ini dan 1.000 merupakan KPM tahun lalu.

ProKUS dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos), dengan dukungan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan konsultan bisnis Inkubator Bisnis. Pada tahun 2021, terdapat 27 inkubator bisnis yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia (itsdrpm, 2021). Pemerintah berperan penting dalam mendukung kewirausahaan, termasuk menyediakan dana untuk mendukung kegiatan kewirausahaan. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan usaha dalam bentuk produk atau perlengkapan usaha, seperti peralatan produksi, perlengkapan usaha, materi promosi atau perlengkapan lainnya.

Berbisnis untuk kepentingan sosial dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan masyarakat lokal terhadap kemampuan mereka untuk mandiri secara ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung kewirausahaan sosial dengan menyediakan layanan pendampingan. Ini dicapai melalui program pelatihan dan mentoring yang membantu usaha sosial mengembangkan dan meningkatkan kemampuan bisnis mereka. Selain itu, pemerintah dapat memberikan izin kepada investor dan pemberi pinjaman untuk mendukung usaha kewirausahaan sosial. Ini akan membuat mereka lebih mudah mendapatkan uang. Dengan membantu pelaku usaha sosial menemukan pasar untuk barang mereka dan membangun hubungan antara pemilik usaha dan calon pembeli, pemerintah juga berperan penting dalam memfasilitasi akses pemasaran.

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere & Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

Program ProKUS Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Malang, dan Mojokerto di Provinsi Jawa Timur. Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif (ILBI) ITS, Inkubator UPN Veteran Surabaya, Inkubator Universitas Brawijaya, dan BPBRIN (Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi) Universitas Airlangga adalah beberapa mitra inkubator yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melaksanakan Program Kewibawaan. Di Kabupaten Mojokerto, program dilaksanakan dengan memberikan dukungan kepada keluarga penerima manfaat.

Inkubator bisnis atau kewirausahaan adalah kelompok kewirausahaan sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ini termasuk ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sanitasi, antara lain. Ketika pengusaha atau pemerintah mengorientasikan operasi mereka untuk menciptakan nilai sosial, ide tentang wirausaha sosial muncul. (Al-Mubarak & Busler, 2013) Inkubator bisnis dapat menjadi alat yang berharga untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Pemerintah dan organisasi lain harus mendukung pengembangan dan perluasan program inkubasi bisnis. Selanjutnya dalam artikelnya menunjukkan bahwa inkubator bisnis dapat memainkan peran penting dalam mendukung kewirausahaan dan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik untuk inkubasi bisnis di berbagai konteks.

Inkubator bertindak sebagai mentor bagi perusahaan dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan Kementerian Sosial. Tujuannya adalah untuk memberi penerima manfaat kesempatan untuk menggunakan pengetahuan yang terkandung dalam pedoman teknis perusahaan, seperti menghitung biaya, menentukan harga jual, dan mendapatkan saran. Dalam industri pemasaran Pemerintah Kota Mojokerto menawarkan inkubator bisnis untuk membantu pemulihan ekonomi warga yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan membantu penerima bantuan sosial yang memiliki pendapatan terbatas dapat mandiri secara finansial.

Sejak 2021, Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di Kabupaten Mojokerto telah memberikan bantuan modal usaha kepada 285 KPM PKH aktif yang memiliki rintisan usaha, diprioritaskan berusia di bawah 40 tahun. Jenis usaha yang didukung meliputi produksi makanan dan minuman, kerajinan tangan, industri kecil serta perdagangan eceran. Para penerima manfaat mendapatkan pendampingan usaha dari UNAIR Surabaya, agar dapat meningkatkan kapasitas usaha, sehingga diharapkan mampu mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Program ini dilaksanakan di dua kecamatan, yakni Sooko dan Mojoanyar, dengan jenis usaha yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Di Kecamatan Sooko, para penerima manfaat terlibat dalam usaha produksi sepatu olahraga, kios bahan makanan ringan, kios isi ulang galon dan usaha kecil lainnya. Sementara itu, di Mojoanyar, usaha yang dijalani meliputi warung tempat ngopi dan jajanan dan jualan pentol baso dan sosis goreng keliling.

Kecamatan Sooko dan Mojoanyar di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, memiliki kondisi geografis dataran rendah yang mendukung pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Penduduknya didominasi oleh keluarga dengan mata pencaharian di sektor agraris, usaha kecil, dan informal. Tingkat kemiskinan di daerah ini cukup signifikan, terutama di antara pekerja berpenghasilan rendah, yang sebagian besar merupakan penerima bantuan sosial untuk pemberdayaan ekonomi. Bantuan tersebut mencakup pelatihan dan modal usaha bagi pengembangan usaha mikro. Potensi ekonomi daerah ini juga didukung oleh sumber daya lokal, namun keterbatasan akses dan literasi keuangan masih menjadi tantangan dalam pemberdayaan.

Sebagai fokus dalam penelitian ini adalah usaha pengrajin sepatu olahraga di Kecamatan Sooko. Meski Kabupaten Mojokerto dikenal sebagai pusat kerajinan alas kaki sejak 1995, kebanyakan pengrajin memilih menjual sepatu secara grosir tanpa merek lokal. Pemerintah daerah mendorong pengrajin untuk berinovasi dan menciptakan merek lokal, memberikan bimbingan dan pelatihan selama enam bulan serta modal usaha. Namun, modal yang diberikan seringkali tidak mencukupi, sehingga banyak pengrajin yang meminjam modal dari lembaga simpan pinjam lokal untuk memenuhi kebutuhan produksi. Beberapa dari mereka ragu untuk meminjam uang ke bank karena syarat dan cicilan yang memberatkan.

Salah satu penerima manfaat ProKUS adalah ibu "S", yang bersama suaminya dan dua saudaranya mampu memproduksi sekitar 60 pasang sepatu olahraga per hari. Harga sepatu olahraga berkisar antara Rp 60 ribu hingga Rp 180 ribu per pasang, tergantung pada model dan bahan. Mereka menjual sepatu melalui toko grosir, platform online seperti WhatsApp, atau langsung kepada pembeli. Usaha ini membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang terlibat dalam proses produksi sepatu. Meski demikian, mereka seringkali harus meminjam modal dari toko grosir sebagai mitra untuk memenuhi kebutuhan produksi. Berikut pernyataan dari informan :

"Setiap hari kami bisa buat sekitar 60 pasang sepatu olahraga, dijual dengan harga mulai Rp 60 ribu sampai Rp 180 ribu, tergantung model dan bahan. Tantangan terbesar kami modal, kadang harus pinjam ke toko grosir untuk produksi. Tapi usaha ini sangat membantu keluarga kami dan bisa membuka peluang kerja untuk orang sekitar". (NA.B1)

Salah satu kisah inspiratif lainnya datang dari Kecamatan Mojoanyar, di mana Mas "SG" menjual pentol baso dan sosis goreng. Usaha ini sudah dijalankan selama 10 tahun dan mulai berkembang meski menghadapi banyak tantangan. Awalnya, Mas "SG" menggantikan orang tuanya yang sakit dan terpaksa berhenti bekerja. Dengan modal awal dari keluarga dan teman-teman, ia belajar berdagang dan memulai usahanya dengan berjualan di sekitar desa. Dalam satu hari, "SG" mampu menjual rata-rata 50 porsi pentol baso dan sosis goreng dengan harga Rp 5.000 per porsi. Dari usaha ini, ia mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 500.000 per bulan, yang cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, sekolah anak-anak, dan menabung untuk masa depan.

Mas "SG" menghadapi berbagai tantangan, termasuk persaingan dengan penjual lain dan dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan penjualan. Meski begitu, ia terus beradaptasi dengan membuka layanan pesan antar dan menjaga kualitas makanannya. Ia menggunakan resep warisan dari ayahnya dan memilih bahan-bahan yang sehat untuk menjaga kualitas produknya. Usaha ini tidak hanya membantu perekonomian keluarganya, tetapi juga memberi dampak positif pada masyarakat sekitarnya. Seperti dinyatakan dalam wawancara :

"Awalnya saya hanya coba-coba menggantikan orang tua yang sakit. Dengan modal dari keluarga dan teman, saya mulai jualan pentol baso dan sosis goreng. Setiap hari bisa jual sekitar 50 porsi. Tantangannya banyak, terutama persaingan dan pandemi, tapi saya terus berusaha. Sekarang saya buka layanan pesan antar, jaga kualitas makanan, dan alhamdulillah usaha ini bisa bantu perekonomian keluarga saya." (NA.B2)

Dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh penerima manfaat ProKUS, terlihat bahwa program ini berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya modal usaha dan dukungan pemasaran. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mendukung para wirausahawan lokal agar mereka dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi komunitas mereka.

Dinas Sosial sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial di daerah, mengakui bahwa pengembangan ProKUS masih membutuhkan dukungan modal yang lebih besar. Selama ini ProKUS masih mengandalkan program dari pusat yang terbatas kuota. Sumber pembiayaan dari daerah perlu

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere & Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

didorong dengan kolaborasi lintas sektor yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi usaha kecil. Hasil wawancara dengan narasumber menyebutkan :

"Tantangan utama dalam program kewirausahaan sosial adalah keterbatasan permodalan. Saat ini, sumber dana sebagian besar masih bergantung pada anggaran pusat, sementara daerah belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Kami berharap ke depannya ada kebijakan yang lebih mendukung dari pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif, sehingga program ini bisa lebih berkembang dan merata di berbagai wilayah," (NB.A2)

Dinas Sosial tidak bisa berjalan sendiri melakukan pembinaan pemberdayaan ekonomi penerima ProKUS. Kolaborasi sebetulnya sudah dilakukan antara Dinas Sosial dengan Dinas UMKM untuk melakukan pembinaan lanjutan terutama untuk KPM PKH. Namun, pola keterlibatan pengusaha di daerah masih perlu ditingkatkan mengingat keluarga miskin memiliki karakter tersendiri yang tidak serta-merta bisa diarahkan ke ekonomi produktif. Tidak banyak pengusaha di daerah yang saat ini bisa dilibatkan. Keterbatasan wawasan ekonomi dan keengganan mengikuti pembinaan masih menjadi kendala. Diungkapkan oleh narasumber dari Dinas UMKM :

"Pembinaan masih sangat kurang pak, jadinya penerima manfaat kurang optimal mengembangkan usahanya. Pengusaha daerah belum banyak yang mau jadi mentor, makanya pembinaan tidak optimal. Di sisi lain, keluarga miskin ini kadang masih segan untuk ikut karena minimnya pemahaman dan kepercayaan diri mereka. Ke depan perlu lebih banyak lagi dukungan pengusaha lokal agar program ini lebih efektif," (NB.A3)

Namun demikian, kewirausahaan sosial memiliki peran penting dalam menciptakan tidak hanya pendapatan, tetapi juga hubungan sosial yang lebih kuat di dalam masyarakat. Ketika seseorang memulai usaha berbasis sosial, mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga bagaimana usaha tersebut bisa memberi manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Melalui proses produksi, distribusi, dan penjualan, wirausaha sosial secara langsung berinteraksi dengan pelanggan, mitra, serta anggota komunitas lainnya. Interaksi ini menciptakan jaringan sosial yang saling mendukung, memperkuat rasa kebersamaan, dan membangun solidaritas antar warga. Di lingkungan yang erat, keberadaan wirausaha sosial tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan antar individu, menciptakan ruang untuk saling berbagi dan saling mendukung.

Selain itu, kewirausahaan sosial juga mampu membangun kepercayaan dalam komunitas, di mana orang-orang merasa terhubung secara ekonomi dan sosial. Dengan usaha yang melibatkan komunitas, wirausahawan tidak hanya menciptakan sumber pendapatan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan mereka. Hubungan yang terjalin melalui kewirausahaan sosial ini memungkinkan terbentuknya ikatan yang lebih erat, di mana masyarakat saling bergantung dalam memajukan kesejahteraan bersama. Ini menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial bukan sekadar soal keuntungan, tetapi juga soal memperkuat jaringan sosial dan mendukung pertumbuhan kolektif dalam komunitas.

"Sebagai wirausaha sosial, kami nggak cuma cari keuntungan untuk diri sendiri, tapi juga gimana usaha ini bisa bermanfaat buat orang lain. Interaksi sama pelanggan, mitra, dan orang sekitar itu sangat penting. Jadi, kita saling bantu, saling kenal, dan akhirnya menciptakan hubungan sosial yang lebih kuat. Usaha ini juga bikin kita lebih dipercaya, karena orang-orang merasa ikut terlibat." (NB.A1)

3.2 Tantangan Membangun Kemandirian Ekonomi dan Hubungan Sosial

Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) telah membawa dampak positif dalam memberdayakan penerima manfaat, terutama keluarga yang tergabung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mojokerto. Melalui program ini, penerima manfaat belajar mengelola usaha dengan lebih baik, memahami pentingnya pencatatan keuangan, dan mengembangkan strategi usaha sederhana yang membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga. ProKUS berhasil memunculkan semangat berwirausaha di antara para penerima manfaat, yang sebelumnya hanya bergantung pada bantuan sosial. Kesadaran tentang pentingnya kemandirian ekonomi semakin tumbuh, dan banyak penerima yang mulai memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan penghasilan keluarga.

Di sisi lain, program ini juga membantu membangun jejaring sosial yang kuat di antara penerima manfaat. Dalam kegiatan kelompok, seperti koperasi atau kelompok kerajinan, para peserta dapat bertukar pengalaman, berbagi pengetahuan, dan saling mendukung dalam mengatasi berbagai tantangan usaha. Hubungan yang terbentuk melalui program ini memperkuat solidaritas di antara anggota komunitas, menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan bersama. Melalui interaksi ini, penerima manfaat merasa memiliki dukungan sosial yang penting, yang tidak hanya membantu mereka dalam aspek bisnis tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, program ProKUS tidak terlepas dari berbagai kendala di lapangan. Masalah utama yang ditemui adalah keterbatasan modal usaha dan minimnya keterampilan teknis di bidang kewirausahaan. Banyak penerima manfaat masih mengalami kesulitan dalam pemasaran produk dan belum optimal dalam menarik pelanggan melalui kemasan atau branding. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan yang diberikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan usaha setiap individu agar potensi usaha mereka bisa berkembang dengan optimal.

Untuk meningkatkan keberhasilan ProKUS, diperlukan dukungan lebih dari berbagai pihak. Bantuan modal tambahan, pelatihan teknis yang lebih terarah, dan penyederhanaan proses administrasi akan sangat membantu penerima manfaat dalam mengembangkan usahanya. Dengan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, ProKUS berpotensi tidak hanya menjadi solusi ekonomi tetapi juga memperkuat hubungan sosial di masyarakat. Program ini diharapkan terus berlanjut dan berkembang, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh lebih banyak keluarga dan mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Secara keseluruhan, temuan lapangan menunjukkan bahwa penerima manfaat ProKUS menghadapi tantangan signifikan dalam membangun kemandirian ekonomi dan jaringan sosial yang kuat. Keterbatasan modal menjadi kendala utama dalam mengembangkan usaha mikro, seperti warung atau kerajinan, sehingga penerima manfaat kerap sulit untuk memperbesar skala usaha. Hambatan ini semakin kompleks dengan minimnya akses ke pembiayaan formal, yang membuat mereka lebih bergantung pada pinjaman informal yang berisiko.

Selain itu, keterampilan kewirausahaan penerima manfaat umumnya masih terbatas, khususnya dalam aspek pemasaran, manajemen keuangan, dan inovasi bisnis. Dari segi sosial, membangun hubungan dan jaringan yang kokoh juga menantang, meskipun program ini memfasilitasi kegiatan bersama. Beberapa penerima manfaat merasa enggan berpartisipasi karena rendahnya kepercayaan diri atau takut gagal. Tantangan-tantangan ini menekankan pentingnya pendekatan ProKUS yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan pelatihan yang relevan dan dukungan yang lebih tepat untuk membantu penerima manfaat mengembangkan usaha secara mandiri sekaligus memperkuat jaringan sosial mereka.

4. Pembahasan

Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di Kabupaten Mojokerto telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya dalam mendukung kemandirian

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere & Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

ekonomi melalui usaha kecil. Berkat pelatihan dan pendampingan yang diterima, banyak KPM kini mampu mengelola usaha secara mandiri dan mulai mendapatkan penghasilan tetap. Usaha-usaha yang dijalankan bervariasi, mulai dari warung kecil, kerajinan tangan, hingga produksi makanan ringan. Sebagian penerima manfaat melaporkan bahwa penghasilan dari usaha kecil ini membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Selain peningkatan pendapatan, ProKUS juga membekali penerima manfaat dengan keterampilan dalam pemasaran dan pencatatan keuangan sederhana. KPM yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan dasar kewirausahaan kini merasa lebih percaya diri dalam mengelola usaha mereka. Melalui keterampilan ini, mereka tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga belajar pentingnya perencanaan dan manajemen usaha yang baik. Bagi sebagian KPM, adanya dukungan pendampingan secara rutin juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki dan mengembangkan usaha mereka.

ProKUS juga berperan penting dalam membangun jaringan sosial di antara para penerima manfaat. Banyak KPM yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi, di mana mereka saling berbagi pengalaman, tips usaha, dan mendukung satu sama lain. Interaksi ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial tetapi juga menciptakan komunitas yang lebih solid dan saling mendukung. Bagi para KPM, ProKUS telah membuka jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Tantangan seperti keterbatasan modal dan keterampilan masih ada, tetapi ProKUS telah menjadi langkah awal yang memberikan harapan dan peluang bagi banyak keluarga di Mojokerto untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Kewirausahaan sosial adalah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip bisnis dengan tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kewirausahaan sosial bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam inisiatif ini. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kewirausahaan sosial mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pertama, kewirausahaan sosial memiliki potensi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan membantu mereka membuka usaha kecil dan menengah yang berkelanjutan, masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Misalnya, program kewirausahaan sosial yang mendorong individu untuk membuka usaha kecil dapat membantu mereka menjadi lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Kemandirian ekonomi ini juga dapat membuka peluang bagi pengembangan komunitas secara keseluruhan.

Selain itu, kewirausahaan sosial dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial seperti pengangguran dan ketimpangan sosial. Dengan membuka usaha yang melibatkan masyarakat terpinggirkan, inisiatif kewirausahaan sosial memberikan kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan, yang pada akhirnya membantu mengatasi masalah sosial yang mendasar. Maseno & Wanyoike (Maseno & Wanyoike, 2022), memberikan studi investigasi tentang kewirausahaan sosial sebagai mekanisme untuk transformasi sosial dan dampak sosial di Afrika Timur. Kemudian bagaimana kewirausahaan sosial dapat memainkan peran penting dalam mengatasi masalah sosial di wilayah tersebut, serta dampak sosial yang dihasilkan. Misalnya, usaha yang melibatkan masyarakat lokal dalam produksi barang dan jasa dapat meningkatkan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja, sehingga membantu mengurangi ketimpangan sosial.

Selanjutnya, kewirausahaan sosial juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui inisiatif kewirausahaan sosial, individu didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan

ekonomi, yang dapat memperkuat hubungan antar individu dan membangun jaringan sosial yang lebih kuat. Peran kewirausahaan sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan mendorong individu untuk terlibat dalam inisiatif kewirausahaan sosial, dapat dibangun hubungan antarindividu yang lebih kuat dan jaringan sosial yang lebih solid. Ini bukan hanya tentang menciptakan bisnis untuk keuntungan, tetapi juga tentang memperkuat komunitas dan mempromosikan keterlibatan aktif dalam solusi sosial dan ekonomi (Mair & Marti, 2006). Partisipasi ini juga dapat membawa dampak positif dalam hal pemberdayaan komunitas, karena individu belajar untuk bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam usaha mereka.

Kewirausahaan sosial juga menumbuhkan inovasi dan kreativitas. Dengan mendorong individu untuk berpikir di luar kebiasaan dan menciptakan solusi baru, kewirausahaan sosial dapat mempercepat proses penciptaan nilai tambah bagi masyarakat (Deci & Ryan, 2012). Ini juga dapat membantu membangun ekonomi kreatif yang berkelanjutan, karena individu terdorong untuk mencari cara-cara inovatif dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Namun, untuk mencapai manfaat tersebut, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan modal dan sumber daya yang dapat menghambat pertumbuhan kewirausahaan sosial. Nicholls (Nicholls, 2010), memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika dan tantangan dalam membangun legitimasi kewirausahaan sosial, yang relevan dengan pembahasan tentang keterbatasan modal dan sumber daya yang dihadapi oleh praktisi kewirausahaan sosial. Individu yang terlibat dalam program kewirausahaan sosial sering kali membutuhkan dukungan finansial dan bimbingan teknis yang memadai agar usaha mereka bisa berjalan dan berkembang.

Selain itu, bimbingan teknis yang diberikan dalam program kewirausahaan sosial perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penerima manfaat. Banyak penerima manfaat merasa bahwa bimbingan teknis yang diberikan tidak relevan dengan jenis usaha mereka atau terlalu sulit untuk diikuti karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, program bimbingan teknis harus dibuat lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua individu, terlepas dari latar belakang dan kemampuan mereka. Untuk memastikan keberhasilan kewirausahaan sosial, dukungan dari masyarakat dan lingkungan sekitar juga sangat penting. Tanpa dukungan ini, promosi usaha sosial dan pembangunan hubungan sosial menjadi lebih sulit (Zahra et al., 2009). Oleh karena itu, program kewirausahaan sosial perlu melibatkan masyarakat dalam berbagai aktivitas untuk memastikan dukungan dan partisipasi mereka.

Masalah regulasi dan administrasi juga dapat menghambat perkembangan kewirausahaan sosial. Perizinan dan perpajakan yang rumit sering kali menjadi hambatan bagi individu yang ingin memulai usaha sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan kewirausahaan sosial agar individu dapat lebih mudah menjalankan usaha mereka. Secara keseluruhan, kewirausahaan sosial memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui program-program yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan, kewirausahaan sosial dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi, mengatasi masalah sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, menumbuhkan inovasi, dan mendorong perubahan sosial yang positif. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, program kewirausahaan sosial harus mengatasi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan modal, bimbingan teknis yang sesuai, dukungan masyarakat, dan regulasi yang mendukung.

Guncangan pendapatan adalah penyebab umum kemiskinan rumah tangga (Hutahaean & Sitorus, 2022). Ketidakpastian pendapatan, yang juga dikenal sebagai "ketidakpastian pendapatan", adalah masalah yang sering dihadapi oleh penduduk yang rentan terhadap kemiskinan, yang memungkinkan mereka untuk terjerumus ke dalam kemiskinan dalam waktu singkat. Rumah tangga dapat mengalami kemiskinan di masa mendatang sebagai akibat dari banyak faktor negatif, termasuk ekonomi, iklim, kondisi alam, lingkungan sosial, dan faktor lainnya. Sebagai ilustrasi, pandemi COVID-19 menyebabkan pembatasan sosial yang mengurangi aktivitas ekonomi, yang secara tidak

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere & Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

langsung menyebabkan penurunan pendapatan. Begitu pula, kehilangan kepala keluarga dapat mengurangi kesejahteraan.

Hubungan kompleks antara ketimpangan ekonomi dan dinamika kemiskinan ditunjukkan oleh penelitian tentang keduanya. Beberapa penelitian menunjukkan, ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan dan memperburuk kemiskinan serta berdampak pada perubahan status sosial ekonomi individu dan kelompok dalam jangka panjang. Dinamika kemiskinan ditentukan oleh variabel seperti akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Analisis literatur ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hubungan antara ketimpangan ekonomi dan kemiskinan serta konsekuensi dari hubungan ini terhadap kebijakan dan intervensi yang bertujuan untuk menurunkan ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Obayelu & Edewor, 2022). Ketidakstabilan pendapatan ekonomi keluarga adalah penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Perbedaan pendapatan menyebabkan kemiskinan, yang mengurangi kemampuan seseorang atau kelompok untuk membeli barang dan jasa penting.

Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. ProKUS dimaksudkan sebagai solusi untuk menangani berbagai masalah sosial, terutama kemiskinan. Kewirausahaan sosial, menurut (Yunus, 2009), adalah "Usaha bisnis yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan melalui inovasi dan keberlanjutan finansial". Konsep kewirausahaan sosial muncul sebagai tanggapan terhadap masalah sosial yang sedang berlangsung. Seseorang atau kelompok orang dapat mendefinisikan "kewirausahaan" dengan cara yang berbeda. Kewirausahaan umumnya didefinisikan sebagai proses individu atau kelompok yang menggunakan metode dan peluang yang tersedia untuk menciptakan nilai, memenuhi kebutuhan, dan menghasilkan inovasi dan keunikan tanpa mempertimbangkan sumber daya yang ada (Stephen & Coulter, 2016). Wirausahawan menciptakan nilai dengan menciptakan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka berinovasi dengan mengembangkan solusi kreatif, baik dalam bentuk produk, layanan, proses, maupun model bisnis baru. Selain itu, wirausahawan juga memiliki keberanian untuk mengambil risiko dengan menginvestasikan waktu, uang, dan energi tanpa jaminan kesuksesan.

Wirausahawan, dalam istilah yang lebih sederhana, adalah orang yang berani mengambil risiko untuk memulai dan mengelola bisnis mereka tanpa terbebani oleh ketakutan atau kecemasan, terlepas dari keadaan yang tidak pasti (Kasmir, 2007). Oleh karena itu, tujuan kewirausahaan sosial adalah untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah sosial. Seorang wirausaha sosial diharapkan bersedia membantu masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya kelas bawah, mengatasi kesenjangan di berbagai bidang seperti pendidikan, perekonomian, kesejahteraan, kesehatan dan lain-lain. Menurut Prayogo (Prayogo, 2017), dalam jurnal "Agora" yang mengutip penelitian yang dilansir oleh wirausaha sosial di Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, ditemukan bahwa tujuan utama wirausaha adalah menjadi agen perubahan, yang dapat memberikan ide dan solusi mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Pembelajaran berbasis kewirausahaan atau entrepreneurship dianggap sebagai solusi lain yang mempunyai efek ganda, yaitu dapat mengatasi permasalahan ekonomi dan sekaligus meningkatkan kualitas intelektual pegawai. Pengembangan kewirausahaan merupakan salah satu kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap pengembangan kewirausahaan.

Kewirausahaan sosial telah menjadi salah satu solusi efektif dalam mengatasi kemiskinan dan mengembangkan perekonomian di tingkat lokal. Menurut (Asnawati, 2021), kewirausahaan memainkan peran penting dalam mengarahkan perekonomian negara ke arah yang lebih baik. Melalui kewirausahaan sosial, orang-orang yang sebelumnya mengandalkan bantuan sosial dapat menjadi pelaku usaha yang mandiri, mengentaskan diri dari kemiskinan, dan bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

ProKUS adalah inisiatif pemerintah yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial untuk mendukung keluarga miskin dan rentan dengan memberikan dukungan modal usaha dan pendampingan bagi KPM. Program ini melibatkan pelatihan dan dukungan dalam menciptakan usaha lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi pasar di komunitas mereka. Sebagai contoh, ProKUS telah membantu para peserta memulai bisnis di bidang jasa kebersihan, kerajinan tangan, dan berbagai usaha kecil lainnya. Dengan adanya ProKUS, ketergantungan pada bantuan sosial berkurang, dan kesejahteraan keluarga meningkat secara bertahap.

Salah satu aspek penting dari kewirausahaan sosial adalah kemampuannya untuk memperkuat hubungan sosial. Melalui bisnis lokal, penerima manfaat ProKUS dapat berinteraksi dengan pelanggan, mitra bisnis, dan anggota komunitas lainnya, menciptakan jaringan sosial yang lebih luas. Interaksi ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial tetapi juga meningkatkan rasa saling percaya dan solidaritas di antara anggota komunitas. Beberapa peserta ProKUS bahkan terlibat dalam kegiatan bersama, seperti koperasi atau kelompok kerajinan, yang memungkinkan mereka untuk bertukar pengetahuan dan dukungan.

Peran pemerintah dalam mendukung kewirausahaan sosial sangat penting. Pemerintah menyediakan sumber daya keuangan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan usaha sosial. Pendanaan untuk kewirausahaan sosial dapat berasal dari berbagai sumber, seperti hibah, pinjaman berbunga rendah, atau modal ventura. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak, menyederhanakan prosedur perizinan, dan menawarkan pelatihan serta pendampingan bagi wirausaha sosial.

Namun, ada berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan kewirausahaan sosial. Keterbatasan modal dan sumber daya sering menjadi hambatan bagi individu untuk memulai dan mengembangkan usaha sosial. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan tentang kewirausahaan dapat membatasi kemampuan pengelolaan usaha. Selain itu, ketidaksesuaian bimbingan teknis dengan kebutuhan dan sumber daya penerima manfaat juga bisa menghambat keberhasilan program. Masalah regulasi dan administrasi kadang-kadang dapat menghambat perkembangan usaha sosial, berdampak pada pendapatan individu yang terlibat. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa program kewirausahaan sosial didukung dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan bertanggung jawab. Selain itu, pengawasan terhadap dampak sosial dari kegiatan kewirausahaan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat hubungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus mendukung dan mengembangkan program-program yang mendorong kewirausahaan sosial. Dukungan pemerintah yang konsisten dan lingkungan yang kondusif adalah kunci agar kewirausahaan sosial terus menjadi alat yang efektif dalam memberdayakan komunitas dan menciptakan dampak sosial yang positif. Selain itu hubungan sosial yang kuat dalam kewirausahaan sosial menjadi fondasi penting bagi keberhasilan usaha dan kesejahteraan komunitas. Melalui interaksi dengan pelanggan, mitra, dan komunitas, wirausahawan sosial mampu membangun jaringan dukungan yang saling menguatkan. Solidaritas yang terbentuk menciptakan ruang bagi pertukaran pengetahuan, saling percaya, dan kerjasama yang berkelanjutan. Pada akhirnya, kewirausahaan sosial bukan hanya tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere & Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

membangun hubungan sosial yang mendalam, yang memperkuat ketahanan dan pertumbuhan komunitas secara kolektif.

5. Kesimpulan

Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) yang diimplementasikan di Kabupaten Mojokerto terbukti mampu memberikan dampak positif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penerima manfaat. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan keluarga melalui usaha mikro, tetapi juga mendorong penguatan hubungan sosial di kalangan komunitas. Dukungan modal dan pendampingan usaha yang disediakan oleh pemerintah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, telah membantu keluarga penerima manfaat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Meski demikian, pelaksanaan ProKUS masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan modal usaha, kurangnya akses terhadap teknologi, dan rendahnya literasi kewirausahaan menjadi kendala utama yang dihadapi oleh para peserta program. Beberapa penerima manfaat kesulitan untuk memanfaatkan bimbingan teknis yang tersedia karena tidak selalu sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan mereka. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dalam bentuk dukungan teknis yang lebih relevan dan akses yang lebih luas ke teknologi digital.

Dari sisi sosial, ProKUS juga memainkan peran penting dalam memperkuat solidaritas antar warga melalui kewirausahaan. Interaksi yang terjadi di antara individu dalam komunitas usaha tidak hanya meningkatkan jaringan sosial, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan saling mendukung. Hal ini membantu penerima manfaat dalam menghadapi tantangan usaha, sekaligus memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Keberlanjutan ProKUS sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dukungan yang lebih luas dari sektor swasta, terutama dalam hal pendanaan dan akses pasar, dapat membantu memperkuat dampak program ini. Selain itu, regulasi yang mendukung serta kebijakan yang memudahkan administrasi usaha sosial juga sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan usaha yang dikelola oleh penerima manfaat.

ProKUS memiliki potensi besar untuk memberdayakan keluarga miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Dengan penanganan yang tepat terhadap tantangan yang ada, serta dukungan yang lebih menyeluruh dari berbagai pihak, kewirausahaan sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan di masyarakat.

6. Saran

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) memiliki potensi signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kewirausahaan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat dukungan terhadap program ini dengan memperluas akses modal dan sumber daya bagi penerima manfaat. Selain itu, regulasi yang mendukung, seperti penyederhanaan proses perizinan usaha kecil, akan sangat membantu dalam mempercepat pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada peserta ProKUS sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan lokal agar mereka dapat mengoptimalkan potensi bisnisnya. Dukungan sektor swasta juga sangat penting dalam membantu keberlanjutan program ini melalui kemitraan strategis dan investasi. Dukungan dalam bidang pemasaran dan teknologi dari sektor swasta akan memperluas jaringan distribusi dan memperbesar akses penerima manfaat ke pasar yang lebih luas. Pelatihan bisnis yang

relevan dari sektor swasta akan membantu memperkuat kapasitas peserta ProKUS dalam menjalankan usaha mereka.

Lembaga pendidikan dan inkubator bisnis juga diharapkan berperan aktif dalam program ProKUS. Melalui riset dan inovasi, perguruan tinggi dapat membantu mengidentifikasi solusi teknis yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Inkubator bisnis dapat memberikan pendampingan jangka panjang dan membantu penerima manfaat memperluas jaringan pasar untuk produk-produk usaha sosial mereka. Dukungan ini akan sangat berpengaruh dalam memastikan kelangsungan usaha kecil yang dijalankan oleh penerima manfaat.

Selain itu, peran serta masyarakat lokal juga penting untuk kesuksesan ProKUS. Masyarakat dapat mendukung dengan membeli produk lokal dan mempromosikan hasil usaha penerima manfaat, dengan menjalin hubungan sosial yang baik antar wirausahawan sehingga memperkuat solidaritas sosial di komunitas. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat diharapkan mampu mendorong ProKUS untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan, baik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun sosial di masyarakat.

Ucapan terimakasih: Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Sosial, Dinas UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, serta Pendamping Sosial Program PKH atas dukungan dan kerjasama yang diberikan selama proses penelitian di lapangan. Kontribusi dan sinergi dari semua pihak sangatlah berarti bagi kelancaran penelitian ini. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi kemajuan Kabupaten Mojokerto dan wilayah lainnya di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Mubarak, H. M., & Busler, M. (2013). The effect of business incubation in developing countries. *European Journal of Business and Innovation Research*, 1(1), 19–25.
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring acute poverty in the developing world: Robustness and scope of the multidimensional poverty index. *World Development*, 59, 251–274.
- Ardi Adji, Taufik Hidayat, Hendratno Tuhiman, Sandra Kurniawati, A. M. (2020). Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan. <https://www.tnp2k.go.id/download/79169WP480304FINAL.pdf>
- Asnawati, S. E. (2021). KEWIRAUSAHAAN Teori dan Contoh Contoh Rencana Bisnis. Asnawati.
- Bansal, S., Garg, I., & Sharma, G. D. (2019). Social entrepreneurship as a path for social change and driver of sustainable development: A systematic review and research agenda. *Sustainability*, 11(4), 1091.
- Boffa, D., Prencipe, A., Papa, A., Corsi, C., & Sorrentino, M. (2023). Boosting circular economy via the b-corporation roads. The effect of the entrepreneurial culture and exogenous factors on sustainability performance. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 19(2), 523–561.
- Chundu, M., Masara, E., & Mucheri, T. (2022). Contribution of Social Entrepreneurship to Sustainable Community Development in Zimbabwe. A Case of Virtuous Women Trust Operating in Harare. *Journal of Human Resource and Sustainability Studies*, 10(3), 380–402.
- Darwis, R. S., Miranti, Y. S., Saffana, S. R., & Yuandina, S. (2021). Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 135–147.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Self-determination theory. *Handbook of Theories of Social Psychology*, 1(20), 416–436.
- Dekki, U. R., & Dody, S. (2022). KEBIJAKAN SOSIAL; Sejarah, Teori, Konsep dan Praktik. Forind.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- Desi Purnamawati. (2020). Kemensos luncurkan program kewirausahaan sosial. <https://www.antaranews.com/berita/1915712/kemensos-luncurkan-program-kewirausahaan-sosial>
- Hasanah, U. U., & Setiaji, K. (2019). Pengaruh literasi digital, efikasi diri, lingkungan terhadap intensi berwirausaha mahasiswa dalam e-business. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 1198–1215.

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere & Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

- Hutahaean, Y. M., & Sitorus, J. R. H. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Bekerja di Pulau Jawa. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 1165–1176.
- International, A. (2023). Standar Hidup Layak.
- ITSDRPM. (2021). Standarisasi Pendampingan Inkubasi Bisnis ProKUS Kementerian Sosial. Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. <https://www.its.ac.id/drpm/id/2021/11/15/standarisasi-pendampingan-inkubasi-bisnis-prokus-kementerian-sosial/>
- Iyengar, V. (2014). For Goodness, we will Change—An ultimate goal of the Entrepreneurs for effecting Social Enterprise. *Procedia Economics and Finance*, 11, 767–774.
- Kasmir. (2007). *Kewirausahaan*. PT. RajaGrafindo Persada. <https://rajagrafindo.co.id/produk/kewirausahaan/>
- Laurens, S., & Putra, A. H. P. K. (2020). Poverty alleviation efforts through MDG's and economic resources in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(9), 755–767.
- Mair, J., & Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. *Journal of World Business*, 41(1), 36–44.
- Maseno, M., & Wanyoike, C. (2022). Social entrepreneurship as mechanisms for social transformation and social impact in East Africa an exploratory case study perspective. *Journal of Social Entrepreneurship*, 13(1), 92–117.
- Nadila, D. (2022). Analisis Kebijakan Kementrian Sosial Tentang Program Kewirausahaan Sosial Di Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 4(2), 1–8.
- Nicholls, A. (2010). The legitimacy of social entrepreneurship: Reflexive isomorphism in a pre-paradigmatic field. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 34(4), 611–633.
- Obayelu, A. E., & Edewor, S. E. (2022). Economic Inequality and Poverty Dynamics: What does Literature tell us? *Innovation Journal of Social Sciences and Economic Review*, 4(4), 21–31.
- Paringsih, Patemah, Hasan, M., Karman, A., Supatminingsih, T., Dermawan, A., Huwae, V., Suwarni, P., Sudirman, A., & Supartoyo, Y. (2023). *Smart Entrepreneurship (Kreatif dan Inovatif Berwusaha)* (pp. 57–70).
- Pierson, C. (1998). *Beyond the welfare state: The new political economy of welfare*. Polity Press.
- Prayogo, C. (2017). Studi deskriptif social entrepreneur (studi kasus pada pemilik Agfa di Sidoarjo). *Agora*, 5(1).
- Rahadi, D. R. (2017). Analisis Sektor Usaha Kecil & Menengah Menjadi Model Kewirausahaan Sosial Berbasis Ekonomi Kreatif. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 159–173.
- Reindrawati, D. Y., & Sos, S. (2017). Tantangan dalam implementasi social entrepreneurship pariwisata di Pulau Madura. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, 30(3), 215–228.
- Shaw, E., & Carter, S. (2007). Social entrepreneurship: Theoretical antecedents and empirical analysis of entrepreneurial processes and outcomes. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 14(3), 418–434.
- Siregar, L. M., & Yusri, N. A. (2021). Kewirausahaan Sosial Sebagai Wujud Inovasi Sosial. *Biopsikososial: Jurnal Ilmiah Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Jakarta*, 5(2), 476–490.
- Stephen, P., & Coulter, M. (2016). *Manajemen*, Jilid 1 Edisi 13, Alih Bahasa: Bob Sabran Dan Devri Bardani P. Jakarta. Erlangga.
- Subekti, P., Hafiar, H., Prastowo, F. X. A. A., & Masrina, D. (2022). Pemberdayaan Generasi Muda Melalui Pengenalan dan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 131–136.
- Svallfors, S. (2007). *The political sociology of the welfare state: institutions, social cleavages, and orientations*. Stanford University Press.
- Wibowo, H., Santoso, M. B., & Setiawan, S. A. (2021). Inovasi Sosial Pada Praktik Kewirausahaan Sosial Di Yayasan Al-Barokah Kota Banjar. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 210–218.
- Wijayanti, A., Widiastuty, E., & Febrianto, R. (2022). Mengetuk Hati, Membesarkan Jiwa: Pengenalan Dan

Penguatan Kewirausahaan Sosial Berpendekatan Design Thinking. Jurnal Abdimas Sangkabira, 3(1), 131–142.

Yunus, M. (2009). Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism. Public affairs.

Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O., & Shulman, J. M. (2009). A typology of social entrepreneurs:

Motives, search processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing, 24(5), 519–532.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere & Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo

Istiana Hermawati^{1,2*}  Asep Kusnali³  Toton Witono^{1,4}  Adji Suradji Muhammad¹ 
Saryana¹ 

- ¹ Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta, Indonesia
- ² Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia.
- ³ Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Cibinong, Indonesia.
- ⁴ Pusdiklat dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia.

* Korespondensi: istiana1410@gmail.com; istiana.hermawati@apmd.ac.id (+62) 8528716070

Diterima: 17 September 2024; Disetujui: 3 Desember 2024; Diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstrak: Bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang rentan secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan bantuan sosial oleh keluarga penerima manfaat di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Menggunakan metode *mixed methods* dengan *Kalurahanin concurrent embedded*, penelitian melibatkan 40 responden dan 10 informan. Mayoritas responden berusia produktif, berstatus menikah, bekerja sebagai ibu rumah tangga, berpendidikan SMA, menanggung 4 jiwa dan berpenghasilan rendah. Hasil menunjukkan, bahwa sebagian besar responden memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pendidikan dan pangan, dan untuk menangani masalah finansial seperti hutang dan kebutuhan lainnya. Kontribusi bantuan sosial terhadap pendapatan keluarga berkisar antara 4%-58,9% dan terhadap pengeluaran 4,89%-47,18%. Bantuan sosial memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, 85% responden masih berada di bawah garis kemiskinan nasional. Meski membantu meringankan beban ekonomi, diperlukan peningkatan efektivitas program bantuan sosial melalui penargetan yang lebih tepat dan pemberdayaan ekonomi. Rekomendasi yang diajukan mencakup integrasi program bantuan sosial dengan literasi keuangan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat.

Kata kunci: Kalurahan Ngargosari, bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, penerima manfaat, metode campuran

Abstract: Social assistance is important in alleviating poverty, especially in economically vulnerable rural areas. This research aims to analyze the utilization of social assistance by beneficiary families in Ngargosari Village, Samigaluh District, Kulon Progo Regency. Using a *mixed methods approach* and a *concurrent embedded design*, this study involved 40 respondents and 10 informants. Most respondents of this research are married, of productive age, work as housewives, have a high school education, have low income, and support four dependents. The findings showed that social assistance played a crucial role in supporting the economic well-being of families, especially in meeting basic needs such as food and education. The social assistance has contributed to family income ranging from 4% to 58.9%, and to expenditure, from 4.89% to 47.18%. However, 85% of respondents are still below the national poverty line. Although it helps alleviate the economic burden, there is a need to enhance the program's effectiveness through more precise targeting and economic empowerment. The recommendations include integrating social assistance programs with financial literacy and empowerment to enhance beneficiaries' independence.

Keywords: Ngargosari village, social assistance, poverty alleviation, beneficiaries, mixed methods

<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk/article/view/3501>

DOI : [10.33007/ska.v14i1.3501](https://doi.org/10.33007/ska.v14i1.3501)

1. Pendahuluan

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan memberikan dukungan kepada masyarakat rentan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka (Kementerian Sosial RI, 2020). Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Non-Tunai (BPNT) bertujuan mendukung peningkatan kualitas hidup penerima manfaat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan secara umum (Samuda & Suprihartiningsih, 2023; The World Bank, 2017). Dukungan yang sama diberikan ketika Pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang berperan meningkatkan modal manusia di kalangan penerima manfaat dengan memberi mereka akses lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan Becker (1975). Namun keberhasilan program bansos dalam mencapai tujuan tersebut bergantung pada sejauh mana bantuan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh penerima.

Dalam memahami efektivitas pemanfaatan bansos, Teori Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Theory*), Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) dan Teori Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) adalah tiga teori yang sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana bantuan sosial berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan menjaga ketahanan mereka terhadap risiko sosial dan ekonomi. Teori Kebutuhan Dasar yang dikemukakan oleh (Doyal & Gough, 1991) menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk mencapai kesejahteraan. Konsep ini relevan karena bansos dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat miskin, yang menjadi prasyarat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bansos, seperti PKH, secara signifikan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat (Olken et al., 2014). Penelitian (Arfandi et al., 2022; Firmansyah & Solikin, 2019) menemukan, bahwa program bantuan sosial seperti Rastra, PIP, dan PKH telah terbukti secara signifikan mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketidakesetaraan di Indonesia. Program-program ini digambarkan memiliki sifat progresif mutlak, yang berarti mereka lebih bermanfaat bagi segmen masyarakat yang lebih miskin. Namun, studi lain mengindikasikan bahwa keterbatasan akses infrastruktur di wilayah perdesaan seringkali menghambat optimalisasi pemanfaatan bantuan (Laksono et al., 2019; Weeks et al., 2023). Selain itu, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan penerima, pemahaman terhadap tujuan program, dan kemampuan untuk memanfaatkan bantuan secara produktif juga turut mempengaruhi efektivitas program tersebut (Bazzi et al., 2012; Suryahadi & Al-Izzati, 2018).

Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh Becker (1975) menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berkontribusi terhadap ekonomi. Bantuan sosial, khususnya melalui program-program seperti PKH dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), bertujuan untuk meningkatkan modal manusia di kalangan penerima manfaat dengan memberi mereka akses lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga berperan dalam pembangunan kapasitas jangka panjang bagi penerima manfaat.

Lebih jauh, program bantuan sosial juga terkait erat dengan Teori Jaring Pengaman sosial, yang menyatakan bahwa bantuan sosial berfungsi sebagai alat perlindungan bagi kelompok rentan yang menghadapi risiko ekonomi dan sosial. Teori ini berpendapat bahwa intervensi pemerintah melalui bantuan sosial diperlukan untuk mencegah jatuhnya kelompok rentan ke dalam kemiskinan yang lebih parah, terutama dalam situasi krisis ekonomi atau bencana (Sabates-Wheeler & Devereux, 2013).

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai program bantuan sosial, bertujuan untuk menciptakan jaringan pengaman sosial yang dapat melindungi masyarakat dari kerentanan ekonomi, terutama di wilayah perdesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya. Di sisi lain, Teori Jaring Pengaman Sosial memandang bantuan sosial sebagai mekanisme untuk memberikan proteksi sosial kepada individu atau keluarga yang rentan, yang mungkin terjebak dalam siklus kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Program bantuan sosial, seperti PKH, bertujuan untuk memperkuat jaringan pengaman ini, agar keluarga miskin tidak semakin terpuruk dalam kerentanannya. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Saputra & Julia, 2021) menemukan, bahwa program bantuan sosial, khususnya PKH dan PBI, secara signifikan mengurangi kemiskinan di Indonesia, terutama selama penurunan ekonomi, menunjukkan efektivitasnya sebagai jaring pengaman sosial di tengah tantangan seperti pengangguran dan utang pemerintah. Sedangkan (Dinda Pramisa et al., 2023) menyoroti dampak bantuan sosial yang signifikan terhadap pengeluaran pangan rumah tangga miskin, sehingga berkontribusi pada kerangka jaring pengaman sosial yang lebih luas.

Dalam konteks penelitian ini, Teori Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Theory*) yang dikemukakan oleh (Doyal & Gough, 1991) berfungsi untuk memahami bagaimana bantuan sosial memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) oleh (Becker, 1975) menghubungkan bantuan sosial dengan pengembangan modal manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu melalui pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana bantuan sosial tidak hanya memenuhi kebutuhan mendasar, tetapi juga mempersiapkan masyarakat miskin untuk berdaya saing dalam jangka panjang. Selanjutnya, Teori Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net Theory*) menurut (Sabates-Wheeler & Devereux, 2013) memberikan perspektif tambahan yang menjelaskan peran bantuan sosial dalam melindungi kelompok rentan dari kerentanan ekonomi yang lebih dalam. Penelitian ini menghubungkan ketiga teori ini dalam menilai dampak bantuan sosial di Kalurahan Ngargosari, dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan aksesibilitas yang terbatas di wilayah perdesaan.

Implementasi program bantuan sosial di Indonesia menghadapi tantangan utama berupa ketimpangan distribusi dan perbedaan efektivitas antarwilayah, khususnya di daerah perdesaan dan terpencil seperti Kalurahan Ngargosari, yang memiliki keterbatasan akses informasi dan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan transportasi yang buruk dan kurangnya fasilitas umum, memperburuk distribusi informasi mengenai program bantuan sosial. Selain itu, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan langsung tanpa pemahaman yang cukup tentang tujuan jangka panjang program ini seringkali menghambat penerima untuk memanfaatkan bantuan secara optimal. Kondisi ini dapat memunculkan ketidakpuasan sosial di kalangan masyarakat, terutama ketika mereka merasa bahwa bantuan yang diterima tidak cukup untuk mengatasi kerentanan jangka panjang mereka. Runciman (1966), menjelaskan bahwa ketimpangan sosial yang dirasakan oleh masyarakat perdesaan dapat menyebabkan perasaan terisolasi dan ketidakadilan, yang akhirnya memengaruhi keberhasilan jangka panjang program bantuan sosial. Ketidakpuasan sosial ini berpotensi menyebabkan perubahan sikap negatif terhadap program-program pemerintah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas pemanfaatan bantuan sosial.

Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara inklusif, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar bagi program-program seperti PKH, BPNT, dan KIS guna memperbaiki akses terhadap layanan dasar dan mengurangi kerentanan ekonomi (Negara & Tito, 2021; Nugroho et al., 2021; Palaon et al., 2020). Namun, efektivitas program ini masih terkendala oleh distribusi yang tidak merata, infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya tingkat pendidikan penerima, serta pemahaman dan kemampuan penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan secara produktif (Giles & Satriawan, 2015). Efektivitas program-program ini bervariasi antar wilayah dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akurasi dan tata kelola penargetan (Hardjono et al., 2010).

Istiana Hermawati, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana

Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo

Pertanyaan mendasar yang masih harus dijawab adalah sejauh mana efektivitas pemanfaatan bantuan sosial oleh penerima manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Efektivitas pemanfaatan bantuan sosial ini seringkali menjadi isu yang kompleks, terutama di wilayah perdesaan yang memiliki tantangan tersendiri dalam implementasinya. Secara geografis Kalurahan Ngargosari, Kepanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, berada di wilayah perbukitan. Selain keterbatasan akses infrastruktur, kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya memiliki karakteristik tersendiri. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi cara pemanfaatan bantuan sosial yang mereka terima dan tentu akan berdampak pada efektivitasnya, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang menjadi alasan mengapa Kalurahan Ngargosari sangat menarik untuk diteliti.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Tahun 2023 menunjukkan, bahwa penerima bantuan sosial di Kalurahan Ngargosari tahun 2023 sebanyak 501 kepala keluarga (KK) dengan distribusi bantuan per wilayah sebagaimana tergambar pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Penerima Bantuan Sosial di Kalurahan Ngargosari Tahun 2023

No	Dusun	Jumlah Penerima Manfaat	Persentase
1	Ngaliyan	79	15,77
2	Pucung	44	8,78
3	Petet	62	12,38
4	Tegalsari	44	8,78
5	Tritis	52	10,38
6	Trayu	60	11,98
7	Tulangan	33	6,59
8	Ngaliyan Gunung A	42	8,38
9	Ngaliyan Gunung B	23	4,59
10	Canden	30	5,99
11	Nguntuk-untuk	32	6,39
	Jumlah	501	100

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos, Tahun 2023.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat program bantuan sosial di Kalurahan Ngargosari tahun 2023 mencapai 501 Kepala Keluarga (KK), dengan persentase terbanyak (15,77%) di Dusun Ngaliyan, persentase terbanyak kedua (12,38%) di Dusun Petet, dan persentase terbanyak ketiga (11,98%) di Dusun Trayu. Banyaknya penerima manfaat di ketiga lokasi tersebut mengindikasikan tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pemanfaatan bantuan sosial di wilayah ini menjadi sangat penting untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari program bantuan sosial.

Penelitian sebelumnya menunjukkan, bahwa bantuan sosial memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, namun dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan jangka panjang masih menjadi perdebatan (World Bank Group, 2018). Di satu sisi, program seperti PKH telah berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan di kalangan keluarga miskin (Olken et al., 2014). Namun, di sisi lain, beberapa studi juga mengungkapkan bahwa penerima bantuan sering kali mengalami ketergantungan terhadap bantuan

tersebut, sehingga kurang mampu untuk bertransformasi menjadi lebih mandiri secara ekonomi (Brazys, 2018).

Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam cara penerima manfaat di berbagai wilayah memanfaatkan bantuan sosial. Di daerah perkotaan, bantuan sosial lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan, sementara di perdesaan dan wilayah terpencil, bantuan sering kali digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti pembelian bahan pangan dan alat produksi (Laksono et al., 2019; Weeks et al., 2023). Perbedaan ini menunjukkan bahwa latar belakang sosial-ekonomi dan geografis penerima manfaat memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana bantuan sosial digunakan dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka.

Berdasar latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan bantuan sosial oleh penerima manfaat di Kalurahan Ngargosari. Secara khusus, penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana penerima manfaat menggunakan bantuan sosial dan apa dampak bantuan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan atau penurunan kerentanan ekonomi. Dengan memahami dinamika pemanfaatan bantuan sosial di tingkat lokal, diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pengambil kebijakan untuk merancang program-program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, yang tidak hanya memperhatikan keterbatasan geografis, tetapi juga partisipasi aktif penerima manfaat dalam memanfaatkan bantuan secara optimal.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pemanfaatan bantuan sosial (Creswell & Clark, 2017). Desain yang digunakan adalah *concurrent embedded design*, di mana data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan secara bersamaan, dengan fokus utama pada data kuantitatif (Ivankova et al., 2006). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kaya dan menyeluruh, dengan data kuantitatif memberikan gambaran umum tentang karakteristik penerima bantuan sosial, sedangkan data kualitatif memperdalam pemahaman mengenai konteks dan dinamika sosial yang memengaruhi pemanfaatan bantuan sosial di Kalurahan Ngargosari.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Pemilihan lokasi penelitian ini tidak hanya didasarkan pada data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo dan DTKS tahun 2023, tetapi juga pada kenyataan bahwa sekitar 30% penduduk di Ngargosari tergolong dalam penerima bantuan sosial. Ini mencerminkan tingginya ketergantungan penduduk terhadap program bantuan sosial yang sekaligus menggambarkan kerentanan ekonomi tinggi. Kalurahan Ngargosari merupakan wilayah perdesaan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan keterbatasan akses informasi dan infrastruktur. Di wilayah perdesaan seperti ini, ketidakmerataan pemanfaatan bantuan sosial sering kali terjadi, karena penerima manfaat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan bantuan yang diterima. Keterbatasan akses ini menjadi tantangan besar dalam optimalisasi bantuan sosial, terutama dalam pengurangan kerentanannya.

Populasi penelitian adalah seluruh keluarga miskin di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, yang terdaftar dalam DTKS tahun 2023. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Palinkas et al., 2015). Sebanyak 40 responden yang terdiri dari penerima bantuan sosial di empat dusun (Ngaliyan, Petet, Ngaliyan Gunung A, dan Tegalsari) dilibatkan dalam penelitian ini untuk survei kuantitatif. Selain itu, 10 informan kunci dari dusun yang sama juga diwawancarai secara mendalam untuk mendapatkan data kualitatif.

Data dikumpulkan melalui dua metode utama: kuesioner untuk pengumpulan data kuantitatif dan wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur untuk pengumpulan data kualitatif. Data kuantitatif yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif, seperti distribusi frekuensi dan persentase, untuk menggambarkan karakteristik penerima manfaat serta pola pemanfaatan bantuan sosial (Agresti & Finlay, 2008). Sementara itu, analisis data kualitatif dilakukan

Istiana Hermawati, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana

Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo

secara deskriptif interpretatif, di mana temuan dari wawancara dikodekan dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian (Miles et al., 2014). Pendekatan analisis gabungan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks lokal, yang seringkali tidak dapat digambarkan hanya dengan data kuantitatif.

3. Hasil

3.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 40 responden di Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Keempat puluh responden tersebut merupakan penerima bantuan sosial yang berasal dari empat dusun penerima yaitu: dusun Ngaliyan, Ngaliyan Gunung A, Petet dan Tegalsari. Semua responden berjenis kelamin perempuan karena mereka sering kali berperan sebagai pengelola utama keuangan rumah tangga, terutama dalam keluarga berpenghasilan rendah. Kebijakan sosial yang menargetkan perempuan juga berperan besar dalam hal ini, dengan tujuan untuk mendukung peran mereka dalam keluarga dan masyarakat, serta mengurangi kerentanan ekonomi yang lebih tinggi yang mereka hadapi. Dengan memberikan bantuan langsung kepada perempuan, program bansos berupaya untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Karakteristik responden dapat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

No	Karakteristik	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kelompok Umur (Tahun)		
	31-40	10	25
	41-50	20	50
	51-60	10	25
2	Tingkat Pendidikan		
	Tidak tamat SD/ sederajat	2	5
	Tamat SD/ sederajat	9	22,50
	Tamat SMP/ Sederajat	10	25
	Tamat SMA/ sederajat	18	45
	Tamat Diploma I/II/III	1	2,5
3	Status Perkawinan		
	Kawin	36	90
	Cerai Mati	3	7,50
	Cerai Hidup	1	2,50
4	Pekerjaan		
	Ibu Rumah Tangga	29	72,50
	Petani	6	15
	Pedagang	3	7,50
	Buruh Harian	1	2,50
	Buruh Tani	1	2,50

No	Karakteristik	Frekuensi	Persentase (%)
5	Jumlah Tanggungan Keluarga		
	2 orang	2	5
	3 orang	4	10
	4 orang	19	47,50
	5 orang	9	22,50
	6 orang	5	12,50
	7 orang	1	2,50
6	Penghasilan Per bulan		
	< Rp 1.000.000	3	7,50
	Rp 1.001.000 - Rp 2.000.000	26	65
	Rp 2.001.000 - Rp 3.000.000	5	12,50
	Rp 3001.000 - Rp 4.000.000	3	7,50
	Rp 4.001.000 - Rp 5.000.000	3	7,50

Sumber: Analisis data primer, 2024

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasar usia, mayoritas responden (50%) berada dalam kelompok usia 41-50 tahun, yang merupakan rentang usia produktif. Pada usia ini, responden memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga, seperti mengurus anak-anak yang masih sekolah. Berdasar Pendidikan, mayoritas responden (45%) telah menamatkan pendidikan SMA/ sederajat, sedangkan 25% responden tamat SMP/ sederajat, dan 22,5% tamat SD/ sederajat. Hanya sedikit responden yang memiliki pendidikan di atas SMA. Ini berarti, tingkat pendidikan responden relatif rendah, yang bisa menjadi faktor pembatas dalam akses terhadap pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi, sehingga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mereka. Berdasar status perkawinan, mayoritas responden (90%) berstatus kawin, dengan sisanya terdiri dari cerai mati (7,5%) dan cerai hidup (2,5%). Tingginya persentase responden yang berstatus kawin menunjukkan stabilitas sosial, tetapi juga mengindikasikan tanggung jawab besar yang harus ditanggung, terutama jika mereka adalah kepala rumah tangga tunggal (single parent) yang bekerja untuk menghidupi keluarga.

Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden (72,5%) berperan sebagai ibu rumah tangga, sedangkan yang lainnya bekerja sebagai petani (15%), pedagang (7,5%), buruh harian, dan buruh tani (masing-masing 2,5%). Tingginya persentase ibu rumah tangga menunjukkan ketergantungan pada pendapatan suami atau bantuan sosial. Sedikitnya jumlah responden yang bekerja di sektor formal mencerminkan tantangan ekonomi dalam akses terhadap pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan tetap. Berdasar tanggungan keluarga, sebagian besar responden (47,5%) menanggung 4 orang dalam keluarga, diikuti 5 orang tanggungan (22,5%). Hanya sedikit yang memiliki 2 atau 3 orang tanggungan. Jumlah tanggungan yang relatif tinggi menunjukkan beban ekonomi yang besar bagi rumah tangga, terutama dengan pendapatan yang rendah dan keterbatasan akses ke pekerjaan yang baik. Berdasar penghasilan rata-rata per bulan, sebagian besar responden (65%) berpenghasilan antara Rp 1.001.000 - Rp 2.000.000 per bulan. Hanya 7,5% yang berpenghasilan di bawah Rp 1.000.000, dan selebihnya berada di rentang penghasilan yang sedikit lebih tinggi. Pendapatan bulanan yang rendah ini menegaskan kerentanan ekonomi dari sebagian besar rumah tangga dalam penelitian ini, yang mungkin sangat bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan, bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berada pada usia produktif namun memiliki pendidikan yang relatif rendah, yang membatasi akses mereka terhadap pekerjaan dengan penghasilan lebih baik. Sebagian besar responden adalah ibu rumah tangga dengan tanggungan keluarga yang besar dan pendapatan rendah. Hal ini menunjukkan

Istiana Hermawati, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana

Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo

tingginya tingkat ketergantungan pada bantuan sosial untuk menopang kesejahteraan ekonomi keluarga mereka. Program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bisa menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kemiskinan.

3.3 Bantuan Sosial dan Pemanfaatannya bagi Penerima Manfaat

3.2.1 Bantuan Sosial dan Beberapa Aspek Terkait

Bantuan sosial adalah bentuk intervensi pemerintah atau lembaga non-pemerintah untuk membantu individu atau keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Bentuk bantuan ini bisa berupa uang tunai, barang, atau layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima. Bantuan sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mendukung kelompok rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka (Hulme & Barrientos, 2008). Bantuan sosial dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk: (a) Transfer Tunai: Pembayaran langsung dalam bentuk uang kepada individu atau keluarga, (b) Bantuan Pangan: Distribusi makanan atau voucher pangan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, (c) Pelayanan Kesehatan: Akses gratis atau subsidi untuk layanan Kesehatan, (d) Bantuan Pendidikan: Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin, (e) Program Ketenagakerjaan: Pelatihan keterampilan dan penempatan kerja bagi pengangguran atau pekerja informal (Barrientos, 2013).

Program bantuan sosial yang diterima responden ada lima, yaitu: PKH, BPNT, Bantuan Sosial Beras (BSB), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Distribusi responden berdasar program bantuan sosial yang diterima, besar bantuan, sumber bantuan, waktu menerima bantuan dan tempat pencairan bantuan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Program Bantuan Sosial yang Diterima Responden

No	Program Bansos	Besar Bantuan	Sumber Bantuan	Sejak Kapan Menerima	Tempat Pencairan Bantuan
1	PKH	Sesuai komponen, minimal Rp 75.000, maksimal Rp 800.000, dan rata-rata Rp 269.925 per bulan	APBN/Kemensos	2010-2023	BNI, Kantor Pos
2	BPNT	Rp 200.000/bulan	APBN/Kemensos	2018-2022	BNI
3	BSB	10 kg/ bulan	APBN/Kemensos	2023	Kalurahan
4	BLT	100.000/bulan	APBN/Dana Kalurahan	2023	Kalurahan, Kantor Pos
5	PIP	Rp 67.500/bulan (SMP) dan Rp 32.500/bulan (SD)	APBN/ Kemendikbud	2017 & 2023	BRI

Sumber: Analisis data primer, 2024

Data pada Tabel 3 menggambarkan karakteristik bantuan sosial yang diterima responden, yang teridentifikasi menjadi lima kelompok, besar bantuan yang diterima per bulan baik berupa beras

maupun uang (tunai atau transfer), waktu penerimaan bantuan dan tempat pencairan bantuan yang teridentifikasi menjadi tiga kelompok yaitu kantor pos (sebagian PKH dan BLT), Kalurahan (BSB) dan Bank (BNI untuk PKH dan BPNT) dan BRI untuk PIP. Data pada Tabel 4 menunjukkan, bahwa sebagian besar penerima manfaat (47,5%) mendapatkan kombinasi PKH, BPNT, dan BSB. Sedangkan kombinasi PKH dan BPNT diterima oleh 32,5% responden. Kombinasi berbagai jenis bantuan sosial menunjukkan, bahwa keluarga penerima manfaat memiliki kebutuhan yang kompleks dan beragam yang memerlukan lebih dari satu jenis bantuan.

Hal ini juga mencerminkan integrasi berbagai program bantuan untuk mencapai cakupan yang lebih komprehensif dalam mengatasi kemiskinan. Terkait bentuk bantuan sosial, sebagian besar penerima manfaat (50%) menerima bantuan dalam bentuk transfer uang, sementara 42,5% menerima kombinasi transfer uang dan beras. Hanya sebagian kecil yang menerima uang tunai saja (2,5%) atau kombinasi uang tunai dan beras (5%). Besarnya bantuan sosial disalurkan melalui transfer uang, menunjukkan preferensi untuk bentuk bantuan yang lebih fleksibel, memungkinkan penerima manfaat untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Transfer uang juga dianggap lebih efisien dan dapat mengurangi risiko penyimpangan dalam distribusi barang fisik seperti beras. Mayoritas bantuan (95%) disalurkan setiap dua bulan sekali, hanya 5% yang disalurkan setiap tiga bulan sekali. Frekuensi penyaluran yang dominan setiap dua bulan sekali menunjukkan upaya untuk memberikan dukungan yang cukup sering agar penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara kontinu. Frekuensi yang lebih tinggi dapat mengurangi kesulitan finansial antara periode penyaluran dan memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih baik oleh penerima manfaat.

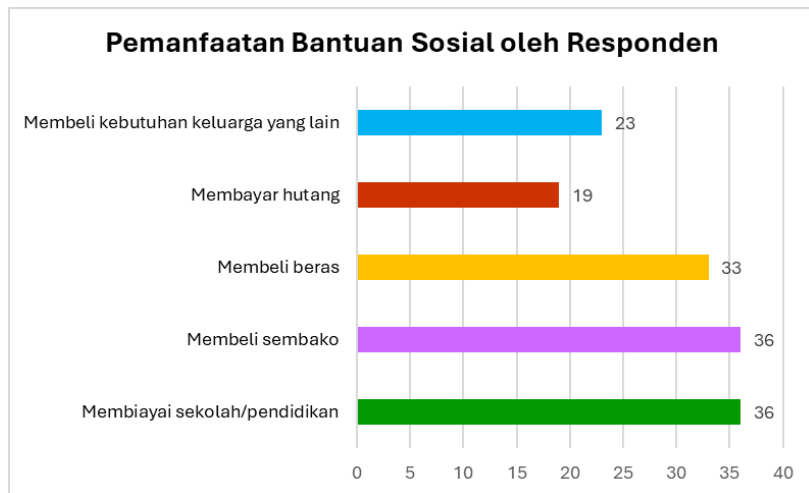
Tabel 4. Jenis, Bentuk dan Periode Bantuan Sosial yang Diterima Responden

No	Aspek	Frekuensi	Persentase (%)
1	Jenis Bantuan Sosial yang Diterima		
	PKH	3	7,50
	PKH dan BPNT	13	32,50
	PKH, BPNT dan PIP	2	5
	PKH dan BSB	2	5
	PKH, BPNT, BSB	19	47,50
	BPNT, BPNT, BLT	1	2,5
2	Bentuk Bantuan Sosial		
	Transfer uang	20	50
	Transfer uang dan beras	17	42,50
	Uang tunai	1	2,5
	Uang tunai dan beras	2	5
3	Periode Penyaluran Bantuan Sosial		
	Dua bulan sekali	38	95
	Tiga bulan sekali	2	5

Sumber: Analisis data primer, 2024

3.2.2. Pemanfaatan Bantuan Sosial Bagi Keluarga Penerima Manfaat

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bantuan sosial yang diterima oleh responden dimanfaatkan secara bervariasi sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pemanfaatan Bantuan Sosial oleh Responden

Berdasar data pada Gambar 1, membiayai sekolah/pendidikan dan membeli sembako adalah dua pemanfaatan bantuan sosial yang paling umum, dengan masing-masing digunakan oleh 36 responden. Ini menunjukkan, bahwa kebutuhan pendidikan dan kebutuhan dasar seperti sembako adalah prioritas utama bagi sebagian besar keluarga yang menerima bantuan sosial. Membeli beras juga merupakan pemanfaatan yang cukup umum, digunakan oleh 33 responden. Ini memperlihatkan, bahwa bantuan sosial sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Membayar hutang dimanfaatkan oleh 19 responden. Ini menunjukkan, bahwa sebagian penerima bantuan sosial menggunakan dana yang diterima untuk mengurangi beban finansial yang mungkin telah mereka tanggung sebelumnya. Membeli kebutuhan keluarga yang lain dipilih oleh 23 responden, menunjukkan bahwa ada kebutuhan lain di luar pendidikan dan pangan yang juga penting untuk dipenuhi.

Data ini mengindikasikan, bahwa bantuan sosial sangat penting untuk kebutuhan primer seperti pendidikan dan makanan. Keluarga yang menerima bantuan ini cenderung memprioritaskan hal-hal yang berhubungan dengan kelangsungan hidup sehari-hari dan investasi masa depan anak-anak mereka. Jumlah responden yang menggunakan bantuan sosial untuk membayar hutang (19 orang) menunjukkan bahwa ada beban hutang yang signifikan di antara sebagian penerima bantuan. Ini bisa menjadi indikasi adanya ketergantungan pada hutang untuk menutupi kebutuhan dasar sebelum mendapatkan bantuan. Fakta bahwa 23 responden menggunakan bantuan sosial untuk kebutuhan keluarga lainnya menunjukkan adanya kebutuhan tambahan yang tidak tercakup dalam kategori-kategori utama. Ini bisa mencakup berbagai hal mulai dari kesehatan, pakaian, hingga kebutuhan khusus lainnya.

Secara kualitatif terungkap, kemanfaatan bantuan sosial dapat tergambar dari penuturan informan sebagai berikut:

"Bantuan sosial sangat bermanfaat untuk membantu biaya pengeluaran anak, terutama pendidikan. Kebutuhan dasar kini bisa terpenuhi dengan lebih baik." (Tarmiyati, Ibu Rumah Tangga, 42 tahun).

"Dengan bantuan sosial, keluarga kami bisa memulai usaha kecil-kecilan, yang membantu meningkatkan pendapatan keluarga." (Siti Mudamidah, Ibu Rumah Tangga, 26 tahun).

"Bantuan ini sangat membantu untuk kebutuhan pendidikan anak, sehingga anak-anak kami tidak putus

sekolah." (Wasidah, Ibu Rumah Tangga, 42 tahun);

"Bantuan yang diberikan memudahkan saya untuk membeli keperluan sekolah anak, terutama untuk buku-buku yang sebelumnya sulit terpenuhi." (Titik Sulistyowati, Buruh Harian, 40 tahun).

"Bantuan sosial membantu kebutuhan sehari-hari, dan ini memungkinkan anak saya untuk tetap melanjutkan sekolah tanpa harus khawatir soal biaya." (Siti Halimah, Ibu Rumah Tangga, 28 tahun).

Kutipan-kutipan ini menggambarkan bahwa bantuan sosial sangat membantu informan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama terkait pendidikan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam banyak kasus, hasil kuantitatif (seperti "membiayai pendidikan" atau "membeli sembako") sejalan dengan wawancara yang menyebut bantuan tersebut membantu kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, dan sebagainya.

3.3. Bantuan Sosial dan Kontribusinya pada Kesejahteraan Keluarga

3.3.1 Kondisi Kesejahteraan Keluarga Responden

Tingkat kesejahteraan keluarga responden dianalisis dengan membandingkan rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan dengan standar garis kemiskinan. Pengeluaran rumah tangga petani dikategorikan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk konsumsi dan non konsumsi. Pengeluaran untuk konsumsi sehari-hari dapat dimaknai sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral dan lainnya. Sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan non-konsumsi diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan listrik, BBM, pulsa, pendidikan, transportasi, sosial dan lainnya.

Berdasar hasil survei, diketahui bahwa besar pengeluaran rata-rata keluarga responden per bulan untuk konsumsi, yang terendah sebesar Rp 405.000 tertinggi Rp. 1.210.000 dan rata-rata Rp 734.825. Sedangkan pengeluaran rata-rata keluarga responden per bulan untuk non konsumsi terendah Rp. 570.000 tertinggi Rp 2.585.000 dan rata-rata adalah Rp. 1.242.000. Adapun pengeluaran rata-rata keluarga responden per bulan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan non konsumsi, terendah Rp. 1.232.000 tertinggi Rp 3.593.000 dan rata-rata Rp. 1.977.725 sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.

Tabel 5. Pengeluaran Rata-rata per Bulan untuk Kebutuhan Konsumsi, Non Konsumsi dan Total Konsumsi & Non konsumsi

No	Aspek	Pengeluaran Per Bulan		Total Pengeluaran untuk Konsumsi & Non Konsumsi
		Konsumsi (Rupiah)	Non Konsumsi	
1	Minimal	405.000	570.000	1.232.000
2	Maksimal	1.210.000	2.585.000	3.593.000
3	Rata-rata	734.825	1.242.000	1.977.725

Sumber: Analisis data primer, 2024

Total pengeluaran rumah tangga sebagaimana terlihat pada Tabel 5 memperlihatkan jumlah keseluruhan yang dihabiskan oleh rumah tangga dalam waktu sebulan. Rata-rata total pengeluaran sebesar Rp 1.977.725 mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga mengalokasikan hampir dua juta rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik konsumsi maupun non-konsumsi. Variasi pengeluaran minimum dan maksimum menunjukkan adanya perbedaan dalam kemampuan ekonomi di antara responden, dengan beberapa rumah tangga mungkin memiliki sumber daya yang lebih besar atau kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain.

Data pada Tabel 5 juga mengindikasikan adanya kerentanan ekonomi yang dialami responden. Rata-rata pengeluaran yang relatif rendah menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki pendapatan yang terbatas, sehingga pengeluaran mereka juga terbatas pada kebutuhan-

Istiana Hermawati, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana

Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo

kebutuhan dasar. Pengeluaran non-konsumsi yang lebih tinggi dari konsumsi menunjukkan, bahwa banyak rumah tangga memiliki komitmen yang signifikan terhadap kebutuhan di luar konsumsi langsung, seperti pendidikan atau hutang. Ini bisa menjadi indikator tekanan finansial yang tinggi pada rumah tangga tersebut. Mengingat pengeluaran yang terbatas dan tekanan finansial yang tinggi, maka bantuan sosial sangat diperlukan untuk membantu meringankan beban rumah tangga, terutama dalam memenuhi kebutuhan non-konsumsi yang mendesak.

Kondisi kesejahteraan responden berbeda-beda. Untuk menentukan tingkat kesejahteraan responden adalah dengan membandingkannya dengan standar pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita dapat dimaknai sebagai biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Apabila keluarga tidak bisa mencapai standar pengeluaran perkapita, maka dapat dikatakan posisinya berada di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama satu bulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Biro Pusat Statistik Indonesia menetapkan garis kemiskinan pada Maret 2023 sebesar Rp. 550.458 per kapita per bulan. Jumlah itu terdiri dari Rp. 408.522 (74,21%) per kapita per bulan untuk pengeluaran makanan, dan Rp 141.936 (25,79%) per kapita per bulan untuk pengeluaran non makanan. Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka Garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp. 2.592.657 per rumah tangga per bulan (BPS, 2023). Untuk Kabupaten Kulon Progo, GK sebesar Rp 416.870 per kapita per bulan. Kalau jumlah anggota rumah tangga rata-rata empat sebagaimana temuan penelitian ini, berarti besar per kapita Rp. 1.667.480/rumah tangga/bulan. Penduduk dikatakan miskin kalau pengeluaran per kapita di bawah Rp 416.870 (personal) atau di bawah Rp1.667.480 (rumah tangga). Kemiskinan ekstrim (UN,1996) adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pd layanan sosial. Indikator kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang berpendapatan di bawah US\$1,91 PPP (*purchasing power parity*) per kapita per hari. Besar index kemiskinan ekstrem per orang/bulan adalah $Rp11.941 \times 30 = Rp. 358.230$, untuk rumah tangga Rp. 1.533.230 per rumah tangga per bulan. Atas dasar analisis tersebut, maka kondisi kesejahteraan rumah tangga responden jika dibandingkan garis kemiskinan nasional (sebesar Rp. 2.592.657 per rumah tangga per bulan), maka sebagian besar (85%) rumah tangga responden di bawah garis kemiskinan nasional. Jika dibandingkan garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo (sebesar Rp. 1.667.480 per rumah tangga per bulan), maka mayoritas (40%) rumah tangga petani di Kabupaten Kulon Progo berada di bawah garis kemiskinan. Dibandingkan garis kemiskinan ekstrim (sebesar Rp. 1.533.230 per rumah tangga per bulan), maka terdapat 20% rumah tangga petani di Kabupaten Kulon Progo berada di bawah garis kemiskinan ekstrim.

Tabel 6. Status Kesejahteraan Responden Berdasarkan Standar Garis Kemiskinan (GK)

< GK Nasional		> GK Nasional		< GK Kulon Progo		> GK Kulon Progo		< GK Ekstrem		> GK Ekstrem	
Rp 2.592.657/Rumah Tangga/Bulan				Rp 1.667.480/Rumah Tangga/Bulan				Rp 1.533.230/Rumah Tangga/Bulan			
f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
3	85	6	15	16	40	24	60	8	20	32	80

Sumber: Analisis data primer, 2024

Berdasar hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar keluarga dalam penelitian ini hidup dengan pendapatan yang sangat rendah. Artinya, mereka tak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan dalam kondisi rentan pangan. Ini menekankan perlunya intervensi bantuan sosial yang lebih kuat dan terarah untuk kelompok ini.

Secara kualitatif, terkait perubahan kesejahteraan yang dialami keluarga informan setelah menerima bantuan sosial, berikut adalah tujuh kutipan yang mewakili pandangan para informan:

"Setelah menerima bantuan, saya bisa mencukupi kebutuhan sekolah anak, terutama untuk buku-buku yang sebelumnya sulit kami beli." (Titik Sulistyowati, Buruh Harian, 40 tahun).

"Bantuan ini sangat membantu, sekarang saya bisa mencukupi kebutuhan anak-anak untuk sekolah, sehingga mereka tidak putus sekolah." (Santo Tri Sulistiyani, Pedagang, 38 tahun).

"Kini saya bisa menyekolahkan anak-anak hingga ke tingkat SLTA tanpa harus khawatir soal biaya, yang sebelumnya menjadi kendala besar." (Sulasmi, Ibu Rumah Tangga, 45 tahun).

"Dengan bantuan ini, saya bisa membeli makanan yang bergizi untuk lansia di keluarga kami, meningkatkan kesehatan mereka." (Wasiyah, Pedagang, 50 tahun).

"Bantuan sosial ini membantu saya untuk memenuhi perlengkapan sekolah anak, yang sebelumnya menjadi beban berat bagi keluarga kami." (Nur Hidayah, Pedagang, 35 tahun).

"Dengan bantuan ini, anak saya tetap bisa bersekolah, tidak perlu khawatir putus sekolah karena kekurangan biaya." (Wasidah, Ibu Rumah Tangga, 42 tahun).

"Bantuan sosial ini sangat membantu, sekarang saya bisa membeli buku dan perlengkapan sekolah yang dibutuhkan anak." (Titik Sulistyowati, Buruh Harian, 40 tahun).

Kutipan hasil wawancara dengan sejumlah informan menggambarkan, bahwa pasca menerima bantuan sosial, kesejahteraan informan dan keluarganya meningkat, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan anak-anak mereka. Bahkan terungkap, bahwa bantuan sosial yang diterima juga sangat berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan lansia yang menjadi tanggungan keluarga.

3.3.2 Efektivitas Bantuan Sosial untuk Mengurangi Kerentanan Ekonomi

Efektivitas bantuan sosial, dilihat dari kontribusi bansos terhadap pendapatan dan pengeluaran keluarga. Rata-rata bantuan sosial yang diterima per keluarga responden per bulan adalah Rp 434.925. Bantuan sosial berkontribusi terhadap 4% hingga 58,9% dari total pendapatan keluarga, dan 4,89% hingga 47,18% dari total pengeluaran keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial berkontribusi secara signifikan bagi keluarga dengan tingkat pendapatan rendah, membantu mereka bertahan dari guncangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan mendesak. Kontribusi Bantuan Sosial terhadap pendapatan dan pengeluaran keluarga responden dapat digambarkan pada Tabel 7.

Data pada Tabel 7, menunjukkan, bahwa kontribusi bantuan sosial pada keluarga responden sangat bervariasi. Semakin kecil pendapatan atau pengeluaran keluarga, maka semakin besar kontribusi yang diberikan oleh bantuan sosial. Sebaliknya, semakin besar pendapatan atau pengeluaran keluarga, maka kontribusi yang diberikan bansos relatif kecil persentasenya.

Tabel 7. Kontribusi Bantuan Sosial terhadap Pendapatan & Pengeluaran Keluarga Per Bulan

Istiana Hermawati, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana

Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo

	Bantuan Sosial (Rupiah)	Total Pendapatan Keluarga (Rupiah/bln)	Total Pengeluaran Keluarga (Rupiah/bln)	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)	Kontribusi Terhadap Pengeluaran (%)
Minimal	75.000	775.000	1.232.000	4	4,89
Maksimal	1.075.000	4.875.000	3.593.000	58,9	47,18
Rerata	434.925	1.940.675	1.977.725	25,87	23,26

Sumber: Analisis data primer, 2024

Merujuk pada Tabel 6 tentang kondisi kesejahteraan responden, terlihat bahwa sebanyak 80% keluarga berhasil melampaui garis kemiskinan ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial efektif dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka atau membantu mereka mencapai level kesejahteraan yang lebih baik. Dengan kalimat lain, bantuan sosial sangat membantu dalam mengurangi kerentanan ekonomi, terutama bagi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Namun, ketika diukur berdasarkan Garis Kemiskinan Nasional, 85% responden masih berada di bawah garis ini, menunjukkan bahwa meskipun bantuan sosial dapat mengurangi kerentanan, masih banyak keluarga yang membutuhkan dukungan lebih besar untuk benar-benar keluar dari kemiskinan. Ini berarti, efektivitas bansos dalam mengangkat keluarga di atas garis kemiskinan nasional tetap terbatas, menandakan perlunya dukungan tambahan yang lebih holistik, seperti peluang kerja atau pendidikan yang lebih baik, untuk mengurangi ketergantungan jangka panjang.

4. Pembahasan

Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang krusial dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial yang dapat digunakan penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Bagi banyak keluarga penerima manfaat, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, melainkan sebagai komponen penting dalam strategi bertahan hidup mereka. Bantuan tersebut membantu mengurangi beban ekonomi dan memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup.

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan pendidikan, serta untuk menyelesaikan persoalan finansial seperti membayar hutang dan memenuhi kebutuhan keluarga lainnya. Temuan ini relevan dengan Teori Kebutuhan Dasar (Doyal & Gough, 1991; Salecker et al., 2020; Streeten & Burki, 1978)), yang menyatakan bahwa bantuan sosial memiliki peran kritis dalam memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori ini, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, bantuan sosial bertujuan menjamin bahwa kelompok masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan tersebut (Ravallion et al., 2009). Penelitian ini menemukan bahwa bantuan sosial yang diterima, seperti PKH, BPNT, dan PIP, digunakan oleh penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan, konsisten dengan prinsip-prinsip Teori Kebutuhan Dasar.

Selain itu, temuan bahwa bantuan sosial digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak

mendukung Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh Becker (1975) Teori ini menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah investasi penting dalam modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas individu, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan menggunakan bantuan sosial untuk membiayai pendidikan, penerima manfaat berinvestasi dalam peningkatan potensi ekonomi keluarga mereka di masa depan.

Dalam kerangka Teori Jaring Pengaman Sosial, bantuan sosial berfungsi sebagai alat untuk melindungi rumah tangga miskin dari guncangan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau bencana alam. Program bantuan sosial memberikan stabilitas ekonomi dan sosial yang penting bagi keluarga miskin, dengan mencegah mereka jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan (Holzmann & Jørgensen, 2001; World Bank Group, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa penerima manfaat menggunakan bantuan sosial untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan mendesak lainnya, yang menegaskan fungsi bantuan sosial sebagai jaring pengaman yang melindungi keluarga dari ketidakstabilan ekonomi.

Teori Deprivasi Relatif pertama kali diperkenalkan oleh (W. Runciman, James A. Geschwender, 1966) dalam bukunya yang berjudul "*Relative Deprivation and Social Justice: A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth-Century England*". Runciman membahas konsep ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan melalui lensa deprivasi relatif. Deprivasi relatif adalah perasaan seseorang bahwa mereka kurang beruntung dibandingkan dengan orang lain dalam kelompok referensi mereka, meskipun mereka mungkin tidak miskin secara absolut. Runciman menggunakan survei dan data historis untuk mengeksplorasi bagaimana perasaan ketidakadilan ini mempengaruhi sikap dan perilaku sosial di Inggris pada abad ke-20. Buku ini juga membahas bagaimana ketidaksetaraan sosial dipersepsikan oleh berbagai kelas sosial dan bagaimana perasaan ketidakadilan dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik. Teori Deprivasi Relatif berhubungan erat dengan kemiskinan karena teori ini menjelaskan bagaimana perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan muncul ketika individu atau kelompok merasa bahwa mereka kurang beruntung dibandingkan dengan orang lain di sekitar mereka. Dalam konteks penelitian ini, penerima manfaat mungkin merasa lebih stabil secara ekonomi dibandingkan dengan kondisi mereka sebelumnya atau dibandingkan dengan individu yang tidak menerima bantuan. Penggunaan bantuan sosial untuk pendidikan dan pangan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi deprivasi relatif, dengan tujuan mencapai standar hidup yang lebih baik daripada kondisi sebelum menerima bantuan.

Temuan juga menunjukkan bahwa kombinasi berbagai jenis bantuan sosial, seperti PKH, BPNT, dan PIP, memberikan dampak yang lebih signifikan. Studi oleh World Bank (2018) menunjukkan bahwa jaring pengaman sosial yang terdiri dari berbagai bentuk bantuan lebih efektif dalam mengurangi kerentanan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Hal ini didukung oleh temuan penelitian ini, di mana mayoritas penerima mendapatkan lebih dari satu jenis bantuan, yang memungkinkan mereka memenuhi berbagai kebutuhan secara lebih komprehensif.

Namun, terdapat perbedaan antara temuan kuantitatif dan kualitatif terkait penggunaan bantuan sosial untuk membayar hutang. Meskipun survei menunjukkan bahwa 19 responden memanfaatkan bantuan untuk membayar hutang, wawancara kualitatif tidak mengungkapkan pernyataan eksplisit mengenai hal tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor: (1) rasa malu atau enggan mengakui bahwa bantuan digunakan untuk membayar hutang, (2) kecenderungan informan untuk lebih fokus pada manfaat positif, seperti pendidikan dan kesehatan, atau (3) faktor sosial dan budaya yang membuat penggunaan bantuan untuk membayar hutang dianggap tabu atau tidak layak untuk disampaikan. Dengan demikian, meskipun kemungkinan bantuan digunakan untuk membayar hutang tetap ada, informan mungkin merasa enggan untuk menyampaikannya secara terbuka.

Secara keseluruhan, bantuan sosial terbukti efektif dalam membantu penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kerentanan ekonomi. Banyak studi, seperti yang dilakukan oleh World Bank dan UNICEF, menunjukkan bahwa bantuan sosial dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan

Istiana Hermawati, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana

Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo

stabilitas ekonomi keluarga. Penelitian ini mendukung temuan tersebut, bahwa bantuan sosial digunakan untuk pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya, mencerminkan efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program dalam jangka panjang, diperlukan reformasi struktural serta program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar keluarga penerima manfaat dapat mencapai kemandirian ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan sosial.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menerima kombinasi bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BSB, yang digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pangan dan pendidikan, serta untuk mengatasi masalah finansial seperti hutang. Peran perempuan sebagai pengelola utama bantuan sosial dalam rumah tangga menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Bantuan sosial berperan signifikan dalam menyediakan jaring pengaman ekonomi bagi keluarga miskin, dengan kontribusi terhadap pendapatan keluarga berkisar antara 4% hingga 58,9% dan terhadap pengeluaran antara 4,89% hingga 47,18%. Meskipun 80% keluarga penerima manfaat berhasil melampaui garis kemiskinan ekstrem, 85% masih berada di bawah garis kemiskinan nasional, menandakan bahwa bantuan sosial belum cukup untuk sepenuhnya mengentaskan mereka dari kemiskinan sehingga diperlukan dukungan tambahan untuk mencapai kemandirian ekonomi atau tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori dan studi empiris yang menekankan peran bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, terutama di wilayah perdesaan, khususnya di Kalurahan Ngargosari yang menjadi lokus penelitian ini. Namun, untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan efektivitas program bantuan sosial melalui penargetan yang lebih akurat dan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

6. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial: (1) Penargetan yang Lebih Akurat: Diperlukan perbaikan dalam sistem penentuan penerima bantuan sosial untuk memastikan bahwa bantuan mencapai kelompok yang paling membutuhkan. Pemutakhiran data dan penggunaan teknologi yang lebih baik dapat membantu meningkatkan akurasi penargetan; (2) Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan: Bantuan sosial perlu didukung oleh program pemberdayaan ekonomi agar keluarga penerima manfaat dapat mencapai kemandirian finansial. Pelatihan keterampilan dan akses kepada modal usaha harus menjadi bagian integral dari program bantuan sosial; (3) Peningkatan Akses Pendidikan: Mengingat banyaknya responden yang memanfaatkan bantuan sosial untuk pendidikan, pemerintah perlu memperluas program beasiswa atau bantuan biaya sekolah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat terus mengakses pendidikan berkualitas, yang merupakan investasi jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan antar generasi; (4) Peningkatan Peran Perempuan: Mengingat peran perempuan yang signifikan dalam pengelolaan bantuan sosial, perlu adanya program khusus yang fokus pada pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan peningkatan kapasitas ekonomi perempuan. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga; (5) Peningkatan Edukasi dan

Sosialisasi: Penerima manfaat harus mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengelola bantuan secara efektif untuk kebutuhan jangka panjang, termasuk pendidikan dan kesehatan, sehingga dampak bantuan dapat lebih berkelanjutan; (6) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan digunakan sesuai tujuan. Evaluasi berkala akan memungkinkan program bantuan sosial terus berkembang dan tetap relevan dengan kebutuhan penerima berdasarkan data aktual. Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan program bantuan sosial dapat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi bagi masyarakat yang paling rentan.

Ucapan terimakasih: Terima kasih disampaikan kepada P3M STPMD “APMD” atas fasilitasi dana riset individual yang diberikan, Perangkat Kalurahan Ngargosari, Pendamping PKH Kalurahan Ngargosari (mba Ika dan Mas Nuryanto), responden dan informan penelitian atas kerjasama dan data yang diberikan sehingga penelitian ini bisa diselesaikan.

Daftar Pustaka

- Agresti, A., & Finlay, B. (2008). *Statistical Methods for the Social Sciences* (4th ed.). Prentice Hall.
- Arfandi, R. Z., Studi, P., Pembangunan, E., Trisakti, U., Studi, P., Ekonomi, I., & Trisakti, U. (2022). Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Program Utama Bansos di Indonesia. *Media Ekonomi*, 30(1), 1–15.
- Barrientos, A. (2013). The Rise of Social Assistance in Brazil. *Development and Change*, 44(4), 887–910. <https://doi.org/10.1111/dech.12043>
- Bazzi, S., Sumarto, S., & Suryahadi, A. (2012). Evaluating Indonesia unconditional cash transfer program, 2005–6. 3ieimpact.Org, October. https://www.3ieimpact.org/sites/default/files/2019-05/ow176_finalreport_Indonesia_unconditional_cashtransfer.pdf
- Becker, G. S. (1975). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (2nd ed.). Columbia University Press. <https://doi.org/10.1001/archneur.1986.00520010054022>
- Brazys, S. (2018). Aid dependence as aid persistence? Non-declining aid and growth. *Journal of International Relations and Development*, 21(3), 717–738. <https://doi.org/10.1057/s41268-017-0087-z>
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Creswell John W, Clark Vicki L Plano - Designing and Conducting Mixed Methods Research*-SAGE Publications (2018).
- Dinda Pramisita, A. A., Nyoman Saskara, I. A., Marhaeni, A. A. I. N., & Wiwin Setyari, N. P. (2023). Analysis of the Effectiveness and Impact of Cash Social Assistance of the Covid-19 Pandemic on Consumption Expenditures of Poor Households (Muslim Majority) in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 527–546. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i2.2242>
- Doyal, L., & Gough, I. (1991). *A Theory of Human Need*. Macmillan.
- Firmansyah, A. D., & Solikin, A. (2019). Who Gains From Social Assistances? Rastra, Pip, And Pkh Programs In Indonesia . *Jurnal BPP: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(1), 53–70. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i1.372>
- Giles, J., & Satriawan, E. (2015). Protecting child nutritional status in the aftermath of a financial crisis: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*, 114, 97–106. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2014.12.001>

Istiana Hermawati, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana

Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo

- Hardjono, J., Akhmadi, N., And, & Sumarto, S. (2010). Poverty and Social Protection in Indonesia. In Books and Monographs (pp. xv–xx). Publisher: ISEAS–Yusof Ishak Institute; Cambridge University Press (online).
- Holzmann, R., & Jørgensen, S. (2001). Social Risk Management: A New Conceptual Framework for Social Protection, and Beyond. *International Tax and Public Finance*, 8(4), 529–556.
<https://doi.org/10.1023/A:1011247814590>
- Hulme, D., & Barrientos, A. (2008). Social Protection for the Poor and Poorest in Developing Countries: Reflections on a Quiet Revolution. *SSRN Electronic Journal*, November.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1265576>
- Ivankova, N. V, Creswell, J. W., & Stick, S. L. (2006). Using mixed-methods sequential explanatory design: From theory to practice. *Field Methods*, 18(1), 3–20. <https://doi.org/10.1177/1525822X05282260>
- Kementerian Sosial RI. (2020). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Laksono, A. D., Dwi Wulandari, R., & Soedirham, O. (2019). Urban and Rural Disparities in Hospital Utilization among Indonesian Adults. *Iranian Journal of Public Health*, 48(2), 247–255.
<https://doi.org/10.18502/ijph.v48i2.819>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Negara, S. D., & Tito, M. O. (2021). Indonesia's Economic Recovery Programmes: Progress and Challenges. *Perspective*, 135, 1–13.
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty eradication programs in Indonesia: Progress, challenges and reforms. *Journal of Policy Modeling*, 43(6), 1204–1224.
<https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002>
- Olken, B. A., Onishi, J., & Wong, S. (2014). Should Aid Reward Performance? Evidence from a Field Experiment on Health and Education in Indonesia. *American Economic Journal: Applied Economics*, 6(4), 1–34.
<https://doi.org/10.1257/app.6.4.1>
- Palaon, H., Wiryono, S. K., & Faturhman, T. (2020). Boosting financial inclusion through social assistance reform: Evidence-based approach in selecting a payment system. *Enterprise Development and Microfinance*, 31(4), 284–299. <https://doi.org/10.3362/1755-1986.20-00013>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544.
<https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Ravallion, M., Chen, S., & Sangraula, P. (2009). Dollar a day revisited. *World Bank Economic Review*, 23(2), 163–98

184. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/wber/lhp007>

Salecker, L., Ahmadov, A. K., & Karimli, L. (2020). Contrasting Monetary and Multidimensional Poverty Measures in a Low-Income Sub-Saharan African Country. *Social Indicators Research*, 151(2), 547–574. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02382-z>

Samuda, S. J. A., & Suprihartiningsih, E. (2023). COVID-19 Social Assistance Program and Poverty: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 125–134. <https://doi.org/10.29259/jep.v20i2.19088>

Saputra, D., & Julia, J. (2021). Non-Parametric Approach to Measuring Accuracy Of Social Assistance Programs in The Middle of Indonesian Economic Downturn. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN)*, 4(2), 102–111. <https://doi.org/10.31002/rn.v4i2.3639>

Streeten, P., & Burki, S. J. (1978). Basic needs: some issues. *World Development*, 6(3), 411–421. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X\(78\)90116-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X(78)90116-X)

Suryahadi, A., & Al-Izzati, R. (2018). Cards for the Poor and Funds for Villages: Jokowi Initiatives to Reduce Poverty and Inequality. In *SMERU Working Paper*. <https://doi.org/10.1355/9789814843102-015>

The World Bank. (2017). *Indonesia Social Assistance Reform Program: Technical Assessment*. World Bank Group.

W. Runciman, James A. Geschwender. (1966). Relative deprivation and social justice: a study of attitudes to social inequality in twentieth-century England. *American Sociological Association*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2091734>

Weeks, W. B., Chang, J. E., Pagán, J. A., Lumpkin, J., Michael, D., Salcido, S., Kim, A., Speyer, P., Aerts, A., Weinstein, J. N., &


Lavista, J. M. (2023). Rural-urban disparities in health outcomes, clinical care, health behaviors, and social determinants of health and an action-oriented, dynamic tool for visualizing them. *PLOS Global Public Health*, 3(10), e0002420. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0002420>

World Bank Group. (2018). *The State of Social Safety Nets 2018*. The World Bank.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Pengasuhan Alternatif dalam Masyarakat Tradisional: Studi Kesejahteraan Anak di Dusun Gunung Loncek, Kalimantan Barat

Indah Listyaningrum^{1*} 

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Indonesia

* Korespondensi: indah.listyaningrum@fisip.untan.ac.id

Diterima: 17 September 2024; Disetujui: 3 Desember 2024; Diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstrak: Pengasuhan anak merupakan faktor penting untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak. Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan, pemahaman mengenai sistem pengasuhan anak di masyarakat adat, terutama yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, masih sangat kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sistem pengasuhan alternatif pada masyarakat Dayak Kanayatn di Dusun Gunung Loncek dan mengidentifikasi faktor protektif dan risiko yang ada. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan dua bentuk utama pengasuhan alternatif, yaitu pengasuhan oleh kerabat berdasarkan hubungan darah (pengasuhan kekerabatan) dan melalui prosesi adat *pangarusant* (pengasuhan angkat anak). Kedua bentuk pengasuhan ini memiliki akar budaya yang kuat dan dirancang untuk memastikan kesejahteraan anak secara holistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengasuhan alternatif di masyarakat Dayak Kanayatn memiliki faktor perlindungan yang mendukung perkembangan anak sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Temuan ini memiliki implikasi bagi pengembangan Pekerjaan Sosial Berbasis Budaya, yang menunjukkan bahwa integrasi praktik pengasuhan anak secara tradisional dapat memperkaya strategi pekerjaan sosial yang lebih peka terhadap budaya. Penelitian ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengasuhan anak di masyarakat adat.

Kata kunci: pengasuhan alternatif, kesejahteraan anak, nilai budaya, pekerjaan sosial berbasis budaya

Abstract: *Childcare is essential in supporting children's development and well-being. Many studies have been conducted. However, there still needs to be a greater understanding of parenting systems in Indigenous communities, especially those that integrate local cultural values. This study aims to explore alternative parenting systems in Dayak Kanayatn communities in Gunung Loncek Hamlet and identify the protective and risk factors that influence the parenting system for children. Using a descriptive qualitative approach, the results showed two primary forms of alternative care: care by relatives based on blood relations (kinship care) and through the traditional procession of pangarusant (foster care). Both forms of foster care have strong cultural roots and are designed to ensure holistic child welfare. This research concludes that alternative care systems in the Dayak Kanayatn community have protective factors that support child development while preserving local cultural values. The findings have implications for developing culture-based social work; integrating traditional parenting practices can enrich social work strategies by considering cultural aspects. The research also emphasizes the importance of cultural context in developing childcare policies and practices in Indigenous communities.*

Keywords: *alternative care, child welfare, cultural values, culture-based social work*

1. Pendahuluan

Secara umum, idealnya anak diasuh oleh orang tua dalam lingkup keluarga inti, yang merupakan unit sosial terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak (Khairuddin, 1997). Keluarga inti ini berfungsi sebagai fondasi pertama bagi perkembangan anak, di mana anak belajar nilai-nilai dasar, norma, dan perilaku yang akan membentuk kepribadian mereka di masa depan. Namun, dalam beberapa kasus, anak juga dapat diasuh oleh keluarga pengganti. Gunarsa (2006) menyebutnya sebagai "pengasuh". Pengasuh ini merujuk pada individu-individu yang bertugas merawat anak-anak, baik

<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk/article/view/3378>

DOI : [10.33007/ska.v14i1.3378](https://doi.org/10.33007/ska.v14i1.3378)

berasal dari latar belakang profesional maupun non-profesional. Dalam konteks ini, pengasuhan tidak hanya terbatas pada hubungan biologis, tetapi juga mencakup hubungan sosial yang lebih luas, di mana individu lain dalam komunitas dapat berperan sebagai pengasuh.

Kegiatan penitipan anak melibatkan serangkaian upaya yang bertujuan untuk memastikan perkembangan optimal dan kesejahteraan anak (Hoghughi, 2004). Proses ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, hingga pendidikan anak. Pengasuhan yang tepat sangat penting untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tahap usia, terutama pada masa awal kehidupan anak, yang sering disebut sebagai "tahun emas". Tahun emas ini merupakan periode kritis di mana anak mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek, termasuk kognitif, sosial, dan emosional. Freud (dalam Sarwono, 2002) menekankan bahwa periode ini memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian dan akan berdampak pada perkembangan psikologis anak di masa mendatang. Oleh karena itu, pengasuhan yang baik selama periode ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat secara mental dan emosional.

Peran orang tua dalam pengasuhan anak memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan kepribadian anak. Orang tua berfungsi sebagai model bagi anak, di mana sikap dan perilaku mereka akan ditiru oleh anak. Hal ini disebabkan oleh peran fundamental orang tua dalam memberikan pengasuhan sejak dini (Supanto, 1990). Pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua akan membentuk cara anak berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana mereka memahami dunia di sekitar mereka. Pola pengasuhan juga berperan penting dalam proses sosialisasi di dalam keluarga, yang merupakan lembaga pertama yang mengenalkan dan mendorong internalisasi nilai-nilai budaya (Garna, 1996). Melalui interaksi sehari-hari, anak belajar tentang norma-norma sosial, etika, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat mereka.

Setiap orang tua memiliki pola pengasuhan yang unik, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, pengalaman pribadi, dan nilai budaya. Kebutuhan dasar anak, yang meliputi aspek fisik, emosional, dan stimulasi mental, harus dipenuhi agar pertumbuhannya optimal. Pola pengasuhan yang tidak tepat dapat mengakibatkan masalah dan meningkatkan risiko gangguan kepribadian, yang tercermin dari data statistik yang menunjukkan sekitar 20% anak mungkin terpengaruh (Prasetya, 2003). Penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan alternatif, seperti dari orang tua pengganti, memiliki peran penting dalam perkembangan kemandirian dan kreativitas anak (Ginitasari, 2009). Selain itu, kualitas pengasuhan yang baik, yang dipengaruhi oleh pendidikan ibu, memiliki dampak positif signifikan terhadap perkembangan anak (Zeitlin, 1990; Sunarto, 1995; Mahlia, 2009; Herlina, 2013; Supanto, 1990; Maccoby, 1980). Oleh karena itu, perhatian terhadap pola pengasuhan dalam keluarga sangatlah penting.

Ketiga, kajian tentang pola asuh dalam komunitas, yang termasuk dalam penelitian yang dilakukan oleh Badruddin (2010), Rahman dan Yusuf (2012), dan Baki (2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pengasuhan anak di dalam keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama, tetapi juga oleh kemampuan orang tua untuk berpikir kreatif dalam menentukan arah hidup anak. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi perilaku pengasuhan orang tua. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pengetahuan orang tua sangat berpengaruh terhadap cara mereka mengasuh anak. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan dalam bidang pengasuhan anak, masih jarang ditemukan studi yang memeriksa pemenuhan kebutuhan dasar anak melalui sistem pengasuhan yang berbeda, seperti dalam masyarakat tribal atau suku. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penelitian yang perlu diisi dengan studi-studi yang lebih mendalam mengenai praktik pengasuhan di berbagai budaya.

Literatur yang ada menunjukkan bahwa perspektif mengenai kesejahteraan anak dan pengasuhan cenderung mengikuti teori Barat (Selin, 2013). Meskipun teori-teori ini memberikan wawasan yang berharga, mereka mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan konteks budaya yang berbeda, seperti di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2015), Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, dengan total mencapai 1.331 kategori suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki cara dan tradisi

tersendiri dalam mengasuh anak, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang dianut dan tentunya akan mempengaruhi sistem pengasuhan anak. Meskipun terdapat kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, namun setiap suku bangsa memiliki bahasa, adat istiadat, dan sistem kepercayaan yang berbeda, termasuk dalam praktik pengasuhan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak di Indonesia tidak dapat dipandang secara homogen, melainkan harus dilihat dalam konteks budaya yang spesifik.

Pengasuhan anak merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak. Dalam konteks global, pengasuhan yang baik diakui sebagai salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan individu (Maknun, 2018). Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai pengasuhan anak, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai sistem pengasuhan yang berlaku di masyarakat adat, terutama yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal. Penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya ini membentuk praktik pengasuhan dan mempengaruhi perkembangan anak. Sistem pengasuhan anak juga memiliki faktor protektif dan faktor risiko yang tentunya sangat krusial bagi tumbuh kembang anak. Faktor-faktor ini dapat mencakup dukungan emosional, pendidikan, dan stabilitas lingkungan, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan anak.

Hasil temuan kajian yang dilakukan oleh Suharto, Rusmana, dan Pratiwi (2009) dalam penelitian "Situation Analysis of Child Protection in Indonesia: A Case Study in Kebumen of Central Java and TTS and Sikka of East Nusa Tenggara (NTT)" mengungkapkan bahwa dalam sistem pengasuhan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat seperangkat keyakinan yang memperbesar faktor risiko terhadap perkembangan anak. Salah satu falsafah yang dianut oleh masyarakat setempat adalah "di ujung rotan ada emas," yang berarti untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan, anak harus dididik dengan keras. Falsafah ini bisa mencerminkan harapan tinggi yang dimiliki orang tua terhadap anak-anak mereka, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan yang berlebihan. Ini membuktikan bahwa nilai-nilai yang ada dalam budaya lokal dapat memperbesar faktor risiko. Masyarakat yang menganut pandangan bahwa kesuksesan hanya dapat dicapai melalui disiplin yang ketat dan pendidikan yang intensif dapat mengabaikan kebutuhan emosional dan psikologis anak.

Nilai-nilai pengasuhan yang diterima oleh orang tua berpotensi menyebabkan perkembangan yang negatif pada anak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Brooks (2001). Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak dalam masyarakat tradisional atau suku yang masih kental dengan adat, budaya, dan tradisi, rentan terhadap faktor risiko dalam perkembangan anak. Ketika budaya masyarakat setempat memperbesar faktor risiko, nilai-nilai pengasuhan yang diperoleh oleh orang tua juga dapat berkontribusi pada perkembangan negatif anak. Namun, terdapat kemungkinan bahwa nilai-nilai budaya dalam masyarakat tradisional tersebut juga mengandung faktor perlindungan yang dapat mendukung perkembangan anak. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai nilai-nilai budaya sangat penting untuk menentukan apakah mereka lebih cenderung berfungsi sebagai faktor risiko atau justru sebagai faktor perlindungan dalam konteks pengasuhan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada sistem pengasuhan alternatif dalam komunitas Dayak Kanayatn di Dusun Gunung Loncek. Komunitas ini memiliki sistem pengasuhan yang kaya dan unik, yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah praktik pengasuhan yang ada memiliki faktor perlindungan yang melindungi hak-hak anak demi kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak, meskipun didasarkan pada pengetahuan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Dengan memahami sistem pengasuhan yang diterapkan dalam komunitas ini, kita dapat mengidentifikasi elemen-elemen yang mendukung kesejahteraan anak dan bagaimana hal tersebut dapat diintegrasikan ke dalam praktik pengasuhan yang lebih luas. Nilai-nilai budaya dan tradisi masing-masing suku dapat mempengaruhi perkembangan anak secara positif atau negatif. Oleh karena itu, penting untuk

melakukan penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi bagaimana sistem pengasuhan dalam masyarakat tribal dapat memenuhi aspek perlindungan dan kesejahteraan anak.-

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang keunikan dan kekuatan praktik pengasuhan anak dalam masyarakat suku, yang dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik pekerjaan sosial berbasis tradisi dan budaya lokal (*Indigenous Social Work*). Dengan mengadopsi pendekatan yang menghargai dan memanfaatkan kearifan lokal, intervensi sosial dapat lebih efektif dan relevan dengan konteks budaya yang ada. Hal ini penting, mengingat bahwa setiap masyarakat memiliki dinamika dan tantangan tersendiri dalam pengasuhan anak yang memerlukan pendekatan yang disesuaikan. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk upaya advokasi hak-hak anak di tingkat lokal dan nasional, hal ini dikarenakan pengasuhan anak adalah isu yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik.

Dengan memahami dan menghargai keragaman praktik pengasuhan di berbagai komunitas, dapat meningkatkan kesejahteraan anak sekaligus memperkuat kohesi sosial dan budaya dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk mengeksplorasi sistem pengasuhan anak dalam konteks budaya yang khas. Diharapkan, hasilnya dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pengasuhan di Indonesia dan tempat lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk melanjutkan penelitian yang mendalam dan komprehensif mengenai pengasuhan anak di berbagai konteks budaya. Penelitian ini harus tidak hanya memperhatikan teori yang ada, tetapi juga mengintegrasikan pengalaman dan nilai-nilai lokal. Dengan pendekatan ini, kita dapat menciptakan sistem pengasuhan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak, memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa memandang latar belakang budaya mereka.

2. Metode

Desain penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial dan budaya yang kompleks, seperti praktik pengasuhan, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2013). Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengasuhan alternatif yang diterapkan di komunitas, khususnya di Dusun Gunung Loncek, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Dengan latar belakang budaya yang kaya dan beragam, komunitas ini menawarkan wawasan unik mengenai cara-cara pengasuhan yang berakar pada tradisi lokal (Patton, 2015).

Wawancara mendalam dan observasi partisipatif digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman dan perspektif keluarga yang menggunakan *pangoanant* (pengasuhan alternatif) dalam merawat balita mereka. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali cerita pribadi dan pandangan yang mungkin tidak muncul dalam interaksi yang lebih terstruktur (Kvale & Brinkmann, 2009), sementara observasi partisipatif memberikan kesempatan untuk melihat langsung interaksi sehari-hari dan dinamika sosial dalam konteks alami (Angrosino, 2007).

Informan penelitian dipilih secara purposive, berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria ini mencakup faktor-faktor seperti usia anak, keterlibatan dalam praktik pengasuhan alternatif, dan tingkat partisipasi dalam kegiatan komunitas (Palinkas et al., 2015). Informan terdiri dari aktivis LSM yang berperan sebagai penggerak pemuda desa, Sekretaris Adat Dayak Kanayatn setingkat Desa, Temanggung, serta tokoh adat, orang-orang tua, bidan desa, bidan kampung, guru TK setempat, dan keluarga-keluarga yang memiliki anak berusia 0-5 tahun. Proses wawancara dilakukan setelah memperoleh persetujuan verbal dari semua informan. Sebelum wawancara, peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan hak-hak mereka sebagai partisipan, termasuk hak untuk menarik diri kapan saja. Untuk menjaga kerahasiaan, identitas informan dilindungi dengan menggunakan inisial dalam penulisan hasil penelitian (Berg & Lune, 2012).

Selain itu, analisis data kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang holistik mengenai praktik pengasuhan alternatif dalam konteks budaya setempat (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis melibatkan pengkodean data, pengelompokan temuan berdasarkan kategori tematik, dan interpretasi data dalam kerangka teori pengasuhan dan budaya (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan teknik, serta melibatkan anggota komunitas dalam proses verifikasi temuan (Denzin, 1978). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman praktik pengasuhan di masyarakat adat serta implikasinya bagi kebijakan sosial dan pendidikan.

3. Hasil

3.1 *Pangoanant* dalam Masyarakat Dayak Kanayatn

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Temanggung* (tetua adat), diketahui bahwa *Pangoanant* berasal dari kata "ngoant" yang berarti mengasuh dan "bahoant" yang berarti "berasuh". Dengan demikian, *pangoanant* memiliki arti pengasuhan, dan orang yang mengasuh disebut *pangoant* (pengasuh). Istilah ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendalam dalam masyarakat Dayak Kanayatn, di mana pengasuhan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif komunitas. Istilah *pangoanant* berasal dari komunitas Dayak Kanayatn di Dusun Gunung Loncek yang berasal dari Manyuke. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak dalam masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh sejarah dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Di sisi lain, ada juga sebutan pengasuhan yang dikenal sebagai *Pangahoant*, yang juga berarti pengasuhan, tetapi digunakan oleh komunitas Dayak Kanayatn yang berasal dari Sui Ambawang. Perbedaan istilah ini menunjukkan adanya keragaman dalam praktik pengasuhan yang ada di antara sub-kelompok masyarakat Dayak.

Menurut *Temanggung* (tetua adat setempat), *pangoanant* adalah istilah dalam masyarakat Dayak Kanayatn yang merujuk pada pengasuhan alternatif atau pengganti bagi anak. Dalam konteks ini, *pangoanant* tidak hanya berfungsi sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai figur yang memberikan bimbingan dan dukungan emosional kepada anak. Dalam sistem ini, seseorang yang diberi kepercayaan oleh orang tua anak memiliki hak penuh untuk mengasuh, merawat, dan membimbing anak. Kepercayaan ini merupakan cerminan dari hubungan yang kuat antara orang tua dan *pangoant*, di mana orang tua merasa yakin bahwa anak mereka akan mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sama seperti yang mereka berikan. Terdapat dua versi *pangoanant*: pertama, pengasuh yang diberikan hak berdasarkan hubungan darah (pengasuhan kekerabatan/kinship care), dan kedua, pengasuh yang ditunjuk melalui prosesi adat pangarusant (pengangkatan anak/foster care), yang melibatkan kekerabatan sosial atau kedekatan dengan anak. Kedua versi ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem pengasuhan yang ada, di mana masyarakat dapat menyesuaikan praktik pengasuhan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

Pangoanant biasa berfokus pada pengasuhan yang bersifat informal dan lebih fleksibel, sedangkan *Pangoanant* Adat melibatkan proses ritual yang diakui secara adat dan memiliki makna yang lebih dalam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Dayak Kanayatn. Proses ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat, di mana setiap langkah dalam pengasuhan diiringi dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, kedua jenis *pangoanant* ini mencerminkan cara masyarakat Dayak Kanayatn dalam mengatur dan melaksanakan pengasuhan anak, baik dalam konteks kekerabatan maupun melalui prosesi adat yang formal. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak dalam masyarakat ini tidak hanya dilihat dari aspek praktis, tetapi juga dari sudut pandang budaya

dan spiritual yang mendalam.

3.2 Sistem Pengasuhan Alternatif Berdasarkan Keekerabatan Pertalian Darah (Kinship Care) pada Masyarakat Dusun Gunung Loncek

Kinship care atau pengasuhan berdasarkan keekerabatan pertalian darah dalam masyarakat Dayak Kanayatn merupakan praktik di mana anak-anak diasuh oleh anggota keluarga atau kerabat dekat ketika orang tua biologis tidak dapat merawat mereka. Praktik ini sangat penting dalam menjaga kesinambungan hubungan keluarga dan memastikan bahwa anak tetap berada dalam lingkungan yang familiar dan aman. Peran keluarga dan kerabat dalam menyediakan dukungan emosional dan sosial bagi anak-anak sangat berarti. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Temanggung* (tetua adat setempat), diketahui bahwa dalam konteks ini *pangoant* tidak hanya berfungsi sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keluarga dan tradisi yang harus diteruskan kepada generasi berikutnya. Seseorang yang diangkat sebagai *pangoant* (pengasuh) oleh orang tua anak memiliki hak penuh untuk mengasuh, merawat, serta membimbing anak. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari orang tua kepada *pangoant*, dimana mereka yakin bahwa *pangoant* akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Pangoant ini diberikan keleluasaan untuk mengurus anak dan bertanggung jawab di dalam rumah. Keleluasaan ini memungkinkan *pangoant* untuk menyesuaikan metode pengasuhan dengan kebutuhan spesifik anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Jenis *pangoant* (pengasuhan) pertama ini diambil berdasarkan pertalian darah, yaitu individu yang memiliki hubungan keluarga dengan anak. Dalam masyarakat Dayak Kanayatn, sistem pertalian darah menggunakan sistem bilineal/parental, yang berarti seorang anak dapat mengikuti jalur kekerabatan baik dari pihak ayah maupun ibu. Hal ini menciptakan jaringan dukungan yang luas, di mana anak tidak hanya bergantung pada satu individu, tetapi juga pada seluruh keluarga besar.

Dalam konteks hubungan keekerabatan, hubungan terputus pada sepupu delapan kali. Aturan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan keekerabatan dalam masyarakat Dayak Kanayatn, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap anggota keluarga lainnya. Pentingnya hubungan ini terutama terlihat dalam perkara perkawinan, di mana hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak merusak keturunan. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, di mana menjaga kualitas keturunan dianggap sebagai hal yang sangat penting. Selain itu, juga diperhatikan kelekatan anak dengan calon *pangoant*, seperti nenek/kakek, kakak/abang, paman/bibi, dan lain-lain. Kelekatan ini menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan siapa yang akan menjadi *pangoant*, karena hubungan emosional yang kuat dapat mendukung perkembangan anak secara keseluruhan.

Orang tua memberikan kepercayaan penuh kepada *pangoant* untuk menjalankan tugas pengasuhan bukan tanpa alasan. Dalam kondisi tertentu, orang tua ingin memastikan bahwa balita mereka tetap memenuhi segala kebutuhan dasar, seperti kasih sayang, makanan, minuman, keamanan, dan kesempatan bermain, terutama ketika orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena harus bekerja seharian. *Pangoant* versi pertama ini mirip dengan sistem pengasuhan anak oleh keluarga pengganti yang umum ditemukan dalam masyarakat. Ketika orang tua bekerja, anak dilimpahkan kepada pihak lain untuk diasuh sementara waktu, sehingga anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan. Di Dusun Loncek, mayoritas masyarakat Dayak Kanayatn bekerja di ladang untuk berkebun, menanam padi, dan menoreh getah (kebanyakan dilakukan oleh ibu-ibu), sementara sebagian lainnya bekerja di hutan untuk mengelola kayu (mayoritas dilakukan oleh bapak-bapak). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak dalam masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial yang ada.

Banyak warga dusun yang juga bekerja paruh waktu (sistem shift) di perusahaan sawit yang terdapat di sekitar dusun. Oleh karena itu, *pangoant* yang telah diberi kepercayaan penuh ini memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan anak tetap terpenuhi, meskipun orang tua tidak dapat mengasuh secara penuh dalam kesehariannya. Dalam konteks ini, *pangoant*

tidak hanya berfungsi sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pengganti orang tua yang memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada keterbatasan dalam waktu dan sumber daya, masyarakat Dayak Kanayatn tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pengasuhan yang berkualitas.

3.3. Sistem Pengasuhan Alternatif Melalui Prosesi Adat Pangarusant (Pengangkatan Anak/ Foster Care) pada Masyarakat Dusun Gunung

Sistem pengasuhan alternatif yang dilakukan melalui prosesi adat pangarusant merupakan praktik pengangkatan anak berbasis adat dalam masyarakat Dusun Gunung Loncek. Proses pangarusant ini tidak hanya melibatkan aspek praktis dari pengasuhan, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan budaya yang mendalam. Berdasarkan wawancara dengan temanggung (tetua adat setempat) diketahui bahwa proses pangarusant memperhatikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang dilakukan karena berbagai alasan, seperti ketika anak sering sakit, petunjuk dari mimpi, atau dalam kasus anak yatim piatu. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan dalam masyarakat ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan fisik, tetapi juga pada kebutuhan emosional dan spiritual anak. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjauhkan anak dari gangguan roh jahat dan memastikan kesehatan serta kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, pengasuhan dianggap sebagai tanggung jawab yang tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga komunitas dan kekuatan spiritual yang lebih besar.

Orang tua atau kerabat yang menerima petunjuk melalui mimpi bertugas menentukan pengasuh, yang dipilih melalui proses betanung (bersemedi/memohon petunjuk) yang dipimpin oleh seorang Imam Panyangahat (pemimpin proses betanung). Proses ini menjadi sangat penting karena menunjukkan bahwa pengasuhan anak tidak hanya dilihat dari segi fisik, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual yang kuat. Imam Panyangahat, sebagai figur yang dihormati dalam masyarakat, memiliki peran sentral dalam memberikan nasihat dan bimbingan mengenai pilihan pengasuh yang tepat, memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku. Proses ini juga berfungsi untuk menilai kesesuaian pengasuh berdasarkan indikator keberhasilan perkembangan anak yang tidak berdasarkan kepada hubungan kekerabatan pertalian darah, melainkan dari kekerabatan sosial dan faktor kelekatan pada anak merupakan kunci utama. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Dayak Kanayatn, kelekatan emosional antara anak dan pengasuh lebih diutamakan dibandingkan dengan hubungan darah semata. Jika hasilnya tidak memuaskan, anak dapat diangkat kembali untuk mencari pengasuh yang lebih cocok.

Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi keluarga untuk memastikan bahwa anak mereka mendapatkan pengasuhan yang terbaik, dan jika ada ketidakcocokan, mereka dapat melakukan penyesuaian dengan segera. Pengasuh dapat diangkat untuk jangka waktu tertentu atau tanpa batas waktu, tergantung pada kondisi anak. Keputusan mengenai jangka waktu pengangkatan ini mempertimbangkan kebutuhan spesifik anak dan kondisi pengasuh, mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika keluarga dan sosial dalam konteks pengasuhan. Selama proses ini, orang tua tetap memiliki hak penuh atas anak, tetapi memberikan tanggung jawab pengasuhan kepada pangoanant demi kebaikan anak. Keterlibatan orang tua dalam proses ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengalihan tanggung jawab, ikatan keluarga tetap terjaga dan orang tua tetap berperan aktif dalam kehidupan anak.

Ketika anak yang diangkat dewasa dan menikah, pengasuh berhak menerima ucapan terima kasih dan cinderamata sebagai penghargaan atas jasanya. Penghargaan ini mencerminkan rasa syukur dan pengakuan terhadap kontribusi pangoant dalam membesarkan anak, serta menunjukkan pentingnya hubungan sosial yang terjalin antara pengasuh dan anak. Jika pengasuh telah meninggal, cinderamata diberikan kepada keturunan pengasuh. Tradisi ini menunjukkan penghormatan yang

dalam terhadap nilai-nilai keluarga dan kekerabatan, di mana pengorbanan dan dedikasi seorang pengasuh diakui tidak hanya oleh anak yang diasuh, tetapi juga oleh generasi berikutnya.

Proses pangarusant mencerminkan upaya masyarakat Dayak Kanayatn untuk memastikan kesejahteraan anak-anak mereka. Pengasuhan yang baik, dengan memperhatikan aspek kelekatan, merupakan kunci dalam proses ini. Penelitian menunjukkan bahwa pangarusant bukan hanya sekadar upacara adat, tetapi juga merupakan ekspresi kepedulian yang mendalam terhadap masa depan anak-anak. Dalam hal ini, pangoant berupaya memenuhi berbagai aspek kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan fisik, emosional, dan stimulasi mental. Proses ini menggambarkan komitmen masyarakat untuk menjaga kesejahteraan anak dan memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan.

4. Pembahasan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengasuhan alternatif dalam masyarakat tradisional Dusun Loncek, baik melalui *pangoanant* berdasarkan hubungan darah (kinship care) maupun melalui prosesi adat pangarusant (foster care), memiliki kesamaan dengan pengasuhan anak pada umumnya. Menurut teori pengasuhan yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner (1979), lingkungan sosial dan budaya memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Kedua sistem ini menekankan pentingnya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, serta memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Perbedaan utama terletak pada alasan di balik perlunya pengasuhan alternatif bagi balita. Sistem *pangoanant* mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan kekerabatan, sedangkan pangarusant lebih menekankan pada aspek spiritual dan budaya. Teori attachment yang dikembangkan oleh Bowlby (1969) juga relevan di sini, karena menekankan pentingnya hubungan emosional yang aman antara anak dan pengasuh dalam mendukung perkembangan psikologis anak.

Dalam konteks pengasuhan alternatif ini, media dongeng dan syair berperan penting dalam mengajarkan nilai-nilai luhur kepada balita. Menurut Vygotsky (1978), interaksi sosial dan budaya sangat penting dalam proses pembelajaran anak. Melalui dongeng, anak-anak tidak hanya terhibur tetapi juga diajarkan tentang moralitas, kejujuran, dan nilai-nilai kehidupan yang penting dalam masyarakat Dayak Kanayatn. Dongeng dan syair dipilih berdasarkan kondisi psikologis anak, baik saat bahagia, sedih, atau ketika perlu dinasehati. Proses ini mengajarkan anak untuk mengenali dan mengelola emosi mereka, yang sangat penting bagi perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Dengan demikian, hasil penelitian mengindikasikan bahwa kedua sistem pengasuhan alternatif tersebut telah memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk aspek fisik biomedis, emosional/kasih sayang, dan stimulasi mental. Teori kebutuhan Maslow (1943) dapat digunakan untuk memahami bagaimana pengasuhan yang baik memenuhi kebutuhan dasar anak, yang pada gilirannya mendukung perkembangan mereka secara holistik. *Pangoant* berupaya memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, perawatan kesehatan, kebersihan, dan lingkungan yang layak. Mereka juga memberikan kasih sayang, rasa aman, dukungan emosional, serta stimulasi yang sesuai dengan perkembangan anak.

Sistem pengasuhan ini memberikan faktor protektif yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Dalam hal ini, pengasuhan di masyarakat Dayak Kanayatn menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi yang sulit, mereka tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, penting untuk terus mendukung dan melestarikan praktik-praktik pengasuhan yang berbasis pada kearifan lokal, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengasuhan alternatif yang diterapkan dalam komunitas Dayak Kanayatn, baik melalui sistem *kinship care* maupun *foster care*, secara efektif mendukung tumbuh kembang anak. Kedua sistem pengasuhan ini tidak hanya melindungi hak-hak

anak akan kebutuhan pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sejalan dengan konsep kepentingan terbaik bagi anak, dengan memperhatikan aspek fisik, emosional, dan mental. Selain itu faktor kelekatan merupakan kunci utama dari proses pengasuhan yang ada khususnya pada proses adat *pangurusant* (pengangkatan anak/ *foster care*). Dengan demikian, pengasuhan alternatif bagi anak dalam masyarakat tradisional Dusun Gunung Loncek ini dapat dianggap sebagai praktik pengasuhan yang memiliki protective factor dalam yang mendukung perkembangan anak secara holistik.

6. Saran

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk saran. Pertama, penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami lebih dalam praktik pengasuhan anak di berbagai masyarakat suku. Dengan mengeksplorasi komunitas yang berbeda, kita dapat memperoleh wawasan tentang faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pengasuhan, serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi. Dukungan kelembagaan juga sangat penting untuk mengembangkan model pelayanan sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal. Model ini harus dirancang dengan mempertimbangkan kearifan lokal agar lebih efektif dan diterima masyarakat. Pendidikan dan penyuluhan tentang pengasuhan yang baik harus menjadi prioritas, terutama di daerah kurang terlayani. Kerja sama antara lembaga pendidikan, LSM, dan pemerintah daerah dapat memperluas distribusi materi edukasi berbasis nilai budaya lokal, meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan diri orang tua. Program pelatihan dan workshop perlu diadakan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Pelatihan ini harus fokus pada keterampilan pengasuhan dan dukungan terhadap perkembangan emosional anak, serta menciptakan ruang bagi orang tua untuk berbagi pengalaman. Selain itu, evaluasi dan pemantauan terhadap program yang telah dilaksanakan penting untuk memahami dampak inisiatif dan melakukan penyesuaian guna meningkatkan efektivitas. Pendekatan komprehensif dan kolaboratif diharapkan dapat membangun sistem pengasuhan yang menjamin kesejahteraan anak dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal.

Ucapan terimakasih: Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Teluk Bakung, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW di Gunung Loncek, serta Tetua Adat dan seluruh masyarakat dusun yang telah memberikan informasi dan data yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Angrosino, M. (2007). *Doing ethnographic and observational research*. SAGE Publications.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Mengulik data suku di Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>
- Berg, B. L., & Lune, H. (2012). *Qualitative research methods for the social sciences* (8th ed.). Pearson.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. Basic Books.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101 <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Brooks, R., & Goldstein, S. (2001). *Fostering strength, hope, optimism in your children: Raising resilient children*. United States of America: McGraw-Hill.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Ervika, E. (2005). *Kelekatan (Attachment) Pada Anak*. Sumatera Utara: e-USU Repository Universitas Sumatera Utara.

- Fitriyani, P. (2018). Pendidikan karakter bagi generasi Z. Prosiding Konferensi Nasional Ke-7. *Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)* (pp. 23-25). Jakarta: Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah.
- Ginita Sari. (2006). *Kontribusi Pola Pengasuhan Orangtua Terhadap Perkembangan Kemandirian dan Kreativitas Anak*. Bandung: Fakultas Ilmu Pendidikan UPI <http://file.upi.edu>.
- Gunarsa, S. D. (2006). *Dari Anak Sampai Usia Lanjut : Bunga Rampai Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Herlina. (2013). *Hubungan Pola Asuh Keluarga Dengan Kemandirian Perawatan Diri Anak Usia Sekolah Di Kelurahan Cislak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok*. Depok: Fakultas ilmu Keperawatan Prodi Magister Ilmu Keperawatan Peminatan Keperawatan Komunitas.
- Hoghugh, M. &. (2004). *Handbook of parenting: theory and research for practice*. London: Sage.
- Khairuddin, H. (1997). *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Maccoby, E. (1980). *Social Development; Psychological Growth and the Parent– Child Relationship*. New . New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Mahlia, Y. (2009). *Pengaruh Karakteristik Ibu Dan Pola Asuh Makan Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Bayi Di Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Th 2008*. . Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Maknun, D., dkk. (2018). Cahyanti, Alviana, ed. *Sukses Mendidik Anak di Abad 21* (PDF). Yogyakarta: Samudra Biru.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50 (4), 370-396.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Narendra, M. (2002). *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*. Jakarta: Agung Seto.
- Nasikun. (1991). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Nursalam. (2005). *Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta: Salemba Medika.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533-544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Prasetya, G. T. (2003). *Pola Pengasuhan Ideal*. Jakarta: Gramedia.
- Santrock, J. W. (2003). *Adolescence: Perkembangan Remaja*. Ed. 6. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, S. (2002). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Selin, H. (Eds.). (2013). *Parenting across cultures: Child rearing, motherhood and fatherhood in non-Western cultures*. Springer Science & Business Media, New York: London
- Soetjiningsih. (1995). *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC.
- Suharto, E. R. (2009). *Situation Analysis of Child Protection in Indonesia: A Case Study in Kebumen of Central Java and TTS and Sikka of East Nusa Tenggara (NTT)*. Plan International Indonesia 2009. Plan International Indonesia.
- Supanto, d. (1990). *Pola Pengasuhan Anak Secara Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen P dan K.
- Suparlan, P. (1989). *Interaksi Antar Etnik di Beberapa Propinsi di Indonesia*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Dirjen Kebudayaan Depdikbud.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Yusuf, S. L. (2007). *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>.